

ZAIR
publishing

Dr. H. Fahrurroji, M.Pd.
Dr. Marwan Setiawan, M.Pd.

MASYARAKAT MADANI

PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME



semuanya diterima oleh

Agustus 2022

ahruroji, M.Pd

wan Setiawan, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1	
MASYARAKAT DAN BANGSA INDONESIA.....	1
A. Masyarakat Indonesia.....	1
B. Persepsi dan Sikap Tentang Pluralisme dan Multikulturalisme.....	6
C. Kebhinnekaan Indonesia.....	8
BAB 2	
MASYARAKAT MADANI.....	15
A. Masyarakat Madani.....	15
B. Munculnya Masyarakat Madani.....	18
C. Hijrah Nabi dan Pengaruhnya.....	22
D. Membangun Madinah.....	23
E. Hakekat Masyarakat Madani.....	26
F. Ciri-Ciri Masyarakat Madani.....	39
G. Masyarakat Madani di Indonesia.....	57
H. Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>).....	58
I. Masyarakat Madani di Indonesia: Paradigma dan Praktik.....	61
J. Masyarakat Madani dan Wawasan Kebangsaan.....	65
BAB 3	
PLURALISME DI INDONESIA.....	75
A. Hakekat Pluralisme.....	75
B. Munculnya Pluralisme.....	79
C. Islam dan Pluralisme.....	84
D. Pluralisme Agama dan Tantangannya.....	87

an, M.Pd

E. Pluralisme Dalam Persepsi Tokoh Agama di Indonesia....	90
F. Pluralisme Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.....	92
G. Agama Hindu Memandang Pluralisme Agama dan Multikulturalisme.....	97
H. Agama Budha, Pluralisme Agama dan Multikulturalisme	102
I. Agama Islam Memandang Pluralisme Agama dan Multikulturalisme.....	104
 BAB 4	
MULTIKULTURALISME SEBAGAI SUATU KENISCAYAAN.....	109
A. Mengapa Multikulturalisme ada?	109
B. Hakekat Multikulturalisme	110
C. Multikulturalisme dalam Persepsi Tokoh Agama	115
DAFTAR PUSTAKA	135

MASYARAKAT MADANI

Pluralisme dan Multikulturalisme

Dr. H. Fahruroji, M.Pd
Dr. Marwan Setiawan, M.Pd



MASYARAKAT MADANI
Pluralisme dan Multikulturalisme

Penulis

Dr. H. Fahruroji, M.Pd
Dr. Marwan Setiawan, M.Pd

Tata Letak

Ulfa

Desain Sampul

Faizin

15.5 x 23 cm, vi + 141 hlm.
Cetakan I, Oktober 2022

ISBN: 978-623-466-159-0

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571
e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta
No. 132/DIY/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Karena itu kami berterima kasih dan bersyukur semata-mata hanya kepada-Nya, atas segala karunia nikmat yang dianugerahkan kepada penulis buku referensi yang berjudul Masyarakat Madani: Pluralisme dan Multikulturalisme yang kini hadir di hadapan pembaca.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan empiris tentang Masyarakat Madani, Pluralisme dan Multikulturalisme yang penulis sendiri sebagai pengampu mata kuliah ini. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini sedikit banyak mengalami kesulitan dalam mencari buku referensi untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar mereka. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan bantuan kepada mereka sebagai sumber belajar. Meskipun tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun kami berupaya untuk mewujudkannya. Di samping itu, tentunya kami berharap bisa dijadikan salah satu rujukan di dalam perkuliahan khususnya, maupun bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan tentang hal tersebut.

“Tiada gading yang tak retak”, demikian pula dalam penulisan buku ini di sana sini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan sangat penulis harapkan demi penyempurnaan buku ini.

Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya baik moral maupun material demi terealisasikannya buku ajar yang sederhana ini. Sekali lagi semoga buku ajar ini bermanfaat bagi para pembaca. Dan tentunya

kami tak lupa berdo'a semoga amal baik semuanya diterima oleh Allah SWT.

Bandung, Agustus 2022

Penulis,

Dr. H. Fahruroji, M.Pd

Dr. Marwan Setiawan, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1	
MASYARAKAT DAN BANGSA INDONESIA.....	1
A. Masyarakat Indonesia	1
B. Persepsi dan Sikap Tentang Pluralisme dan Multikulturalisme.....	6
C. Kebhinnekaan Indonesia.....	8
BAB 2	
MASYARAKAT MADANI	15
A. Masyarakat Madani.....	15
B. Munculnya Masyarakat Madani.....	18
C. Hijrah Nabi dan Pengaruhnya	22
D. Membangun Madinah.....	23
E. Hakekat Masyarakat Madani.....	26
F. Ciri-Ciri Masyarakat Madani.....	39
G. Masyarakat Madani di Indonesia	57
H. Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>).....	58
I. Masyarakat Madani di Indonesia: Paradigma dan Praktik	61
J. Masyarakat Madani dan Wawasan Kebangsaan	65
BAB 3	
PLURALISME DI INDONESIA.....	75
A. Hakekat Pluralisme.....	75
B. Munculnya Pluralisme.....	79
C. Islam dan Pluralisme.....	84
D. Pluralisme Agama dan Tantangannya	87

E. Pluralisme Dalam Persepsi Tokoh Agama di Indonesia	90
F. Pluralisme Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	92
G. Agama Hindu Memandang Pluralisme Agama dan Multikulturalisme	97
H. Agama Budha, Pluralisme Agama dan Multikulturalisme	102
I. Agama Islam Memandang Pluralisme Agama dan Multikulturalisme	104
BAB 4	
MULTIKULTURALISME SEBAGAI SUATU KENISCAYAAN	109
A. Mengapa Multikulturalisme ada?	109
B. Hakekat Multikulturalisme	110
C. Multikulturalisme dalam Persepsi Tokoh Agama	115
DAFTAR PUSTAKA	135

BAB 1

MASYARAKAT DAN BANGSA INDONESIA

A. Masyarakat Indonesia

Indonesia dengan aneka ragam suku bangsa, bahasa, dan budaya serta agama dan kepercayaannya menjadikan bahwa Negara ini harus pandai dan piawai dalam memupuk kebersamaan dan persatuan. Kebersamaan dan persatuan inilah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai wujud dalam menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa adanya kebersamaan akan sulit mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Munculnya gerakan-gerakan politik dan intelektual yang dimotori oleh beraneka macam kelompok seperti kelompok masyarakat adat, kelompok minoritas suku bangsa, kelompok etnis-kultural, kelompok imigran baik yang lama maupun yang baru, kaum feminis, kelompok gay dan lesbian, dan kelompok pecinta lingkungan (*the greens*) menunjukkan adanya berbagai keinginan yang mereka harapkan. Kelompok-kelompok ini mewakili praktek, gaya hidup, pandangan dan cara hidup yang berbeda. Dalam sejumlah hal ditentang oleh kultur yang dominan dalam masyarakat luas. Meskipun di antara kelompok ini ada yang begitu berbeda sehingga sulit untuk berbagi agenda filsafat dan politis yang sama, mereka semua bersatu dalam hal menentang pandangan masyarakat luas yang cenderung menyamaratakan atau menggolong-golongkan karena didasarkan pada keyakinan pokok, bahwa hanya ada satu jalan yang benar dan normal untuk memahami dan menstrukturkan wilayah-wilayah kehidupan. Dengan cara mereka sendiri, kelompok-kelompok ini menghendaki agar masyarakat mengenali legitimasi atas perbedaan-perbedaan mereka, khususnya pandangan-pandangan yang dalam kacamata

mereka bukan pandangan yang remeh-temeh atau insidental namun pandangan yang sungguh-sungguh berangkat dari dan membentuk identitas mereka. Meskipun istilah identitas terkadang menggelembung sedemikian rupa sehingga seolah-olah mencakup hampir segala sesuatu yang memberi ciri pada seorang individu atau kelompok tertentu, para pembela kelompok-kelompok pergerakan ini menggunakan istilah "identitas" untuk mengacu pada karakteristik-karakteristik tertentu yang dipilih atau diwariskan (sudah dibawa sejak lahir) yang menggambarkan mereka sebagai jenis orang atau kelompok yang tertentu dan membentuk bagian utuh dari pemahaman mereka atas jati diri mereka. Kelompok-kelompok pergerakan ini dengan demikian menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan pengakuan identitas dan perbedaan atau, lebih persisnya, perbedaan-perbedaan yang terkait dengan identitas.

Meskipun gerakan-gerakan baru ini sering dimasukkan di dalam payung istilah multikulturalisme, namun multikulturalisme pada kenyataannya hanya mengacu pada beberapa saja. Multikulturalisme bukan melulu soal perbedaan dan identitas pada dirinya sendiri namun juga menyangkut hal-hal yang tertanam dan ditunjang oleh budaya; yaitu seperangkat kepercayaan dan praktek yang melalui jalan sekelompok orang yang memahami jati diri mereka dan mengatur hidup baik individu maupun kolektif. Tidak seperti perbedaan yang datang dari pilihan-pilihan yang bersifat individual, perbedaan-perbedaan yang berakar pada budaya membawa ukuran otoritas tertentu dan dipolakan, distrukturkan berkat ketertancapannya dalam sebuah sistem makna dan signifikansi (pemberian makna pada tanda dan benda tertentu) yang diyakini bersama dan punya nilai historis. Kejelasan konsep antara dua jenis perbedaan ini menggunakan istilah keragaman (*diversity*) untuk menyebut perbedaan yang berakar pada budaya. Dengan demikian, multikulturalisme adalah tentang keragaman budaya atau perbedaan-perbedaan yang berakar pada budaya. Karena teramat mungkin berbicara tentang macam-macam perbedaan yang tidak harus didasarkan pada perbedaan yang mengakar pada budaya, dan

juga sebaliknya, maka tidak semua pejuang politik pengakuan harus bersimpati pada multikulturalisme. Meskipun bagian dari politik pengakuan, multikulturalisme adalah sebuah gerakan yang jelas (*distinct*) yang mempertahankan posisi yang ambivalen (mendua, atau bernilai lebih dari satu).

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari 34 provinsi (*Situs Resmi Kemendagri, 4 Januari 2020*). Hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan-perbedaan yang sangat beragam. Mulai dari ras, suku, budaya, bahasa maupun agama. Perbedaan-perbedaan itulah yang memelopori terbentuknya semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Dengan tujuan agar tidak tumbuh perpecahan di Indonesia. Namun lambat laun, masyarakat tak lagi mengenal semboyan tersebut. Mereka merasa besar akan egonya masing-masing, saling merasa paling baik dan benar. Hingga timbullah perpecahan di antara masyarakat. Bahkan nyawa seakan tak lagi ada harganya, pembunuhan dimana-mana, pembantaian merajalela. Mereka mengatasnamakan harga diri, hingga tak peduli lagi dengan saudara sendiri.

Issue pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia semakin mengemuka setelah terjadinya Reformasi di awal tahun 1998, yang ditandai dengan euforia keterbukaan dan kebebasan di berbagai bidang kehidupan di Indonesia terlebih di bidang politik dan sosial budaya yang melahirkan multi partai, yang pada era sebelumnya aspirasi politik tersebut hanya diwadahi dalam tiga partai. Satu partai penguasa (yang waktu itu tidak mau disebut partai) dan dua partai lainnya yang hanya difungsikan sebagai "boneka penyeimbang semu" terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu pluralisme dan multikulturalisme semakin menampakkan bentuk kongkretnya setelah KH. Abdurrahman Wahid yang secara fenomenal menduduki kursi kepresidenan, sehingga dia dinobatkan sebagai "Bapak Pluralisme" dengan kebijakan monumentalnya, yaitu mengakui akan adanya *Komunitas Papua* dan *Masyarakat Tionghoa* di Indonesia berikut karakteristik, adat-istiadat, keyakinan dan identitas budaya mereka. Namun demikian,

konsep atau paham pluralisme sebagai saling pengakuan atas entitas dan eksistensi keberagaman keyakinan, dan pengamalan ajaran agama masih sangat suram. Hal ini mencuat melalui kesenjangan, gesekan dan konflik yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Situasi ini juga menyentuh pada domain keberagaman etnis. Tentu kondisi ini sangat tidak menguntungkan dan mengganggu bahkan mengancam keberagaman serta kebhinnekaan sebagai “kekayaan” budaya bangsa Indonesia.

Pluralisme dan multikulturalisme tak lain adalah sebagai salah satu bentuk pengejawantahan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, berbeda-beda namun dalam satu kesatuan. Pluralisme dan multikulturalisme yang dipersepsi seakan tumbuh dan berhembus dari Barat, maka ditanggapinya secara sangat berhati-hati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Padahal pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia adalah sebuah realitas yang tak terbantahkan. Namun, sebagian besar para pemeluk agama baru memasukkannya dalam wacana “etis-normatif” belum pada tataran aktual-implementatif sehingga di berbagai daerah masih sering terjadi keretakan sosial, gesekan fisik-psikologis, bahkan tidak jarang terjadi konflik vertikal-horizontal dengan mengatasnamakan agama.

Di Indonesia setidaknya ada tiga pandangan terhadap pluralisme dan multikulturalisme. *Pertama* ialah pluralisme dan multikulturalisme dipahami sebagai ko-eksistensi dan ko-rekognisi akan entitas dan realitas keberagaman serta keberadaan paham dan kebenaran keyakinan yang berbeda-beda antara satu paham atau keyakinan dengan paham atau keyakinan yang lain. *Kedua* pandangan bahwa semua paham baik paham keagamaan maupun kebudayaan adalah sama dan untuk itu tidak perlu dipilah dan dibedakan antara satu dengan lainnya. *Ketiga* penyatuan semua keyakinan dan kebudayaan yang berbeda-beda itu ke dalam satu “bejana” atau “area yang sama”. Dari ketiga pandangan ini muncul dua kecenderungan sikap terhadap pluralisme dan multikulturalisme. Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa pluralisme dan multikulturalisme, adalah sebagai realitas “religio-

historiko-kultural” yang telah mengurat akar di bumi Nusantara ini, karena itu tidak perlu dicurigai bahkan harus dipertahankan atau dikembangkan pada jalur yang searah dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Namun, di sisi lain ada yang berpandangan bahwa pluralisme dan multikulturalisme adalah paham yang juga bisa berubah menjadi gerakan yang berusaha “merelatifkan” semua agama, dan kebudayaan serta berusaha untuk “mensinkretiskan” ajaran berbagai agama, bahkan menyamaratakan semua agama dalam segala aspeknya. Pandangan ini yang dikhawatirkan mengulang lagi ekstrimisme dan radikalisme atas nama agama, yang tentunya merugikan seluruh umat beragama.

Fahrurroji (2017) memahami multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. “Multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural dalam kehidupan masyarakat. Multikultural juga dapat dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.

Dalam konteks ini penulis tidak berambisi untuk mengungkapkan pluralitas etnis, politis, bahasa maupun identitas khas dari masing-masing komunitas, akan tetapi lebih memfokuskan pada pluralitas agama dan keanekaragaman budaya yang bersentuhan dengan nilai-nilai *teologis*, *ritual* dan *moral*. Ketiga aspek ini menjadi sangat pluralism apabila dipandang oleh para pemeluk agama yang fanatik-ekstrim-radikal sebagai sesuatu yang mengganggu “keberagamaan” mereka, terutama yang terkait dengan masalah teologis, ritual dan moral. Agar pluralisme dan multikulturalisme dipahami secara logis dan proporsional dalam persepektif positif-prospektif-

optimistik, bukan apriori-dogmatik-emosional-pesimistik, sehingga kehadirannya bukan sebagai ancaman maupun perusak entitas kebenaran, kebebasan dan kerukunan hidup beragama, akan tetapi justru sebagai penguat entitas kebenaran, kebebasan dan perlindungan beragama bagi para pemeluknya.

Oleh karena patronase dan primordialitas pengamalan ajaran agama oleh para pemeluknya masih terasa kuat di Indonesia ini, maka pemahaman pemikiran serta sikap dan pandangan para pemuka dan tokoh berbagai agama tentang pluralisme dan multikulturalisme ini perlu didalami secara komprehensif, original-proporsional dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan keimanan serta ajaran dari masing-masing agama. Di dalam tulisan ini difokuskan pada persepsi dan sikap para pemuka agama terhadap pluralisme dan mutikulturalisme di bidiang teologis, ritual, etika-moral dan kebudayaan.

B. Persepsi dan Sikap tentang Pluralisme dan Multikulturalisme

Persepsi yang dalam konteks psikologi sosial oleh Krech dkk. (1988) disamaartikan dengan kognisi "*cognition*" ialah kemampuan seseorang memahami obyek. Persepsi juga dipahami sebagai penglihatan, tanggapan dan daya memahami sesuatu, misalnya memahami orang lain, benda atau ide-ide di luar dirinya. Respons terhadap obyek itu dibentuk oleh cara bagaimana seseorang itu memandang obyeknya. Setiap individu memiliki "*cognitive world*" dan tidak ada seseorang yang memiliki dunia kognitif yang serupa dengan orang lain (Krech, 1988:18). Lebih lanjut Krech (1988:20) menyebutkan bahwa persepsi atau kognisi seseorang dipengaruhi oleh dunia kognisinya yang ditentukan oleh faktor-faktor: fisik dan lingkungan sosial, struktur fisiologis, keinginan dan tujuan-tujuan, serta pengalaman-pengalaman. Pemahaman seseorang dapat mengalami perubahan jika terjadi (1) perubahan karena keinginan, (2) perubahan karena informasi, (3) perubahan karena kognisi yang mendahuluinya, (4) dan perubahan faktor-faktor personal.

Persepsi menurut L. Klages sebagai kecakapan untuk menerima kesan-kesan dan mesti dibedakan mengenang atau mengingat kembali. Persepsi bisa ditinjau dari empat aspek (1) aspek kuantitas dengan kemungkinan obyek sedikit, banyak atau sedang, (2) kualitas dengan tanggapan yang hangat, segar atau kering, material atau spiritual, lahiriyah atau batiniah, (3) dinamika tanggapan, ada yang terus-menerus atau cepat menghilang atau kurang terkenal, (4) dualitas kapasitas, ada medan yang bisa ditangkap ke dalam jiwa dan ada medan yang bisa ditangkap keluar melalui pancaindera. (Sumardi S, dikutip oleh Ya'qub, Muhammad, 1986: 131)

Persepsi adalah proses yang tampil melalui penyajian informasi terseleksi dan penyusunan pola-pola secara fleksibel dari informasi mengenai sesuatu berikut ciri-ciri yang sedikit banyak konstan pada diri mereka. Proses perseptual dengan sendirinya terjadi pada permulaan interaksi, akan tetapi proses-proses itu tidak berhenti disana. Pemasukan informasi yang terus-menerus selama proses interaksi memerlukan kontinuitas proses-proses perseptual. (Newcombs, 1985: 107-108).

Dengan mengetahui persepsi para pemuka agama ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana pandangan mereka terhadap keberagaman atau pluralitas keyakinan agama, tata cara peribadatan dan prinsip-prinsip moral yang mereka jadikan pedoman pengamalannya. Hal ini dipandang strategis bagi sosialisasi pandangan mereka kepada umat penganut atau pengikutnya, karena alasan paternalisme dan patronase yang selama ini mewarnai hubungan antara pemuka agama dan para penganutnya.

Sementara itu sikap merupakan posisi mental atau perasaan yang dipersiapkan untuk bertindak atau kondisi jiwa yang berkecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, namun perbuatan itu sendiri belum tentu terwujud. Sikap didasarkan oleh suatu pandangan tertentu terhadap suatu obyek atau kesediaan beraksi terhadap suatu hal. Sikap selalu diarahkan kepada suatu hal, suatu obyek tidak ada sikap tanpa obyeknya (Gerungan, 1989 151). Sikap itu mungkin terarahkan terhadap benda-benda, orang-

orang, tetapi juga terhadap peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, lembaga-lembaga, terhadap norma-norma, nilai-nilai dan lain-lain hal. Sikap terbagi kepada sikap individual dan sikap sosial. Sikap individual merupakan sikap yang ditunjukkan orang perorang, sedangkan sikap sosial, ialah sikap yang ditampilkan oleh sekelompok orang atau masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut maka pemahaman akan sikap para pemuka agama terhadap pluralisme dan multikulturalisme menjadi kunci utama dalam menyosialisasikan keduanya kepada masyarakat pendukung atau penganut agama mereka. Dengan demikian, kesadaran atas keberagaman serta pengakuan akan entitas dari masing-masing pemuka dan penganut agama akan terwujud, sehingga terbangun masyarakat yang "pluralis-multikulturalis" yang menghargai dan mengapresiasi keberagaman keyakinan, sosial-budaya, etika-moral, rasial-etnis dan adat-istiadat masing-masing individu maupun komunitasnya.

Permasalahannya adalah tidak ada jaminan bahwa semua pemuka agama mempunyai persepsi yang sama terhadap pluralisme dan multikulturalisme, lebih sulit lagi ialah memahami sikap dan perilaku mereka dalam kaitannya dengan pluralitas dan multikulturalitas para pemuka agama dan para penganutnya. Terlebih wilayah Bandung khususnya dan Indonesia umumnya ini dikenal dengan "masyarakat majemuk dan heterogen", maka "gerakan" pluralisme dan multikulturalisme yang aktual-implementatif dalam persepektif ko-eksistensi dan ko-rekognisi menjadi jembatan emas memperkokoh: "Bhinneka Tunggal Ika"

C. Kebhinnekaan Indonesia

Pulau-pulau Indonesia terletak di sepanjang khatulistiwa, di antara benua Asia dan Australia. Dikarenakan tepat di garis khatulistiwa itu, maka pada umumnya Indonesia beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim kedua benua yang mengapitnya. Wilayah ini secara garis besar hanya mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hanya saja kedua musim itu

tidak merata. Wilayah Indonesia bagian barat rata-rata mempunyai curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia. Musim kemarau di wilayah timur Indonesia rata-rata lebih panjang dari pada kawasan Indonesia Barat.

Pulau-pulau Indonesia berukuran besar dan kecil. Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 adalah sebanyak 17.504 buah, 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Luas lautan jauh lebih besar daripada luas daratannya. Sebagai benua (kepulauan) maritim, luas laut Indonesia adalah 2/3 dari seluruh kawasan Indonesia. Tidak ada Negara di dunia ini yang memiliki keunikan kepulauan seperti Indonesia ini. Lima pulau berukuran besar, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sebagian pulau Kalimantan memang dikuasai Indonesia, tetapi Kerajaan Malaysia menguasai Sabah dan Serawak yang berada di Timur Laut dan Barat Laut pulau Kalimantan, sedangkan Kesultanan Brunei di sebelah utara timurnya. Pulau Papua, adalah pulau terbesar kedua di dunia. Bagian barat pulau ini menjadi milik Indonesia, sedangkan bagian timurnya adalah milik Negara Papua New Guinea. (Sastrapradja, 2010: 77-78)

Lebih lanjut Sastrapradja (2010) mengemukakan bahwa kepulauan Indonesia kaya akan gunung-gunung berapi. Tidak kurang dari 300 gunung berapi membentuk rangkaian dari barat sampai ke timur pulau-pulainya. Kemudian ia mengutip pendapat Zen (2015) yang mengatakan bahwa begitu menakjubkan mengenai kepulauan di Indonesia ini adalah tata letaknya yang dalam dua busur, yaitu busur luar dan busur dalam. Busur dalam bersifat vulkanik dan busur luar bersifat non vulkanik. Dari segi geologi, lempeng Indonesia bagian barat masuk dalam paparan Sunda, sedangkan bagian timur masuk dalam paparan Sahul. Di antara kedua paparan itu ada cekungan laut dengan berbagai kedalaman. Di kepulauan Indonesia tersebar cekungan-cekungan sedimen berpotensi ekonomi tinggi dan mengandung cadangan minyak dan gas bumi.

Dari segi kelautan, Kepulauan Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Massa air yang mengisi kawasan Indonesia adalah dari Samudra Pasifik. Sesuai dengan *United Nation Convention of Law of The Sea* (UNCLOS) yang ditetapkan pada tahun 1982, perairan laut yang berada di antara pulau-pulau Indonesia itu resmi menjadi daerah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Adapun laut-laut yang berada di wilayah Indonesia adalah:

1. Laut Cina Bagian Selatan;
2. Laut Sulu;
3. Perairan jeluk (dalam) Kawasan Timur Indonesia;
4. Paparan Arafura;
5. Bagian Perairan Samudra Hindia.

(Ratnawati, 2007)

Dapat dibayangkan kekayaan yang tersimpan di dalam kawasan laut yang seluas itu, baik yang berupa kekayaan hayati, maupun yang non hayati.

Bagaimana dengan halnya penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku. Beberapa naskah menyebutkan bahwa penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 500 suku. Asal-usul penduduk di tiap pulau dicoba dijelaskan dalam seri buku "*the ecology of Indonesia*". Manusia di Jawa yang benar-benar tergolong *Homo Sapiens*, kemungkinannya adalah keturunan Austroloids yang serupa dengan Aborigin Australia zaman sekarang. Kelompok ini kemudian didesak oleh imigran dari Asia Tenggara, yang berbudaya dan beradaptasi lebih tinggi terhadap kehidupan sebagai pengumpul dan pemburu. Kemudian datanglah kelompok Austronesia atau Detero Malays, yang datang dari Taiwan dan China Selatan. Dengan berjalannya waktu dapatlah dipahami berkembangnya keanekaragaman suku di Indonesia.

Tiap suku mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Dengan terbukanya komunikasi antarsuku, ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan akan hilangnya sejumlah bahasa daerah di

Indonesia. Bahasa Daerah banyak yang belum didokumentasikan atau dibakukan dan dibukukan, artinya masih merupakan bahasa lisan yang dipergunakan untuk berkomunikasi sehari-hari saja. Hal inilah mungkin sebagaimana yang dikemukakan oleh Simon Robinson bahwa jumlah bahasa yang ada di Indonesia menurutnya adalah 746. Dia memprediksi pada akhir abad 21 tinggal 10 persen saja atau sekitar 74 atau 75 bahasa saja. Pemerintah Indonesia melalui Badan Bahasa yang melakukan pengamatan sejak tahun 1995 hingga 2008 terkumpul 442 bahasa. Angka ini terjaring dari 2.185 daerah pengamatan. (*Republika*, Senin 12 September 2011).

Sejak Indonesia mengumumkan atau memproklamasikan kemerdekaannya, bahasa resmi bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 36 "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Sekelompok pemuda yang menginginkan berdirinya Negara Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan mengucapkan Sumpah Pemuda yang intinya mengaku berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Bahasa Indonesia adalah yang dipergunakan oleh Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Akan tetapi sampai sekarang, bahasa-bahasa daerah masih dipergunakan di tempat-tempat yang mayoritas penduduknya bersuku sama, meskipun dalam upacara-upacara resmi, bahasa Indonesia yang dipergunakan.

Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia masih terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Memang dibandingkan dengan bahasa daerah, terutama yang mempunyai tingkatan berdasarkan status, bahasa Indonesia lebih mudah dipahami oleh orang yang terlahir dari ibu yang tidak berbahasa Indonesia. Kemudahan penggunaan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi antarsuku menyebabkan mudahnya bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa Nasional. Besar kemungkinan bahasa-bahasa daerah yang dipergunakan hanya oleh sejumlah kecil orang saja akan segera hilang. Tabel 1.1 berikut ini memberikan gambaran tentang bahasa-bahasa yang kemungkinan akan punah.

Tabel: 1.1
Bahasa Ibu di Indonesia yang terancam punah

No	Bahasa	Jumlah Penutur	Daerah	Keterangan
1	Benkala	41 orang	Jawa dan Bali	
2	Lengilu	4 orang	Kalimantan	
3	Amahal	50 orang	Maluk	
4	Emplawas	250 orang	Maluku	
5	Hoti	10	Maluk	
6	Ibu	35 orang	Maluku	Populasi etnis 50 hingga 200 orang
7	Kamarian	10 orang	Maluku	Populasi etnis 6000 orang
8	Kayeli	3 orang	Maluku	Tidak digunakan selama 3 dekade, populasi etnis 800 orang
9	Loun	20 orang	Maluk	
10	Naka'ela	5 orang	Maluk	
11	Nusa Laut	10 orang	Maluku	Populasi etnis 2.226 orang
12	Paulohi	50 orang	Maluk	
13	Piru	10 orang	Maluk	
14	Salas	50 orang	Maluk	
15	Barumokok	40 orang	Papua	
16	Duriankere	30 orang	Papua	Populasi etnis 60 orang
17	Dusner	6 orang	Papu	
18	Kanun, Badi	10 orang	Papua	
19	Kayu Pulau	50 orang	Papua	Populasi etnis 573 orang
20	Kehu	25 orang	Papua	

No	Bahasa	Jumlah Penutur	Daerah	Keterangan
21	Kembra	20 orang	Papua	Populasi etnis 50 orang
22	Kwerisa	32 orang	Papua	Populasi etnis 130 orang
23	Liki	11 orang	Papua	Populasi etnis 320 orang
24	Mander	20 orang	Papua	
25	Mapia	1 orang	Papua	
26	Masimasi	10 orang	Papua	
27	Massep	25 orang	Papua	Populasi etnis 85 orang
28	Mor	25 orang	Papu	
29	Morori	50 orang	Papua	Populasi etnis 250 orang
30	Namla	30 orang	Papu	
31	Saponi	4 orang	Papu	
32	Tandia	2 orang	Papu	
33	Woria	6 orang	Papua	

Sumber: ethnologue.com (*Republika*, Senin 12 September 2011)

Salah satu contoh, di Pulau Rote yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Bali, terdapat tidak kurang dari 19 bahasa. Juga di Pulau Papua yang berbukit-bukit tajam, yang dihuni oleh berbagai suku, suku-suku di sana tidak saling mengenal bahasa suku lainnya. Untuk mencermati lebih lanjut mengenai hal suku-suku dan kelompok etnis, Boedhihartono (2008) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Keanekaragaman budaya di Indonesia tercermin pada keberadaan suku-sukunya. Agar tidak ada kerancuan akan arti suku, berikut adalah batasan-batasan yang perlu diperhatikan:

1. **Bangsa** adalah warga dari suatu Negara (*state*). Sebuah bangsa bisa terdiri dari satu suku atau banyak suku; bisa juga terdiri atas satu bahasa atau banyak.
2. **Suku bangsa atau kelompok etnik** adalah komunitas yang bermukim di suatu daerah, memiliki sejarah yang sama, mengadopsi kebudayaan yang kurang lebih sama, memiliki kepercayaan dan agama sama, mitos dan legenda sama, dan berbicara dengan satu bahasa. Juga mereka memiliki makanan dasar dan kebiasaan makan yang sama.
3. **Budaya** biasa berkaitan dengan suku atau kelompok etnis, tribe, klan, dan keluarga sebagai unit sosial terkecil.
4. **Kelompok ras** adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri fisik-biologis kurang lebih sama.

Berbicara mengenai suku-suku di Indonesia (Nusantara), Teuku Jacob (1967) mengemukakan bahwa suku-suku di Nusantara merupakan percampuran antara Palaemongoloid (*early Malay*) dengan Austromelanesian. Perlu dicatat bahwa dari bangsa Austromelanesian itu lahir suku bangsa Melanesia (Suku Irian misalnya) dan suku bangsa Austroloid. Peninggalan dengan ciri-ciri suku bangsa Austroloid ini tersebar luas di Nusantara. Peninggalan di Wajak, Malang (pen) (Jawa Timur) memperlihatkan ciri lebih ke arah Paleomongoloid. Selanjutnya, Jacob menduga bahwa Wajak sangat mungkin sebagai cikal bakal kelompok yang disebut Proto Melayu dan Austromelanesian. Khusus mengenai orang-orang di Jawa, menurut Nyessen (1929), secara fisik mereka memperlihatkan tiga ciri khas, yaitu Darvido Australian, Negroid dan Mongoloid. Hal-hal inilah yang menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara yang multisuku, multietnis, multibahasa dan multicultural sebagaimana yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini.

BAB 2

MASYARAKAT MADANI

A. Masyarakat Madani

Civil society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan **masyarakat sipil** atau **masyarakat madani**. Kata madani berasal dari kata bahasa Arab, Madinah, yaitu sebuah kota tempat hijrah Nabi Muhammad saw. Madinah berasal dari kata “madaniyah” yang berarti peradaban. Oleh karena itu, masyarakat madani berarti masyarakat yang beradab dan berperadaban.

Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri dan demokratis, masyarakat madani lahir dari proses penyemaian demokrasi, hubungan keduanya ibarat ikan dengan air, masyarakat madani yang umumnya dikenal dengan istilah masyarakat sipil (*civil society*), pengertiannya, ciri-cirinya, sejarah pemikiran, karakter dan wacana masyarakat sipil di Barat dan di Indonesia serta unsur-unsur di dalamnya.

Civil Society yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “Masyarakat Madani” merupakan suatu bentuk masyarakat yang sedang digandrungi oleh hampir semua orang yang menghuni planet bumi ini. Kebutuhan dan tuntutan atas kehadiran masyarakat madani, bersamaan dengan maraknya dan menggelornya suara-suara tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dan demokratisasi hampir di semua belahan dunia kini sedang mendambakannya.

Semua orang tentunya mengharapkan dan mendambakan hidup aman, tentram, damai, sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan olehnya. Kesemuanya itu akan dapat tercapai bila semua orang yang ada didalamnya berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya. Tentu antara orang yang satu dengan orang yang lainnya memiliki caranya sendiri yang berbeda-beda. Oleh karena

itu, perlu adanya tatanan yang disepakati bersama dalam wujud sistem kenegaraan yang disetujui oleh masyarakat itu sendiri. Maka munculah berbagai sistem kenegaraan seperti monarki, uni, republik dan lain-lain. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses tanpa henti yang dapat mengubah watak, sikap, perilaku dan lain-lainnya ke arah yang lebih baik yang diinginkannya.

Indikator dalam menentukan tercapainya masyarakat yang damai, tentram dan sejahtera ini akan sangat bergantung terhadap masyarakat bangsa yang sedang menjalaninya dan akan menyesuaikan dirinya terhadap situasi dan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat Indonesia khususnya yang sesuai dengan cita-citanya yaitu ingin memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD'45) tentu akan senantiasa berusaha untuk mencapai cita-citanya tersebut. Untuk itulah masyarakat Indonesia senantiasa berusaha dengan segala daya upaya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya itu. Berbagai macam cara dilakukan dan diusahakan salah satu diantaranya adalah pembentukan-perwujudan suatu masyarakat yang bernama masyarakat madani.

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal yang telah disebutkan itu merupakan pengertian umum dari masyarakat madani, berikut ini ada beberapa pengertian masyarakat madani menurut para ahli:

- **Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia**, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu.
- **Menurut Syamsudin Haris**, masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab

seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat.

- **Menurut Nurcholis Madjid**, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban dengan ciri antara lain: egaliterian (kesederajatan), menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi dan musyawarah.
- **Menurut Ernest Gellner**, *Civil Society* atau Masyarakat Madani merujuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara.
- **Menurut Cohen dan Arato**, *Civil Society* atau Masyarakat Madani adalah suatu wilayah interaksi sosial diantara wilayah ekonomi, politik dan Negara yang didalamnya mencakup semua kelompok-kelompok sosial yang bekerjasama membangun ikatan-ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama (*public good*).
- **Menurut Muhammad AS Hikam**, *Civil Society* atau Masyarakat Madani adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.
- **Menurut M. Ryaas Rasyid**, *Civil Society* atau Masyarakat Madani adalah suatu gagasan masyarakat yang mandiri yang dikonsepsikan sebagai jaringan-jaringan yang produktif dari kelompok-kelompok sosial yang mandiri, perkumpulan-perkumpulan, serta lembaga-lembaga yang saling berhadapan dengan negara.

B. Munculnya Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani itu sebenarnya merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad saw. di kota Madinah. Perkataan *Madinah* dalam bahasa Arab dapat dipahami dari dua sudut pengertian. Pertama, secara konvensional kata madinah dapat bermakna sebagai "kota". Kedua, secara kebahasaan dapat berarti "peradaban", meskipun di luar kata madani ada pula kata "*madaniyah*", yang berarti peradaban, kata ini juga berpadanan dengan kata "*tamaddun*" dan "*hadhlarah*" yang memiliki makna yang hampir sama.

Sebenarnya, apa yang dikenal sebagai Kota Madinah itu adalah daerah yang sebelumnya bernama Yatsrib. Umari (1999:63) menyebutkan bahwa kondisi Yatsrib sebagai sebuah kota yang dikelilingi bebatuan gunung berapi yang hitam. Wilayah paling penting adalah Harrah Al-Wabarah di bagian barat. Harrah Waqim lebih subur dan padat penduduknya dibanding dengan Harrah Wabarah. Gunung Uhud terletak di sebelah utara Yatsrib dan Gunung Asir di sebelah Barat Daya. Banyak lembah di Madinah. Yang paling terkenal adalah Wadi Batsan, Mudhainib, Mahzur, dan Aqiq. Lembah-lembah itu membentang dari selatan ke utara. Nama Yatsrib sudah ada dalam tulisan-tulisan Ma'ini. Suatu tanda akan keunikannya. Nabi-lah yang kemudian mengubah namanya menjadi Madinah, setelah hijrah ke kota itu. Perubahan nama Yatsrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebuah proklamasi untuk mendirikan dan membangun masyarakat berperadaban di kota itu. Dasar-dasar masyarakat madani inilah, yang tertuang dalam sebuah dokumen "Piagam Madinah" yang didalamnya menyangkut antara lain wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, tanggung jawab social dan politik, serta pertahanan, secara bersama.

Di kota Madinahlah, Nabi membangun masyarakat berperadaban berlandaskan ajaran Islam, masyarakat yang bertaqwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Semangat ketaqwaan yang dalam

dimensi vertikal untuk menjamin hidup manusia, agar tidak jatuh hina dan nista.

Apakah di Madinah itu ada masyarakat yang memeluk agama lain? Tentunya ada misalnya masyarakat yang beragama Yahudi. Jawwad Ali yang dikutip oleh Umari (1999) menyebutkan ada banyak teori tentang Yahudi Madinah dan Hijaz secara umum. Darimana mereka bermigrasi dan kapan mereka tiba? Teori yang banyak dipakai oleh para ahli menyebutkan bahwa mereka bermigrasi dari Syam (Syiria Barat) pada abad pertama dan kedua Masehi. Yakni, setelah orang-orang Romawi menguasai Syiria dan Mesir pada abad pertama sebelum Masehi dan menguasai Nabataean pada abad kedua Masehi. Kehadiran orang-orang Romawi menyebabkan Yahudi berpindah ke Jazirah Arabia yang relative terhindar dari dominasi Romawi.

Imigrasi Yahudi ke Hijaz semakin membengkak setelah kegagalan mereka memberontak melawan Romawi. Mereka mendapat tekanan dari Empiror Titus tahun 70 Masehi. Sebagian Yahudi datang ke Yatsrib. Sebagian lagi tiba di sana setelah perlawanan mereka gagal, antara tahun 132 dan 135 di bawah kekuasaan Empiror Hadrian. Mereka membentuk komunitas Yahudi di Madinah dan Hijaz.

Selain itu, ada Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraidhoh yang datang ke sana dan menetap karena kesuburan tanahnya dan posisinya yang strategis sebagai jalan kafilah perdagangan menuju Syiria. Mereka menetap di Warrah Waqim hingga bagian timur Yatsrib, wilayah paling subur. Suku Yahudi yang lain dan terkenal adalah suku Qainuqo'. Ada perbedaan pendapat tentang asal usul mereka: apakah mereka Yahudi yang pindah ke Yatsrib ataukah orang-orang Arab yang masuk Agama Yahudi. Perbedaan pendapat serupa juga menyangkut suku-suku Yahudi yang kecil-kecil yang disebutkan dalam sumber-sumber Arab, seperti Bani Akrimah, Bani Muhammad, Bani Zu'ara, Bani Syatibah, Bani Jasyam, Bani Mu'awiyah, Bani Murad, Bani Qasis, dan Bani Tsa'labah.

Sumber-sumber tidak menyebutkan data statistik berapa jumlah mereka, tetapi buku-buku sirrah menyebutkan jumlah tentara

masing-masing suku. Bani Qainuqa' mempunyai 700 tentara; sekitar jumlah yang sama dimiliki Bani Nadhir, dan antara 700 sampai 900 di Bani Quraidhah. Jumlah tentara di ketiga suku Yahudi ini, lebih dari 2000 orang. Ini belum lagi suku-suku kecil yang hidup di beberapa daerah Yatsrib. As-Samhudi menyebutkan bahwa ada lebih dari dua puluh suku-suku kecil di sana.

Jelasnya, masyarakat Madinah sebelum kehadiran Arab, didominasi oleh Yahudi, baik secara ekonomi, politik maupun intelektual. Yahudi meninggalkan pengaruh kuat di Madinah dan pada saat yang sama mereka sangat dipengaruhi oleh suku-suku Arab di sekeliling Yatsrib. Misalnya, Yahudi membawa gagasan membangun benteng dari Syiria ke Yatsrib. Jumlahnya sampai lima puluh Sembilan. Mereka juga membawa keahlian dalam pertanian. Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman seperti kelapa sawit, anggur, delima dan sejumlah tanaman yang menghasilkan biji-bijian. Demikian pula dalam peternakan unggas.

Sebagaimana Yahudi sangat berpengaruh di Yatsrib, mereka juga sangat dipengaruhi oleh orang-orang Arab di sekeliling mereka. Misalnya solidaritas kesukuan mulai terlihat di kalangan Yahudi, termasuk '*ashabiyah*' atau '*fanatisme*' kedermawanan, kesenangan terhadap puisi, dan latihan-latihan mempergunakan senjata. Perasaan ini menyelimuti Yahudi, sampai batas bahwa mereka tidak bisa hidup sebagai satu kelompok agama. Sebaliknya, mereka hidup sebagai suku-suku yang berselisih yang sulit diselesaikan, bahkan pada masa Nabi ketika mereka menghadapi pembuangan.

Sementara penganut agama Nasrani merupakan kelompok minoritas. Mereka berasal dari kelompok Bani Najran. Masyarakat Bani Najran memeluk Kristen pada tahun 343 M ketika kelompok missionaris Kristen dikirim oleh Kaisar Romawi untuk menyebarkan agama Nasrani di wilayah itu.

Selain penganut agama Yahudi dan Nasrani, terdapat pula para penganut agama primitif yang menyembah kekuatan-kekuatan alam. Mereka tidak banyak, tetapi keberadaan mereka merupakan

sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Mereka hidup sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang dengan menjalankan praktik peribadatan yang tidak bersesuaian dengan agama monotheisme atau agama tauhid. Karena itu, tak jarang di antara mereka terjadi keributan, terutama antara mereka dengan masyarakat yang menganut agama Yahudi. Para penganut agama ini berkeyakinan bahwa mereka adalah manusia yang dipilih Tuhan sehingga merasa diri mereka paling benar dan mengejek kelompok lain. Keadaan ini berlangsung cukup lama hingga kedatangan dan perkembangan Islam di kota Yatsrib (Madinah).

Suku-suku Aus dan Khazraj yang berasal dari bangsa Arab pun tinggal di Yatsrib. Yaitu suatu daerah yang wilayah-wilayah suburnya telah ditinggali dan diduduki terlebih dahulu oleh orang Yahudi. Kenyataan ini memaksa Aus dan Khajraj menyingkir ke daerah-daerah padang pasir.

Aus dan Khazraj masih mempunyai hubungan dengan suku Azd Yaman yang bermigrasi dari Yaman ke utara dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama diperkirakan terjadi pada 207 M, ketika Khul'az pindah ke Mekkah.

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang alasan migrasi Azd ini. Ada yang mengaitkan dengan rusaknya waduk Ma'rib dan banjir Al-A'ram. Pendapat lain mengaitkan dengan kegagalan politik dan ambruknya ekonomi akibat dominasi Romawi atas Laut Merah. Pendapat ini lebih akurat, karena instabilitas politik dan ekonomi itu mempunyai dampak yang lebih besar terhadap penduduk, termasuk Azd yang saat itu terbilang sebagai suku terbesar atau mayoritas yang mendiami di sekitar waduk Ma'rib.

Sidyu mengutip dari Umari (1999) memastikan tanggal kedatangan mereka pada tahun 300 M dan mendominasi Yatsrib pada tahun 492 M. Di kalangan suku Azd yang turut bermigrasi adalah Aus dan Khazraj yang menetap di Yatsrib bersama dengan orang-orang Yahudi. Suku Aus menempati daerah Al-A'Wali (dataran Tinggi) di samping Quraedhah dan Nadzir. Sementara Khazraj

menempati dataran rendah Madinah, sebagai tetangga suku Bani Qunaiqa'. Daerah yang ditempati suku Aus lebih subur dibandingkan dengan yang ditempati Bani Khazraj. Hal ini menimbulkan munculnya konflik antara kedua belah pihak. Kehadiran mereka tentu menguntungkan orang-orang Arab, baik secara ekonomi atau kependudukan. Keuntungan itu misalnya, terlihat dalam jumlah penduduk dan kekayaan yang terus bertambah. Tidak ada data statistik tentang jumlah kekayaan yang terus bertambah. Tidak ada data statistik tentang jumlah penduduk Aus dan Khazraj, tetapi dua suku itu menyediakan 4000 tentara ketika pasukan Islam bergerak untuk membuka Mekkah pada tahun 8 H.

C. Hijrah Nabi dan Pengaruhnya

Muhajirin datang ke kota Madinah yang pada masa itu disebut Yatsrib. Pada mulanya, mereka berasal dari suku Quraisy. Kegiatan hijrah terus berlangsung dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslimin di seluruh bagian jazirah untuk bermigrasi ke Madinah. Ini berlangsung sampai secara resmi dihentikan setelah pembukaan Mekkah pada tahun 8 Hijriyah.

Hijrah merupakan peristiwa besar sehingga dijadikan sebagai permulaan tahun baru kalender Islam, sejak Umar bin Khattab membuat kalender hijriyah. Hijrah merupakan bukti ketulusan dan dedikasi kepada keimanan dan akidah. Para muhajirin meninggalkan tanah kelahirannya, harta, keluarga, dan kawan-kawan mereka untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Ketika orang-orang Quraisy berusaha mencegah Syu'aib ar-Rumi dari berhijrah dengan alasan bahwa ia telah bekerja keras mengumpulkan kekayaan di Mekkah yang sebelumnya tidak mempunyai apa-apa, Syu'aib malah meninggalkan kekayaan itu untuk mereka dan ia berhijrah tanpa membawa apa pun. Ketika Rasulullah mendengar peristiwa itu, beliau bersabda, " Syu'aib telah beruntung."

Orang-orang kafir Quraisy juga telah menghalangi Abu Salamah untuk bermigrasi bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi itu tidak mempengaruhinya untuk melakukan hijrah sendiri,

meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kurang lebih satu tahun berikutnya, istrinya Ummu Salamah, keluar setiap pagi ke *abtah*, dan berdiam di sana sampai sore, hingga ia dan anaknya dapat berkumpul kembali bersama suaminya di Madinah. Demikianlah, hijrah selalu berkaitan dengan situasi-situasi sulit dan merupakan ujian keimanan bagi orang-orang mukmin tentang kekuatan iman mereka dan superioritasnya atas kepentingan-kepentingan duniawi lainnya.

Peristiwa hijrah merupakan indikasi kebenaran ajaran Nabi dan latihan bagi para pengikutnya. Dengan proses itu, mereka menjadi mampu untuk memikul tanggung jawab sebagai khalifah Allah di muka bumi, untuk mengimplementasikan hukum-hukum Allah, melaksanakan perintah-Nya dan berjuang di jalan-Nya. Mereka menjadi ahli (mampu) saat harus terlibat untuk pembentukan Negara Madinah setelah sebelumnya "tertindas di muka bumi (Mekkah) dan takut orang-orang akan menganiayanya dan menculik mereka...." (Al-Anfal:26)

D. Membangun Madinah

Islam menganggap orang-orang mukmin sebagai saudara. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersadara...." (al-Hujurot:10). Membangun suatu hubungan persahabatan yang akrab dan tolong-menolong dalam kebaikan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jalinan persaudaraan khusus yang diintroduksi oleh Islam yang menghasilkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban spesifik, berbeda dengan hak-hak dan kewajiban umum bagi seluruh orang beriman.

Al-Baladuri menjelaskan bahwa Nabi telah membentuk ikatan persaudaraan (*rabithah al-muakhhah*) di antara muslim Mekah sebelum hijrah atas dasar kesetiaan terhadap kebenaran dan saling menolong. Beliau menerapkan persaudaraan antara Hamzah dan Zaid bin Haritsah; Abu Bakar dan Umar; Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf; Zubair bin Awwam dan Abdullah bin Mas'ud; Ubaid bin Harits dan Bilal bin Al-Habsyi; Mus'ab bin

Umair dan Sa'ad bin Abi Waqqash; Abu Ubaid bin Al-Jarrah dan Salim; Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufail dan Thalhah bin Ubaidillah dan Rasulluah sendiri dengan Ali bin Abi Tholib. (Umari:78-79)

Sementara, Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir cenderung berpendapat bahwa *muakhah* belum terjadi di Mekah. Berkata Ibnu Qayyim, "Disebutkan bahwa Nabi menetapkan persaudaraan di kalangan muhajirin dan dia mengambil Ali sebagai saudaranya sendiri. Kita sama sekali tidak meragukan adanya *muakhah* di Medinah. Para muhajirin atas dasar persaudaraan sesama muslim dan sesama dari daerah tertentu, tidak perlu menetapkan muakhah di antara mereka sendiri. Yang mereka butuhkan adalah *muakhah* antara muhajirin dan anshor.

Sebenarnya pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir lebih kuat, karena kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang *sirah* (sejarah Islam) tidak ada yang menyinggung-nyinggung tentang penetapan *muakhah* di Mekah. Al-Baladuri sendiri adalah sumber awal riwayat atau riwayat atau informasi ini, dan mereka mengintroduksinya tanpa ada kata-kata *qaaluu* (mereka berkata) dan tanpa isnad. Kenyataan ini menjadikan riwayatnya menjadi lemah (*dhaif*). Para kritikus juga menilai al-Baladuri lemah. Jika pun memang penetapan muakhah telah ada di Mekah, tetapi itu terbatas pada saling menolong dan menasihati antara dua saudara. Dengan kata lain, tidak mempunyai implikasi yuridis adanya hak-hak waris misalnya.

Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah menghadapi berbagai persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, muhajirin telah meninggalkan keluarga dan bahkan sebagian besar harta kekayaan mereka di Mekah. Keterampilan mereka adalah dalam bidang perdagangan karena orang-orang Quraisy memang ahli, bukan dalam pertanian dan peternakan yang merupakan tonggak penting ekonomi Madinah.

Karena kebutuhan akan modal, muhajirin tidak dengan sendirinya menapaki jalan mulus dalam masyarakat baru ini. Sementara

negara yang baru muncul itu pun dihadapkan kepada dilema-dilema, misalnya bagaimana agar muhajirin dapat membiayai dan memperoleh tempat tinggal yang nyaman. Hubungan muhajirin dan masyarakat Madinah baru saja dimulai. Muhajirin meninggalkan keluarga dan kolega-kolega mereka di Mekah. Hubungan mereka putus sama sekali. Hal itu tentu menciptakan rasa kesepian dan kerinduan akan tanah kelahirannya. Belum lagi adanya perbedaan cuaca antara Mekah dan Madinah sehingga banyak muhajirin yang mengalami sakit flu dan pilek. Keadaan mereka membutuhkan perhatian khusus, lebih dari sekedar penerimaan sebagai tamu-tamu biasa. Anshor tidak segan-segan menawarkan pertolongan. Mereka betul-betul memperlihatkan contoh pengorbanan yang amat mulia, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an,

"... Dan mereka (anshar) mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)" (al-Hasyr:9)

Kedermawanan anshar sungguh luar biasa hingga mereka mengusulkan kepada Nabi membagi pohon-pohon kurma yang mereka miliki kepada muhajirin. Alasannya, karena pohon kurma itu merupakan sumber penghasilan bagi sebagian besar mereka, Nabi menyarankan agar pohon-pohon kurma itu tetap dikelola mereka, tetapi mereka dapat membagi-bagikan kurma kepada Muhajirin.

Anshar juga menawarkan tanah-tanah ekstra kepada Nabi sembari berkata, "Jika Anda mau, ambilah rumah kami". Nabi berterima kasih kepada mereka atas kebaikan mereka. Kemudian beliau membangun rumah-rumah di atas tanah yang telah diberikan oleh anshar dan tanah-tanah yang belum dimiliki oleh orang.

Sikap dermawan ini sangat menyentuh hati muhajirin. Mereka secara terus terang membicarakan kedermawanan anshar. Anas meriwayatkan bahwa muhajirin berkata, " Ya Rasulullah, kami belum pernah datang kepada suatu masyarakat seperti anshar ini! Jika mereka memiliki barang sedikit, mereka adalah orang-orang terbaik yang kami saksikan yang berusaha memberikan bantuan; jika mereka memiliki barang banyak, mereka pun orang-orang terbaik yang

mengorbankannya. Mereka telah memberikan kami apa saja yang kami butuhkan, mengizinkan kami untuk ikut dalam kebahagiaan mereka. Kami khawatir bahwa merekalah yang akan memperoleh segala pahala dari Allah. "Nabi bersabda, "Tidak, sepanjang kalian menghormati dan berdoa untuk mereka".

E. Hakekat Masyarakat Madani

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa kenyataan masyarakat yang hidup di Yatsrib adalah pluralistik yaitu, ada yang beragama Yahudi, Nasrani, Islam, dan beragama primitive. Hal ini memerlukan penataan yang komprehensif agar mereka dapat hidup damai secara berdampingan.

Suatu peradaban, filsafat, dan agama pasti mempunyai ciri khas sendiri. Semakin kuat ciri khas suatu peradaban, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kehidupan individu dalam lingkungannya. Sebagian ideologi memiliki kesamaan satu sama lainnya, dan hanya berbeda dalam hal-hal tertentu saja, seperti dalam filsafat-filsafat materialistik yang sekarang sangat dominan di dunia kontemporer. Untuk mengubah dari satu ideologi ke ideologi yang lain tidak diperlukan transformasi besar-besaran dan radikal dalam hidup seseorang. Jika kekagumannya terhadap suatu kaidah berubah, dan keyakinannya terhadap yang lain bertambah, itu sudah cukup untuk mengadakan peralihan dari suatu ideologi ke ideologi yang lain. Perubahan seperti ini sama sekali tidak membutuhkan kerja besar karena memang tidak berpengaruh secara mendalam terhadap perilaku keseharian atau kebiasaan-kebiasaan yang berakar dalam. Apalagi hal itu tidak akan terefleksi dalam kehidupan nyata seorang individu.

Fenomena ini tidak berlaku dalam Islam. Sejak kehadirannya, agama ini telah membawa **transformasi radikal** dalam kehidupan individu dan sosial. Ia telah merombak secara total perilaku keseharian dan kebiasaan-kebiasaan yang berakar dalam, sebagaimana juga merombak standar-standar, penilaian dan cara pandang seseorang terhadap alam, hidup dan manusia itu sendiri. Demikian pula struktur

masyarakat juga tidak luput dari perombakan ini: sebagian hilang dan yang baru muncul.

Perubahan-perubahan yang dibawa Islam sangat mendasar dan komprehensif. Dari sudut pandang keimanan dan akhlak, ia mempresentasikan suatu lompatan dari penghambaan sesuatu yang nyata (*tangible things*), seperti patung-patung dan bintang-bintang yang dapat dilihat dan diraba, menuju kepada penghambaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat digambarkan atau dipadankan dengan sesuatu apapun di dunia ini, "*....tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia...*" (as-Syura:11); *Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu....*"(Al-An'am:103). Dia hanya dapat diketahui dengan apa yang Dia deskripsikan tentang dirinya sendiri dalam Kitab-Nya dan melalui firman yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, tanpa *tamsil* 'representasi', *tasybih*, *antropomorfisme*, *naïf*, atau *ta'til* (konsep teologis yang menolak segala sifat Allah).

Inilah lompatan besar dari akal "primitive" yang hanya dapat bersentuhan dengan materi-materi nyata menuju "akal peradaban" yang mampu menyerap konsep kebenaran akan konsep keesaan Tuhan (tauhid). Dialah Tuhan Yang Maha Tinggi dan tidak menyerupai segala atribut manusia, Tuhan sekalian alam. Dalam perilaku keseharian manusia, Islam menghadirkan perubahan radikal. Apa yang dialami sebelum Islam, harus dilemparkan jauh setelah ia menerima Islam. Arab tidak lagi dibatasi oleh hukum berdasarkan hubungan sosialnya. Ia menjadi "terdisiplinkan" oleh kekuatan syariah yang memberi warna dalam segala aspek kehidupannya, dalam perilaku moral dan kebiasaan, tidur dan bangun, makan dan minum, kawin dan cerai, jual dan beli.

Kebiasaan memang mengontrol seseorang, maka adalah sulit untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama dan meraih kebiasaan-kebiasaan baru. Tetapi, keagungan keyakinan yang Islam tanamkan ke dalam hati sanubari para pemeluknya menjadikan mereka mampu menyingkirkan segala kepribadian pra-Islam dalam seluruh aspeknya dan meraih kepribadian Islam dengan segala

nilainya. Mereka terbiasa untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, meniatkan segala kegiatan sosial dan ekonominya kepada-Nya. Karena ibadah dalam Islam mencakup segala aktivitas dan gerakan yang diniatkan kepada-Nya. Mereka taat mengerjakan shalat sebagai tiang agama, lima kali sehari semalam.

Manusia mempunyai tabiat, pada saat-saat tertentu, untuk malas dan enggan melaksanakan tugas-tugas dan komitmennya, tetapi seorang muslim – karena penyerahan totalnya kepada Allah – menjadikan terbiasa untuk melaksanakan tugas-tugas dan komitmennya, menjadi terbiasa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Ketika menjelaskan betapa shalat butuh kesabaran tersendiri, Allah berfirman:

“Dan, perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya...”
(Thaha:132)

Demikian pula kewajiban puasa yang mengganggu kebiasaan makan dan minum sehari-hari, juga membutuhkan kemauan keras dan keyakinan mendalam. Zakat yang melibatkan penyerahan sebagian harta yang diperoleh dirinya setiap tahun juga menuntut seseorang yang membersihkan dirinya dari ketamakan dan kekikiran. Dalam kaitan pembayaran zakat seorang muslim harus mencintai Tuhannya melebihi cintanya kepada uang dan hartanya. Berdasarkan alasan inilah, para *murtaddin* pada zaman Khalifah Abu Bakar mengatakan bahwa mereka bersedia tetap muslim asalkan dibebaskan dari kewajiban mengeluarkan zakat.

Disamping menjadi terbiasa terhadap peraturan-peraturan baru dan melaksanakannya, seorang muslim tidak mempunyai alternative lain kecuali membersihkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging seperti minum khamar, bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang Islam, dan praktik-praktik riba yang merajalela dalam ekonomi Mekah dan kota-kota lainnya. Kaum muslim membersihkan diri dari kebiasaan-kebiasaan ini, dan yang lainnya sebagai respons terhadap perintah Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Maidah:90-91).

Orang-orang Anshor mengeluarkan kendi-kendi khamar ke jalan-jalan dan menumpahkannya, sembari berkata, "Kami telah berhenti dari (meminum khamar wahai Tuhan)." Minum khamar yang mereka tinggalkan merupakan kebiasaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan individual dan sosial mereka. Khamar yang mereka tumpahkan adalah kekayaan yang mereka kurbankan sebagai ketaatan mereka kepada Allah, Tuhan sekalian alam.

Orang-orang Arab tidak akan menyerahkan control dirinya kepada orang manapun. Unit sosial dan politik mereka adalah suku. Negara-negara kecil yang bermunculan di beberapa tempat Jazirah Arab sebelum Islam telah menjadi buntu. Sukuisme dan jalan hidup yang mengembara (*nomadic*) yang bercirikan solidaritas kesukuan, konflik dan perpecahan, telah sangat dominan di seluruh semenanjung jazirah. Islam datang dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat mereka, baik secara individu maupun suku. Negara Madinah secara totalistik dibangun di atas ideologis, dan menyatukan semenanjung Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah di bawah bendera Islam. Ini adalah babak baru dalam sejarah politik jazirah Arab.

Islam membawa perubahan radikal dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan, *"(Kami mengambil warna kami (sibghoh) dari Allah, dan siapakah yang lebih baik dari Allah dalam memberi warna?....(Al-Baqarah:138).*

Demikian sekilas penjelasan mengenai munculnya masyarakat madani, sekarang kita bahas ciri-ciri dari masyarakat madani itu sendiri.



Gambar 1
Teks Piagam Madinah
Gambar (Foto) diambil dari Museum Madinah (2019)

Kalau diuraikan dan diterjemahkan menjadi 47 pasal akan terlihat dan dapat dibaca sebagai berikut.

ميثاق المدينة المنورة (Piagam Madinah)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib

(Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka

١. انهم امة واحدة من دون الناس

Pasal 1 Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain

٢. المهاجرون من قريش على ريعتهم يتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم

يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin

٣. وبنوعوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها

بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

٤. وبنوساعدة على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها

بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 4 Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

٥. وبنو الحرث على ريعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف

والقسط بين المؤمنين

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

٦. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

٧. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

٨. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى
عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 8 Banu 'Amr bin 'Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

٩. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

١٠. وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 10 Banu Al-'Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula,

dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

١١. وان المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل

Pasal 11 Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat

١٢. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

١٣. وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى د سيعة ظلم اة اثم او عدوان

او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka

١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن

Pasal 14 Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman

١٥. وان ذمة الله واحدة يحيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين بعضهم موالى بعض

دون الناس

Pasal 15 Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain

١٦. وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

Pasal 16 Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya

١٧. وان سلم المؤمنین واحدة لا یسالم مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل الله الا علی سواء وعدل بینهم

Pasal 17 Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka

١٨. وان کل غازیة غزت معنا یعقب بعضها بعضا

Pasal 18 Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain

١٩. وان المؤمنین یبئ بعضهم علی بعض بما نال دماءهم فبسبیل الله وان المؤمنین والمتقین علی احسن هدی واقومه

Pasal 19 Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus

٢٠. وانه لا یجیر مشرک ما لا لقربیش ولانفسا ولا یحول دونه علی مؤمن

Pasal 20 Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman

٢١. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بینة فانه قودبه الا ان یرضی ولی المقتول وان المؤمنین علیه كافة ولا یحل لهم الاقیام علیه

Pasal 21 Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya

٢٢. وانه لا يحل لمؤمن أقربما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر
محدثا ولا يؤوية وانه من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة
ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل

Pasal 22 Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan

٢٣. وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى
الله عليه وسلم

Pasal 23 Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW

٢٤. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين

Pasal 24 Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan

٢٥. وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم
وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته

Pasal 25 Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga

٢٦. وان ليهود بنى النجار مثل مال يهود بنى عوف

Pasal 26 Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf

٢٧. وان ليهود بنى الحرث مثل مال يهود بنى عوف

Pasal 27 Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf

٢٨. وان ليهود بنى ساعدة مثل مالميهود بنى عوف

Pasal 28 Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf

٢٩. وان ليهود بنى جشم مثل مالميهود بنى عوف

Pasal 29 Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf

٣٠. وان ليهود بنى الاوس مثل مالميهود بنى عوف

Pasal 30 Kaum Yahudi Banu Al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf

٣١. وان ليهود بنى ثعلبة مثل مالميهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه
واهل بيته

Pasal 31 Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf

٣٢. وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم

Pasal 32 Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf

٣٣. وان لبني الشطيبة مثل مالميهود بنى عوف وان البردون الاثم

Pasal 33 Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf

٣٤. وان موالي ثعلبه كأ نفسهم

Pasal 34 Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa'labah)

٣٥. وان بطانة يهود كأ نفسهم

Pasal 35 Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi)

٣٦. وانه لا يخرج احد منهم الا باذن محمد صلوات الله عليه وسلم وانه لا ينحجر على
ثارجح وانه من فتك فينفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابرهنا

Pasal 36 Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini

٣٧. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب
اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم ياتم امرؤ
بحليفه وان النصر للمظلوم

Pasal 37 Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya

٣٨. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين

Pasal 38 Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan

٣٩. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة

Pasal 39 Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini

٤٠. وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم

Pasal 40 Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat

٤١. وانه لا تجارحرمة الا باذن اهلها

Pasal 41 Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya

٤٢. وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلبالله عليه وسلم وان الله على اتقى ما في هذه الصحيفة وابره

Pasal 42 Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini

٤٣. وانه لاتجارقريش ولا من نصرها

Pasal 43 Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka

٤٤. وان بينهم النصرعلى من دهم يثرب

Pasal 44 Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib

٤٥. واذا دعوا الى صلح يصالحوه (ويلبسونه) فانهم يصالحوه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم عسالمؤمنين الا من حارب في الدين على كل اناس حصتهم من جابنهم الذى قبلهم

Pasal 45 Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya

٤٦. وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالاهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه الصحيفة وان البردون الاثم

Pasal 46 Kaum Yahudi Al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini

٤٧. ولا يكسب كاسب الاعلى نفسه وان الله على اصدق في هذه الصحيفة وابره
وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم واثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة
الا من ظلم واثم وان الله جار لمن بروا تقي ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Pasal 47 Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW

مقتطف من كتاب سيرة النبي ص.م. الجزء الثاني ص ١١٩-١٣٣ لابن هشام (أبي
محمد عبد الملك) المتوفى سنة ٢١٤ هـ

Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214 H.

F. Ciri-Ciri Masyarakat Madani

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai masyarakat madani maka bentuk masyarakat ini tentunya mempunyai daya beda atau mempunyai ciri-ciri yang khusus jika dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi.
2. Mempunyai peradaban yang tinggi (beradab).
3. Mengedepankan kesederajatan (egalitarian) dan transparansi (keterbukaan).

4. Ruang publik yang bebas (*Free public sphere*).

Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

5. Demokratisasi

Menurut Neera Candoke, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara eksipit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi, dalam kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi: 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 2) Pers yang bebas; 3) Supremasi hukum; 4) Perguruan Tinggi; 5) Partai politik

6. Toleransi

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda. Bagaimana Al-Qur'an memandang toleransi ini, Sudarto (2014: 107 -110) menjelaskan mengenai hal ini bahwa Al-Qur'an yang oleh umat Islam diyakini sebagai kitab universal, telah mengisyaratkan bahwa pluralitas atau kemajemukan merupakan suatu kenyataan yang obyektif bagi manusia. Dengan kata lain, kemajemukan atau pluralitas merupakan hukum alam yang tidak dapat ditampik dan dipungkiri keadaannya.

Sementara itu Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, menurut perspektif Al-Qur'an, manusia tidak dipandang berdasarkan agama, ideology, dan etnis, melainkan ketaqwaannya sebagaimana disebutkan dalam

surat Al-Hujuraat ayat 13. "*... sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (Q.S. Al-Hujuraat:13).

Secara tekstual, sesungguhnya Al-Qur'an sangat memuliakan setiap manusia, termasuk orang-orang non-muslim, yang dalam hal ini mencakup toleransi. Al-Qur'an telah menunjukkan sikap toleransi tersebut dengan gagasan universalnya, yakni keselamatan bagi seluruh umat manusia. Hal ini merupakan benih-benih yang dapat ditumbuhkan sebagai basis dari toleransi di tengah pluralism keagamaan. Kalaulah demikian konsep dasar dalam Al-Qur'an, mengapa manusia harus mempertajam perbedaan satu sama lainnya? Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah:48 menegaskan sebagai berikut.

"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu." (QS. Al-Maidah:48)

Dalam ayat lain, Allah swt. juga menjelaskan bahwa Dia mampu membuat semua orang beriman kepada-Nya, namun kita tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. "*Dan, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semuanya orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"* (QS. Yunus:99).

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Yusuf Ali menjelaskan, "Seandainya bukan kehendak Allah swt. untuk memberikan kebebasan yang terbatas seperti yang telah diberikan kepada umat manusia, maka kemahakuasaan-Nya tentu saja akan

mampu menjadikan umat manusia sama dan sejenis, semua manusia akan beriman. Akan tetapi, iman itu sendiri bukanlah merupakan pencapaian pengalaman keagamaan mereka yang sesungguhnya.”

Manusia dikaruniai berbagai kemampuan dan akal. Karunia itulah yang mengharuskan manusia untuk berusaha keras menelusuri dan mencari jalan yang diridloi oleh Allah swt. Oleh karena itu, iman menjadi pencapaian moral, dan penolakan atas iman merupakan sebuah dosa. Jadi, konkritnya, perbedaan merupakan skenario yang telah direncanakan oleh Allah swt. untuk manusia. Dengan akal, manusia dapat bersama-sama menuju titik temu, yang dalam terminology Al-Qur’an disebut dengan “*kalimatun sawaa*” atau kalimat pertemuan pada kebenaran universal. Pada titik ini, manusia tidak akan berselisih.

Sebagai pernyataan penyempurnaan manusia yang sudah beriman, kita tidak boleh bersikap gegabah atau tidak sabar jika harus berhadapan dengan kekufuran. Kita juga harus menjaga diri dari godaan untuk memaksakan iman kepada orang lain, yakni memaksakan penerimaan terhadap orang lain menggunakan kekerasan fisik atau bentuk tekanan lainnya. Sebab, iman yang dipaksakan tidak akan melahirkan iman yang sesungguhnya. Manusia harus terus berusaha keras meningkatkan pencapaian spiritualnya.

Sebagai umat yang hidup dan tinggal di masyarakat yang majemuk, marilah kita jadikan sejarah Islam yang pernah tampil secara inklusif dan egaliter sebagai acuan dan *i’tibar*, yaitu ketika zaman kejayaan di Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad saw., yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah. Di masa itu, umat Islam dan umat lainnya bisa bekerja sama dalam satu atap, menjalin hubungan baik antara guru dan murid, dan menjadi rekan bisnis yang sama-sama menguntungkan tanpa harus melebur iman dalam satu agama. Dengan demikian, bangsa Indonesia yang hingga detik ini belum dapat membebaskan diri dari kungkungan krisis

multidimensional harus segera bangkit menjadi Indonesia yang penuh warna namun bertujuan yang sama.

Untuk mencapai gagasan yang ideal tersebut, ada beberapa syarat yang harus dikembangkan. *Pertama*, melihat realitas kemajemukan dengan kacamata rasional dan tidak mengedepankan persoalan secara kasuistik.

Kedua, melihat persoalan yang disebabkan oleh kemajemukan secara objektif dan tidak menggunakan analogi generalisasi, karena tidak satupun agama yang mengajarkan kejelekan.

Ketiga, dalam melihat persoalan kemajemukan, hendaknya kita lebih mengedepankan semangat kemanusiaan, bukan pendekatan teologis. Sebab, masalah teologi merupakan keyakinan masing-masing kelompok yang tidak bisa ditawar-tawar dan diperjualbelikan. Dengan demikian, akan tercipta kearifan di tengah kemajemukan dalam rangka membangun masyarakat baru yang berwawasan kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran universal.

7. Pluralisme

Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan.

8. Keadilan Sosial (*Social justice*)

Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

9. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga.

10. Supremasi hukum

Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan, keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum.

Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri dan demokratis, masyarakat madani lahir dari proses penyemaian demokrasi, hubungan keduanya ibarat ikan dengan air, bab ini membahas tentang masyarakat madani yang umumnya dikenal dengan istilah masyarakat sipil (*civil society*), pengertiannya, ciri-cirinya, sejarah pemikiran, karakter dan wacana masyarakat sipil di Barat dan di Indonesia serta unsur-unsur di dalamnya. Diakhir pembahasan ini, diharapkan kita semua dapat memahami dan menyimpulkan konsep masyarakat madani, nilai-nilainya, perkembangannya dan semangat dan nilai masyarakat madani dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Masyarakat Madani: Istilah madani secara umum dapat diartikan sebagai " adab atau beradab " Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, untuk dapat menata masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, untuk dapat mencapai masyarakat seperti itu, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, kontrol masyarakat dalam jalannya proses pemerintahan, serta keterlibatan dan kemerdekaan masyarakat dalam memilih pimpinannya. Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat, inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Lebih lanjut ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang pengertian masyarakat madani yaitu:

1. Zbigniew Rau Menurutnya, masyarakat madani adalah sebuah ruang dalam masyarakat yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara, yang diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya, yakni individualis, pasia, dan pluralisme.
2. Han Sung-Jo Menurutnya, masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen yang bersama-sama mengakui norma-norma budaya yang menjadi identitas solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya terdapat kelompok inti dalam masyarakat madani.
3. Anwar Ibrahim Menurutnya, masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat.

Secara Khusus M. A.S. Hikan menjelaskan ciri-ciri pokok masyarakat madani di Indonesia antara lain:

1. Kesukarelaan
2. Keswasembadaan
3. Kemandirian yang tinggi terhadap negara.
4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.

Masyarakat Madani merupakan cita-cita bersama Bangsa dan Negara yang sadar akan pentingnya suatu keterikatan antar komponen pendukungnya dalam terciptanya Bangsa dan Negara yang maju dan mandiri. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, masyarakat madani sejatinya sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup sebagai tonggak pembangunan yang berkelanjutan (yang berwawasan lingkungan) yang menyejahterakan kehidupan antargenerasi, disamping upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing, dan kesiapan menghadapi kecenderungan globalisasi.

Dalam contoh kasus yang kami angkat adalah mengenai kasus illegal logging di Indonesia yang semakin marak dieksploitasi oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebenarnya kasus illegal logging bukan kasus baru dalam sejarah kelam rusaknya lingkungan di negeri ini. Awal mula terjadinya kasus illegal logging adalah ketika pada masa penjajahan kolonial dimana kayu dijadikan komoditas penting dalam mencukupi segala kebutuhan pihak-pihak tertentu yang terkait pada masa itu untuk menjadikan kayu sebagai salah satu produk pemenuh kebutuhan yang berharga. Melihat kondisi tersebut, beberapa kalangan yang belum mempunyai kesadaran lingkungan yang tinggi kemudian mulai memanfaatkan keadaan atas kebutuhan akan tersedianya kayu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dengan cara-cara melakukan penebangan yang tidak terkendali dan tidak sesuai standar baku, diluar kemampuan sumberdaya hutan tersebut untuk tumbuh dan berkembang kembali. Inilah yang menjadi awal terjadinya kasus *illegal logging* di Indonesia.

Melihat semakin menipisnya pasokan sumberdaya hutan tersebut, membuat para ahli dan pejabat pemerintahan pada masa itu menetapkan regulasi-regulasi yang mengatur pemafaatan, pengelolaan, distribusi dan pelestarian sumberdaya hutan khususnya kayu di Indonesia demi menjaga agar pasokan kayu tetap terkontrol dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka akan sumberdaya hutan tersebut. Dengan diterapkannya sistem regulasi yang ketat pada masa tersebut, mengakibatkan jumlah penebangan hutan untuk diambil commodities kayunya semakin terkontrol dan kasus *illegal logging* cenderung menurun meskipun tetap terjadi kasus penebangan liar skala dalam kecil.

Tetapi selepas masa penjajahan tersebut, pemanfaatan sumberdaya kayu hutan di Indonesia mulai berangsur-angsur naik kembali akibat tidak diterapkannya lagi regulasi-regulasi yang bersifat ketat warisan masa penjajahan tersebut, demi memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri serta permintaan akan kayu hutan dan produk-produk turunan. Hal tersebut dilakukan oleh

pemerintah dalam usahanya menaikkan devisa negara yang baru saja merdeka tersebut. Tetapi meskipun demikian, pemerintah pada masa itu (hingga saat ini) masih berupaya membuat dan menerapkan peraturan-peraturan pengganti yang sifatnya dirasakan oleh beberapa kalangan baik masyarakat, akademisi, para ahli dan pengamat kebijakan tidak tegas dan tidak mampu memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan lingkungan tersebut. Dan pada akhirnya kasus yang sama kembali menimpa bangsa ini. Permintaan akan kebutuhan kayu yang besar menimbulkan keinginan beberapa pihak memanfaatkan dan menggunakan cara-cara illegal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam usaha mendapatkan keuntungan-keuntungan semata dan melupakan dampak ekologis yang terjadi akibat penebangan dan pemanfaatan hasil hutan khususnya kayu yang tidak terkendali dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Dari gambaran dan contoh kasus yang telah dipaparkan, terlihat betapa lemahnya mekanisme peraturan serta kesadaran semua pihak akan isu lingkungan hidup khususnya mengenai *illegal logging* di Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi seringkali bagaikan lingkaran setan yang saling berputar-putar dalam konteks keterkaitan yang saling berhubungan. Di satu sisi pemerintah sebagai pengambil kebijakan menginginkan terciptanya suatu kondisi lingkungan hutan yang lestari (*sustainable forest*), tetapi di lain sisi pemerintah harus memenuhi permintaan akan ketersediaan kayu dalam usaha menaikkan pendapatan negara. Dan hal ini makin menjadi dilema ketika pemerintah kesulitan dalam mengawasi dan menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang tegas dalam rangka menciptakan suatu manajemen hutan lestari (*sustainable forest management*) pada pihak-pihak yang terkait khususnya bagi para pelaku *illegal logging*. Dan, diluar komponen pemerintahan pun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan pun juga masih rendah, yang memperparah kondisi bangsa ini.

Dalam hal inilah peran Masyarakat Madani sangat dibutuhkan. Kita menyadari bahwa Masyarakat Madani identik dengan

masyarakat yang sadar dan peduli akan suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan dalam cakupan antargenerasi, yang dalam hal ini difokuskan mengenai lingkungan hidup. Maka untuk itu, masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya arti kelestarian lingkungan diharapkan mampu menjadi salah satu faktor penggerak dan turut berpartisipasi mewujudkan transformasi bangsa menuju masyarakat yang kita dambakan tersebut. Dan kita bisa melihat usaha-usaha menuju ke arah tersebut semakin terbuka lebar. Tapi itu semua harus dilandasi juga dengan kesadaran semua komponen bangsa, beberapa diantaranya adalah komitmen dalam menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tanpa pandang bulu, turut berperan aktif dalam mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dirasa perlu untuk dikritisi tanpa ada suatu niatan buruk, serta selalu mendorong berbagai pihak untuk turut berperan serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan kita semua.

Sesungguhnya kehadiran Masyarakat Madani sebagai sebuah kenyataan, sebenarnya telah menandai meledaknya semacam “revolusi intelektual”, yaitu meningkatnya kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban secara independen. Dan sebenarnya model masyarakat dengan otonomi yang relatif kuat itulah yang dapat menjamin berkembangnya demokrasi, walaupun Masyarakat Madani tersebut bukanlah suatu syarat mutlak untuk membangun demokrasi. Dengan kata lain, “ Masyarakat Madani Ada Tanpa Negara, Negara Anarkis Tanpa Masyarakat Madani, Otoriter atau Totaliter...”

Di samping ciri-ciri, ada pula beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya:

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.

3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Tumbuh kembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
6. Meluasnya kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga individu
7. individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
8. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
9. Ber-Tuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial.
10. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil.
11. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya.
12. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut.
13. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.
14. Berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia.
15. Berakhlak mulia.

Dari beberapa karakter tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, *taken for granted*. Masyarakat madani adalah konsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya pemerintahan demokratis (*democratic governance*) yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan *democratic civilian* (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai *civil security; civil responsibility dan civil resilience*).

Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani sbb:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.

5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antarmereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Tanpa prasyarat tersebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat "sipilisme" yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat Du Bois dan Milley, 1992).

Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa:

1. Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsipnasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial.
2. Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan.

Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya.

Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), "...penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia." Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.

3. Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Konsep Masyarakat Madani semula dimunculkan sebagai jawaban atas usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat Multikultural. Multikultural merupakan produk dari proses demokratisasi di negeri ini yang sedang berlangsung terus menerus yang kemudian memunculkan ide pluralistik dan implikasinya kesetaraan hak individual. Perlu kita pahami, perbincangan seputar Masyarakat Madani sudah ada sejak tahun 1990-an, akan tetapi sampai saat ini, masyarakat Madani lebih diterjemahkan sebagai masyarakat sipil oleh beberapa pakar Sosiologi. Untuk lebih jelasnya, kita perlu menganalisa secara historis kemunculan masyarakat Madani dan kemunculan istilah masyarakat Sipil, agar lebih akurat membahas tentang

peran agama dalam membangun masyarakat bangsa. Masyarakat Sipil adalah terjemahan dari istilah Inggris *Civil Society* yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai masyarakat Madani. Gagasan masyarakat sipil merupakan tujuan utama dalam membongkar masyarakat Marxis. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai daerah kepentingan diri individual dan pemenuhan maksud-maksud pribadi secara bebas, dan merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (dalam konteks tatanan sosial) atau berbeda dari negara. Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara moral netral dan instrumental (lih. Gellner:1996).

Seperti Durkheim, pusat perhatian Ferguson adalah pembagian kerja dalam masyarakat, dia melihat bahwa konsekuensi sosio-politis dari pembagian kerja jauh lebih penting dibanding konsekuensi ekonominya. Ferguson melupakan kemakmuran sebagai landasan berpartisipasi. Dia juga tidak mempertimbangkan peranan agama ketika menguraikan saling mempengaruhi antara dua partisipan tersebut (masyarakat komersial dan masyarakat perang), padahal dia memasukan kebajikan di dalam konsep masyarakatnya. Masyarakat sipil dalam pengertian yang lebih sempit ialah bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik dalam konteks tatanan sosial di mana pemisahan seperti ini telah terjadi dan mungkin.

Selanjutnya, sebagai pembanding Ferguson mengambil masyarakat feodal, dimana perbandingan di antara keduanya adalah, pada masyarakat feodal strata politik dan ekonomi jelas terlihat bahkan dijamin secara hukum dan ritual, tidak ada pemisahan hanya ada satu tatanan sosial, politik dan ekonomi yang saling memperkuat satu sama lain. Posisi seperti ini tidak mungkin lagi terjadi pada masyarakat komersial. Kekhawatiran Ferguson

selanjutnya adalah apabila masyarakat perang digantikan dengan masyarakat komersial, maka negara menjadi lemah dari serangan musuh. Secara tidak disadari Ferguson menggemakan ahli teori peradaban, yaitu Ibnu Khaldun yang mengemukakan spesialisasi mengatomisasi mereka dan menghalangi kesatupaduan yang merupakan syarat bagi efektifnya politik dan militer. Di dalam masyarakat menurut Ibnu Khaldun, militer masih memiliki peran dan berfungsi sebagai penjaga keamanan negara, maka tidak pernah ada dan tidak mungkin ada bagi dunianya, masyarakat sipil.

Pada kenyataannya, apabila kita konsekuen dengan menggunakan masyarakat Madani sebagai padanan dari Masyarakat Sipil, maka secara historis kita lebih mudah secara langsung merefer kepada "masyarakat"nya Ibnu Khaldun. Deskripsi masyarakatnya justru banyak mengandung muatan-muatan moral-spiritual dan menggunakan agama sebagai landasan analisisnya. Pada kenyataannya masyarakat sipil tidak sama dengan masyarakat Madani. Masyarakat Madani merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Syed Farid Alatas seorang sosiolog sepakat dengan Syed M. Al Naquib Al Attas (berbeda dengan para sosiolog umumnya), menyatakan bahwa faham masyarakat Madani tidak sama dengan faham masyarakat Sipil. Istilah *Madani*, *Madinah* (kota) dan *Din* (diterjemahkan sebagai agama) semuanya didasarkan dari akar kata *dayn*. Kenyataan bahwa nama kota Yathrib berubah menjadi Madinah bermakna di sanalah *din* berlaku (lih. Alatas, 2001:7). Secara historispun masyarakat Sipil dan masyarakat Madani tidak memiliki hubungan sama sekali. Masyarakat Madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi jahiliyyah masyarakat Arab Quraisy di Mekkah. Beliau memperjuangkan kedaulatan, agar ummatnya leluasa menjalankan syari'at agama di bawah suatu perlindungan hukum.

Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang eksklusif dan dipandang sebagai dokumen usang. Ia merupakan konsep yang

senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Mengingat landasan dan motivasi utama dalam masyarakat madani adalah Al-Quran.

Meski Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung bentuk masyarakat yang ideal namun tetap memberikan arahan atau petunjuk mengenai prinsip-prinsip dasar dan pilar-pilar yang terkandung dalam sebuah masyarakat yang baik. Secara faktual, sebagai cerminan masyarakat yang ideal kita dapat meneladani perjuangan Rasulullah mendirikan dan menumbuhkembangkan konsep masyarakat madani di Madinah.

Prinsip terciptanya masyarakat madani bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad Saw. beserta para pengikutnya dari Makah ke Yatsrib. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sebuah sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk masyarakat yang beradab (*madaniyyah*).

Selang dua tahun pascahijrah atau tepatnya 624 M, setelah Rasulullah mempelajari karakteristik dan struktur masyarakat di Madinah yang cukup plural, beliau kemudian melakukan beberapa perubahan sosial. Salah satu di antaranya adalah mengikat perjanjian solidaritas untuk membangun dan mempertahankan sistem sosial yang baru. Sebuah ikatan perjanjian antara berbagai suku, ras, dan etnis seperti Bani Qainuqa, Bani Auf, Bani al-Najjar dan lainnya yang beragam saat itu, juga termasuk Yahudi dan Nasrani. Dalam pandangan saya, setidaknya ada tiga karakteristik dasar dalam masyarakat madani. Pertama, diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi dalam pandangan Alquran. Pluralitas juga pada dasarnya merupakan ketentuan Allah swt. (*sunnatullah*), sebagaimana tertuang dalam Alquran surat Al-Hujurat (49) ayat 13.

Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan. Dalam ajaran Islam, pluralisme merupakan

karunia Allah yang bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis. Ia (pluralitas) juga merupakan sumber dan motivator terwujudnya vividitas kreativitas (penggambaran yang hidup) yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan (Muhammad Imarah:1999).

Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta manakala umat Islam memiliki sikap inklusif dan mempunyai kemampuan (*ability*) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan identitas sejati atas parameter-parameter autentik agama tetap terjaga.

Kedua, adalah tingginya sikap toleransi (*tasamuh*). Baik terhadap saudara sesama Muslim maupun terhadap saudara non-Muslim. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa tujuan Islam tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama. Namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan seiring dan saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana hal itu pernah dicontohkan Rasulullah saw. di Madinah. Setidaknya landasan normatif dari sikap toleransi dapat kita tilik dalam Firman Allah yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 108.

Ketiga, adalah tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih dikenal dengan istilah musyawarah. Terlepas dari perdebatan mengenai perbedaan konsep demokrasi dengan musyawarah, saya memandang dalam arti membatasi hanya pada wilayah terminologi saja, tidak lebih. Mengingat di dalam Alquran juga terdapat nilai-nilai demokrasi (surat As-Syura:38, surat Al-Mujadilah:11).

Ketiga prinsip dasar setidaknya menjadi refleksi bagi kita yang menginginkan terwujudnya sebuah tatanan sosial masyarakat madani dalam konteks hari ini. Paling tidak hal tersebut menjadi modal dasar untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.

G. Masyarakat Madani di Indonesia

Paradigma dan praktik Indonesia memiliki tradisi kuat masyarakat madani (*civil society*) bahkan jauh sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan, selain berperan sebagai organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis Islam, seperti Serikat Islam (SI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen *civil society* yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia yaitu yang pertama, pandangan integrasi nasional dan politik.

Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi, dalam tataran ini, pembangunan institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi. Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi, pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi, berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah.

Bersandar pada tiga paradigma di atas, pengembangan demokrasi dan masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan tersebut, sebaliknya untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan

negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma, setidaknya tiga paradigma ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi sekarang melalui cara:

1. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri secara politik dan ekonomi, dengan pandangan ini, negara harus menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan ekonomi nasional, tantangan pasar bebas dan demokrasi global mengharuskan negara mengurangi perannya sebagai aktor dominan dalam proses pengembangan masyarakat madani yang tangguh.
2. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, sikap pemerintah untuk tidak mencampuri atau mempengaruhi putusan hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan kemandirian lembaga demokrasi.
3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negara secara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui keterlibatan semua unsur masyarakat melalui prinsip pendidikan demokratis, yakni pendidikan dari, oleh dan untuk warga negara.

H. Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani (Civil Society)

Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial, gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang didasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu negara (*state*), perusahaan atau pasar, dan masyarakat sipil. Berdasarkan pembagian ini, maka terdapat gerakan politik yang berada di ranah negara dan gerakan ekonomi. Pembagian ini telah dibahas juga oleh Sidney Tarrow yang melihat *political parties*

berkaitan dengan gerakan politik, yakni sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh partai politik melalui pemilu. Gerakan ekonomi berkaitan dengan *lobby* dimana terdapat upaya melakukan perubahan kebijakan publik tanpa harus menduduki jabatan politik tersebut. Berdasarkan pemetaan di atas, secara empiris ketiganya dapat saling bersinergi, pada ranah negara dapat menjadi beberapa gerakan politik yang dilakukan oleh parpol dalam pemilu yang mengusung masalah yang juga didukung oleh gerakan sosial. Sebagai contoh gerakan sosial oleh masyarakat sipil seperti mereka yang pro atau anti Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) mempunyai kaitan dengan kelompok atau parpol di ranah politik maupun kelompok bisnis pada sisi yang lain. Organisasi Non Pemerintah dalam Ranah Masyarakat Madani (*Civil Society*) Istilah Organisasi Non Pemerintah adalah terjemahan NGO (*Non-Governmental Organization*). Yang telah lama dikenal dalam pergaulan internasional, istilah ini merujuk pada organisasi non negara yang mempunyai kaitan dengan organisasi non pemerintah, istilah ini perlahan-lahan menyebar dan dipakai oleh komunitas internasional. Dalam arti umum, pengertian organisasi non pemerintah mencakup semua organisasi masyarakat yang berada diluar struktur dan jalur formal pemerintah, dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah, karena cakupan pengertiannya yang luas, penggunaan istilah organisasi non pemerintah sering membingungkan dan juga bisa mengaburkan pengertian organisasi atau kelompok masyarakat yang semata-mata bergerak dalam rangka pembangunan sosial-ekonomi masyarakat tingkat bawah, istilah organisasi non pemerintah bagi mereka yang tidak setuju memakai istilah ini berpotensi memunculkan pengertian tidak menguntungkan. Pemerintah khususnya menolak menggunakan istilah itu dengan alasan makna organisasi non pemerintah terkesan "memperhadapkan" serta seolah-olah "oposan pemerintah, pengertian organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang bersifat non pemerintah, di dalamnya bisa termasuk serikat kerja, kaum buruh, himpunan para petani atau nelayan, rumah tangga, rukun warga, yayasan sosial, lembaga

keagamaan, klub olahraga, perkumpulan mahasiswa, organisasi profesi, partai politik, atau pun asosiasi bisnis swasta. (<https://goo.gl/efW8Ef>)

Perwujudan masyarakat madani yang demokratis di Indonesia ini dimulai pada awal tahun 1998. Peristiwa ini merupakan perwujudan dari semangat Reformasi yang dipekirakan oleh mahasiswa Indonesia pada waktu itu.

Kata Reformasi menjadi kata kunci terhadap proses perubahan yang terjadi pada sebuah kondisi yang stagnan, cenderung negatif dan memiliki pola yang menunjukkan gabungan antara keinginan dan kondisi yang dialami. Reformasi akan menjadi sebuah alternatif yang sangat penting terhadap proses perbaikan melalui sebuah perubahan, yang terjadi secara perlahan-lahan ataupun cepat dan tak terbendung, secara evolusi ataupun revolusi, namun kecenderungan reformasi identik dengan perubahan yang cepat namun tepat dan terukur.

Untuk menentukan sebuah tujuan reformasi tentunya memerlukan sebuah rencana dan langkah-langkah yang strategis dan memiliki dampak terhadap perubahan yang diharapkan, bila reformasi itu dilakukan pada tataran sosial tentunya dampak sosial juga diharapkan akan terjadi dan berkesinambungan dengan dampak terhadap kondisi politik, budaya dan ekonomi secara umum. Reformasi bukan merupakan gerakan chaos yang liar tak terkendali dan tanpa rencana serta tidak memberikan dampak positif terhadap kondisi masa kini, justru sebaliknya merupakan sebuah gerakan yang terencana, sistematis dan terukur serta memiliki parameter yang jelas terhadap perubahan yang akan dilakukan dan ukuran yang jelas terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Masyarakat Madani merupakan cita-cita bersama Bangsa dan Negara yang sadar akan pentingnya suatu keterikatan antar komponen pendukungnya dalam terciptanya Bangsa dan Negara yang maju dan mandiri. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, masyarakat madani sejatinya sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup sebagai tonggak pembangunan yang berkelanjutan (yang

berwawasan lingkungan) yang menyejahterakan kehidupan antargenerasi, disamping upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing, dan kesiapan menghadapi kecenderungan globalisasi.

Dalam hal inilah peran Masyarakat Madani sangat dibutuhkan. Kita menyadari bahwa Masyarakat Madani identik dengan masyarakat yang sadar dan peduli akan suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan dalam cakupan antargenerasi, yang dalam hal ini difokuskan mengenai lingkungan hidup. Maka untuk itu, masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya arti kelestarian lingkungan diharapkan mampu menjadi salah satu faktor penggerak dan turut berpartisipasi mewujudkan transformasi bangsa menuju masyarakat yang kita dambakan tersebut. Dan kita bisa melihat usaha-usaha menuju ke arah tersebut semakin terbuka lebar. Tapi itu semua harus dilandasi juga dengan kesadaran semua komponen bangsa, beberapa diantaranya adalah komitmen dalam menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tanpa pandang bulu, turut berperan aktif dalam mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dirasa perlu untuk dikritisi tanpa ada suatu niatan buruk, serta selalu mendorong berbagai pihak untuk turut berperan serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan kita semua.

Sesungguhnya kehadiran Masyarakat Madani sebagai sebuah kenyataan, sebenarnya telah menandai meledaknya semacam "revolusi intelektual", yaitu meningkatnya kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban secara independen. Dan sebenarnya model masyarakat dengan otonomi yang relatif kuat itulah yang dapat menjamin berkembangnya demokrasi, walaupun Masyarakat Madani tersebut bukanlah suatu syarat mutlak untuk membangun demokrasi.

I. Masyarakat Madani di Indonesia: Paradigma dan Praktik

Indonesia memiliki tradisi kuat *civil society* (masyarakat madani) bahkan jauh sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah

berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam dalam perjuangan merebut kemerdekaan, selain berperan sebagai organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis Islam, seperti Jam'iyatul Khair (17 Juli 1905) di Jakarta, Serikat Islam yang semula bernama Sarikat Dagang Islam (1905) di Solo yang kemudian berubah menjadi Sarikat Islam (SI), 1912, Muhammadiyah (18 Nopember 1912) di Yogyakarta, Nadlatul Ulama (NU), 31 Januari 1926 di Surabaya, Persatuan Islam (Persis), 12 September 1923 di Bandung dan lain-lain telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen *civil society* yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia:

Pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi, dalam tataran ini, pembangunan institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi.

Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi, pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi, berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah.

Bersandar pada tiga paradigma diatas, pengembangan demokrasi dan masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan tersebut, sebaliknya untuk

mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma, setidaknya tiga paradigma ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi sekarang melalui cara:

1. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri secara politik dan ekonomi, dengan pandangan ini, negara harus menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan ekonomi nasional, tantangan pasar bebas dan demokrasi global mengharuskan negara mengurangi perannya sebagai aktor dominan dalam proses pengembangan masyarakat madani yang tangguh.
2. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, sikap pemerintah untuk tidak mencampuri atau mempengaruhi putusan hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan kemandirian lembaga demokrasi.
3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negara secara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui keterlibatan semua unsur masyarakat melalui prinsip pendidikan demokratis, yakni pendidikan dari, oleh dan untuk warga negara.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berhubungan dengan wacana demokratis dalam buku teks Bahasa Indonesia berdasarkan Kurikulum 2004 yang dipergunakan untuk pembelajaran di SMA kelas X (Fahrurroji, 2021) dengan mengajukan 17 pertanyaan dan dalam penelitian ini wacana demokratis menempati pertanyaan urutan yang keempat setelah tiga pertanyaan sebelumnya. Adapun gambaran hasilnya adalah sebagai berikut.

Aspek keempat adalah tentang wacana kritis yang terdiri atas 17 pertanyaan dengan kode D. Pertanyaan nomor 1 adalah mengenai

apakah tema 'demokrasi' ada sebagai wacana dalam buku ini? Jawaban tentang hal ini adalah ada dengan kategori cukup (3,58). Demikian juga pertanyaan nomor 2 yang menanyakan tentang tema 'hak azazi manusia' sebagai wacana. Pertanyaan ini memperoleh jawaban cukup (3,17). Tidak jauh berbeda adalah pertanyaan nomor 3 yang mengupas masalah pemahaman 'demokrasi dan hak azazi manusia yang diartikan sebagai kebebasan bagi setiap individu dengan memperoleh jawaban cukup (3,25). Tentang adanya pengaruh reformasi dalam wacana sebagaimana yang terdapat pada pertanyaan nomor 4 memperoleh jawaban cukup (3,25). Jadi, pertanyaan nomor 1 – 4 dapat diartikan bahwa tema yang berhubungan dengan demokrasi dan hak azazi manusia memang ada dan memperoleh jawaban cukup (>3,00).

Pertanyaan nomor 5 yang berhubungan dengan penyebutan tokoh secara berlebihan mendapat jawaban cukup (3,25), demikian juga mengenai nama atau tokoh didominasi oleh suku/etnis tertentu mendapat jawaban cukup (3,42) yang ditanyakan pada item 6. Tidak berbeda jauh dengan ini adalah pertanyaan mengenai adanya pengaruh yang dominan dari budaya tertentu yang ditanyakan pada item 7 mendapat jawaban cukup (3,67), demikian juga tentang pengaruh yang dominan dari agama tertentu mendapat jawaban cukup (3,08) sebagaimana pertanyaan yang terdapat pada item 8.

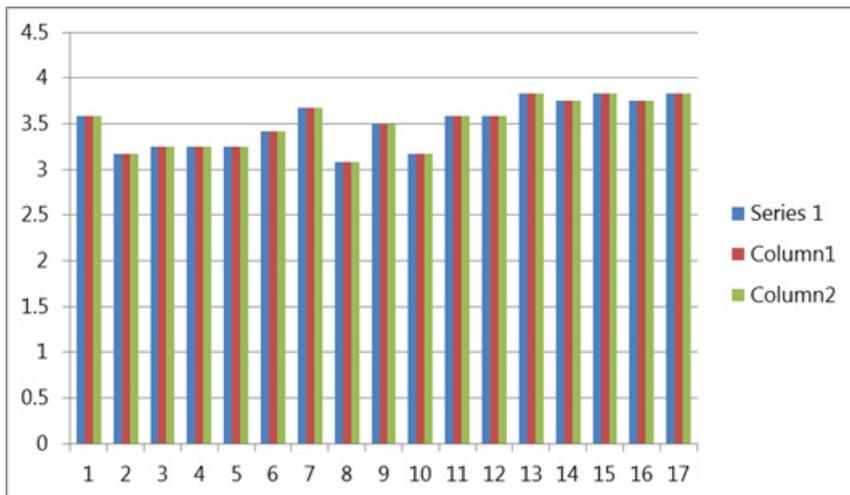
Dua pertanyaan berikutnya adalah 9 dan 10 yang berhubungan dengan ilustrasi yang menggambarkan tentang ketokohan dan budaya/etnik tertentu masing-masing mendapat jawaban cukup (3,50 dan 3,17). Tentang gender ditanyakan pada item 11 yang memperoleh jawaban cukup (3,58). Selanjutnya, adalah tentang kalimat yang menunjukkan ketidaksetaraan gender sebagaimana pertanyaan nomor 12 hasilnya adalah cukup. Tentang penggunaan gambar lebih banyak mana antara pria dan wanita, juga memperoleh jawaban cukup (3,58).

Pertanyaan nomor 14 – 16 adalah pertanyaan yang berhubungan dengan nama, tempat, dan kegiatan yang didominasi oleh agama, ras/etnis/kelompok tertentu, kekuatan/kekuasaan

tertentu jawabannya adalah cukup (3,75; 3,83; 3,75). Demikian pula pertanyaan nomor 17 yang bertanya mengenai tema yang dibahas lebih rinci dibandingkan tema lainnya memperoleh jawaban cukup (3,83). Secara keseluruhan pada bagian 4 ini yang menanyakan tentang wacana kritis yang berhubungan dengan demokrasi memperoleh nilai rata-rata cukup (3,50).

Hasil ini menunjukkan kepada kita bahwa para siswa SMA yang menjadi obyek penelitian ini telah mengakui bahwa dalam buku teks Pelajaran Bahasa Indonesia tersebut ada pembelajaran wacana yang berhubungan dengan demokrasi dan para siswa faham terhadap wacana yang ada pada buku tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian yang mencapai nilai 3,50 yang berarti menunjukkan tingkat keterfahaman yang cukup tentang wacana demokrasi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram 1
HASIL PENEILAIAN BUKU TEKS KELAS X KURIKULUM 2004



J. Masyarakat Madani dan Wawasan Kebangsaan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa masyarakat madani adalah suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi peradaban dan memiliki ciri-ciri; kesukarelaan, keswasembadaan,

kemandirian yang tinggi terhadap Negara, dan keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Bagaimana halnya dengan wawasan kebangsaan. Indonesia adalah suatu masyarakat yang secara sukarela dan telah menyatukan dirinya menjadi suatu bangsa yang merdeka. Penyatuan seluruh komponen masyarakat yang telah menjadi satu yang bernama bangsa Indonesia.

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu "Wawasan" dan "Kebangsaan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah "wawasan" berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).

"Kebangsaan" berasal dari kata "bangsa" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan "kebangsaan" mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum colonial terus menggunakan politik "*divide et impera*". Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat

perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata.

Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan.

Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia". Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu **Wawasan Kebangsaan**.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertindak laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006). Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan

berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan POLEKSOSBUD dan HANKAM.

Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan.

Dalam zaman Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh Budi Utomo menjadi tonggak terjadinya proses Bhineka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo telah mendorong terjadinya gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik di pandang dari tujuan maupun dasarnya.

Dengan Sumpah Pemuda, gerakan Kebangkitan Nasional, khususnya kaum pemuda berusaha memadukan kebhinnekaan dengan ketunggalikaan. Kemajemukan, keanekaragaman seperti suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap ada dan dihormati.

Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu, kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tidak dipergunakannya bahasa Jawa misalnya, sebagai bahasa nasional tetapi justru bahasa melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia.

Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memporak- porandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukkan kepada negara dan bangsa.

Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal, yaitu: *liberty, equality, fraternity*, yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing-masing, sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa.

Wawasan kebangsaan Indonesia menjadikan bangsa yang tidak dapat mengisolasi diri dari bangsa lain yang menjiwai semangat bangsa bahari yang terimplementasikan menjadi wawasan nusantara bahwa wilayah laut Indonesia adalah bagian dari wilayah negara kepulauan yang diakui dunia. Wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang menyatakan negara Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari semua aspek sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan semua dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional yang mencakup kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).

Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi/pemecahan negara kesatuan, mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah timbulnya pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat terwujud pemerintah pusat yang bersih dan akuntabel dan pemerintah daerah yang tumbuh dan

berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah dengan terwujudnya kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan, sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik dengan memberi contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab (Sumitro dikutip oleh Suhady dan Sinaga, 2006).

Dalam pemikiran Islam Indonesia, wacana yang barangkali tak pernah sepi diperbincangkan oleh kalangan cendekiawan maupun politisi adalah persoalan hubungan agama, Negara, dan masyarakat. Frekuensi dan bobot pemberitaannya pun cukup tinggi dan sepertinya selalu aktual untuk dicermati. Sebab, selain selalu bersentuhan dengan isu sentral kebangsaan, agama (khususnya Islam) juga tidak bisa jauh-jauh dari polemik dan implikasi politik yang ditimbulkan.

Terkait dengan hal ini, Al-Qurán memberikan porsi yang cukup besar untuk merekam pasang surutnya hubungan antara masyarakat kebangsaan dan agama. Ini dapat dilihat dari peraturannya tentang umat-umat terdahulu, tentang standar pokok kebenaran beagama, juga dalam hal pengesaan terhadap Tuhan. Sikap pengesaan terhadap Tuhan itu menjadi standar hakiki dari eksistensi beragama yang paling universal, yang tidak mengenal batas ruang dan waktu, lembaga keumatan maupun konsep-konsep lainnya.

Menyadari akan hal itu, para pendidiri bangsa (*founding father*) secara sadar meletakkan standar universal pada urutan pertama sila

Pancasila sebagai dasar Negara. Ini sangat baik untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama terkait dengan hubungan antaragama dan antarmasyarakat secara umum. Dengan demikian, sesungguhnya kita telah memiliki landasan bermasyarakat yang benar dan obyektif. Dalam konteks ini An-Na'im (2007) menjelaskan, "Jika mengikuti analisis bahwa sekulerisme tidak berarti peminggiran Islam dari kehidupan publik, maka semestinya tidak harus memilih antara Negara Islam, tetapi juga tidak menolak syariat sepanjang melalui perdebatan dalam bingkai *public reason*"

Dalam mencermati dinamika masyarakat kebangsaan, kita perlu menghindari kerancuan konseptual antara pengertian bangsa (*nation*) yang menekankan pada sisi sosial politik dan ideologi, dengan konsep masyarakat (*society*) yang mengacu pada pondasi sosial. Begitu pula, kita perlu memahami konsep Negara (*state*) yang mengacu pada kekuasaan (politik) dengan konsep negeri (*country*) yang merujuk pada pendekatan konsep geografis.

Sebagai masyarakat plural dan majemuk, kita telah sepakat untuk menerima kebangsaan (*nation*) yang dikonsepsikan untuk melegitimasi eksistensi negara nasional (*national state*). Konsep ini telah menjadi komitmen dan cita-cita bersama yang hendak merangkum dan mempersatukan segala sumber daya bagi keutuhan bangsa. Pengertian ini menunjukkan bahwa setiap komponen bangsa secara terintegrasi berusaha bersama-sama untuk mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan.

Oleh karena itu, konsepsi kebangsaan seperti ini harus dipertahankan dan dilestarikan. Dengan kata lain, setiap komponen bangsa harus menghindari penggunaan kata "kebangsaan" untuk sekedar menghalalkan kepentingan-kepentingan tertentu yang diproyeksikan untuk misi pribadi maupun kelompoknya, yang kemudian dengan semena-mena mengklaim kelompok agama, atau etnis lain sebagai pihak yang di luar orbit kebangsaan.

Zainudin Abidin Bagir (2011) menyebutkan bahwa kenyataan sosiologis historis membuktikan bahwa kita tidak mungkin untuk menghindari kemajemukan setiap komponen bangsa yang

secara alami terkait dengan garis-garis warisan primordial, baik berdasarkan suku, maupun agama dan budaya. Dengan kata lain, ikatan primordial masih tetap dibutuhkan agar bangsa Indonesia tidak tercerabut dari akar sosial budayanya. Namun, bersamaan dengan itu, dalam membangun Negara kebangsaan (*nation state*), kita menolak primordialisme sebagai paham bagi perjuangan untuk kekuasaan maupun politik dan ideologi.

Problem paradoksi semacam ini menuntut visi kenegarawanan yang tinggi, baik dari sisi eksekutif maupun politisi untuk merangkum kembali kebhinnekaan. Dalam arti, bagaimana memberi muatan kebangsaan yang secara fleksibel dapat memberdayakan potensi kemajemukan sebagai modal social (*social capital*) bagi bangsa ini. Selain itu, para eksekutif dan elit politik juga harus menawarkan visi yang dapat mengatasi semua kemungkinan ketegangan dan perang yang disebabkan oleh heterogenitas etnis maupun pluralism budaya. Dengan kata lain, Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi penanda identitas bangsa Indonesia, harus terus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia tidak boleh dipandang sebagai proses yang selesai, melainkan sesuatu yang dinamis dan diologis.

Pada umumnya, agama-agama terlepas dari peran dan fungsi Negara. Ajaran agama dikaitkan dengan berbagai kebijakan untuk memperlancar sukses tidaknya pembangunan, baik fisik material maupun mental spiritual. Terbukti dengan nyata bahwa menggunakan bahasa agama sangat membantu mempercepat respon masyarakat terhadap ide-ide kemajemukan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka persoalan kita sesungguhnya bagaimana agar sumber daya agama yang majemuk dapat berfungsi sebagai bekal dalam memberdayakan masyarakat (*Empowering society*) demi tegaknya nilai-nilai moral keadilan dan persamaan dalam proses pembangunan bangsa. Atau, dengan kata lain, kita harus menemukan cara agar moral agama dapat menyangga terlaksananya persatuan dan pemberdayaan umat.

Akhirnya, bagi bangsa Indonesia, untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

BAB 3

PLURALISME DI INDONESIA

A. Hakekat Pluralisme

Pluralisme, berasal dari bahasa Inggris terdiri dari dua kata *plural* (**beragam**) dan *isme* (**paham**) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Untuk itu kata ini termasuk kata yang **ambigu**. Yaitu berarti hasil atau keadaan menjadi plural atau keadaan-keadaan seorang pluralis yaitu yang meyakini lebih dari satu keyakinan atau agama. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme>. Pluralisme yang dimaksud di sini ialah paham keagamaan yang majemuk yang membenarkan semua agama, atau paham yang mengakui kebenaran lebih dari satu agama. Sedangkan pluralistik, adalah pengakuan akan keberadaan masing-masing agama berikut kebenaran menurut agamanya masing-masing (ko-eksistensi ko-rekognisi)

Menurut KBBI, pluralisme berarti keadaan masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial dan politik. Dalam konteks pluralisme agama, bisa diartikan sebagai berbagai kebudayaan keyakinan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Di sini akan dipaparkan kedua-duanya, yaitu pluralisme yang berarti pengakuan kebenaran semua agama dan pluralistik yaitu pengakuan akan kebenaran masing-masing kebenaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing agama oleh para pengikutnya masing-masing.

Menurut pemikir muslim M. Rasjidi, mendefinisikan pluralisme agama sebatas sebagai realitas sosiologis bahwa pada kenyataannya masyarakat memang plural. Namun demikian, pengakuan terhadap realitas kemajemukan ini tidak berarti memberikan pengakuan terhadap kebenaran teologis agama-agama lain.

1. Mukti Ali dan Alwi Shihab berpendapat pluralisme agama tidak sekedar memberikan pengakuan terhadap eksistensi agama-agama lain, namun sebagai dasar membangun sikap menghargai dan membangun keharmonisan antarumat beragama. Dalam konteks ini, kedua pemikir tersebut berada pada wilayah setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Dengan demikian mereka meyakini kebenaran agamanya sendiri, namun mempersilahkan orang lain juga meyakini kebenaran agama yang dianutnya.
2. Nurcholis Madjid (2001) mengemukakan definisi pluralisme agama adalah bahwa semua agama adalah jalan kebenaran menuju Tuhan. Dalam konteks ini, Madjid menyatakan bahwa keragaman agama tidak hanya sekedar realitas social, tetapi keragaman agama justru menunjukkan bahwa kebenaran memang beragam. Pluralisme agama tidak hanya dipandang sebagai fakta social yang fragmentatif, tetapi harus diyakini bahwa begitulah faktanya mengenai kebenaran.
3. Hick berpendapat bahwa pluralisme agama merupakan sebuah gagasan yang mengajarkan bahwa Tuhan sebagai pusat, dikelilingi oleh sejumlah agama. Setiap komunitas mendekati Tuhan dengan cara masing-masing. Konsepsi tentang Islam pluralis, juga didasarkan pada pemahaman bahwa pada dasarnya setiap agama terstrukturisasi dari dua hal, yakni perumusan iman dan pengalaman iman.
4. Menurut Diana L. Eck (1999), pluralisme itu bukanlah sebuah paham bahwa agama itu semua sama. Menurutnya bahwa agama-agama itu tetap berbeda pada dataran simbol, namun pada dataran substansi memang setara. Jadi, yang membedakan agama-agama hanyalah (jalan) atau syariat. Sedangkan secara substansial semuanya setara untuk menuju pada kebenaran yang transendental itu.

Dengan menyimak pendapat para ahli, pengertian pluralisme menjadi seolah-olah tidak ada kesepakatan atau adanya perbedaan, di satu sisi harus menerima dan mengakui semua agama adalah sama

di lain pihak hanya mendasarkan bahwa mengakui keberagaman terhadap agama, namun setiap orang berhak untuk meyakini agamanya saja yang benar.

Pluralisme sebagai paham keberagaman merupakan realitas kodrat insani yang tak bisa dipungkiri dan diakui oleh semua agama yang berada di Indonesia dengan semboyannya “Bhinneka Tunggal Ika”, berbeda-beda namun berada di dalam satu kesatuan. Pluralisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:777) adalah keadaan masyarakat yang majemuk yang bersangkutan dengan sistem sosial dan politik, atau berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat. Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja untuk mengakui keberadaan hak agama lain, tapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan (Ahmad Shofan, 2008: 58)

Diana L. Eck yang dirujuk oleh Ahmad Shofan, (2008: 58-59) memaknai pluralisme dalam arti sebagai berikut:

Pertama, pluralisme bukan hanya beragam atau majemuk, pluralisme lebih dari sekedar majemuk atau beragam dengan ikatan aktif kepada kemajemukan tadi. Meski pluralisme dan keragaman terkadang diartikan sama, ada perbedaan yang harus ditekankan. Keragaman adalah fakta yang dapat dilihat tentang dunia dengan budaya yang beraneka ragam. Pluralisme membutuhkan keikutsertaan.

Kedua, pluralisme bukan sekedar toleransi. Pluralisme lebih dari sekedar toleransi dengan usaha yang aktif untuk memahami orang lain. Meskipun toleransi sudah merupakan langkah kedepan dari ketidaktoleransian, toleransi tidak mengharuskan

kita untuk mengetahui segala hal tentang orang lain. Toleransi dapat menciptakan iklim untuk menahan diri, namun tidak untuk memahami. Toleransi saja tidak banyak menjembatani jurang stereotif dan kekhawatiran yang bisa jadi justru mendominasi gambaran bersama mengenai orang lain.

Ketiga, bahwa pluralisme bukan sekedar relativisme. Ia adalah pertautan komitmen antar komitmen religius yang nyata dengan komitmen sekuler yang nyata. Pluralisme didasarkan pada perbedaan dan bukan pada persamaan. Pluralisme adalah sebuah ikatan bukan pelepasan-perbedaan dan kekhususan. Kita harus saling menghormati dan hidup bersama secara damai.

Pluralisme sebagai desain Tuhan "*design of God*" harus diamalkan berupa sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi multikulturalisme. Namun, tidak sekedar berhenti pada wacana pentingnya pluralisme dan tidak pula sekedar menjadi "homo pluralis" yang menghargai keragaman hidup melainkan juga sebagai "homo multikulturalis" yang berkeyakinan bahwa relasi pluralitas yang di dalamnya terdapat problem minoritas versus mayoritas, harus dibangun dengan tindakan nyata berdasarkan pengakuan atas persamaan, kesetaraan dan keadilan.

Sering terjadi konflik sosial yang mengatasnamakan Tuhan atau agama tertentu. Di Indonesia bisa dikatakan setiap tahun terjadi ketegangan, kerusuhan atau konflik akibat dari sentimen antarumat beragama. Untuk itu, pluralisme menjadi sangat penting. Meskipun pluralisme juga dianggap sebagai ancaman bagi sebagian besar umat Islam, karena diyakini bahwa pluralisme menganggap semua agama sama. (Moh. Shofan, 2008: 77).

Para tokoh agama memainkan peran penting dalam menyemai ketakutan akan kebebasan di kalangan umat beragama. Ortodoksi agama (Islam, Kristen, Yahudi) pada dasarnya dibangun untuk mempertahankan ajaran yang mapan dari pengaruh *heretisme* yakni pemikiran-pemikiran yang dianggap menyimpang. Fanatisme lahir dari ketidakpercayaan diri untuk menghadapi perbedaan

pemikiran, ekspresi kehidupan kemudian menetapkan segala hal ihwal yang suci dianggap steril, murni, ajeg tak terkontaminasi (Yudi latif dikutip oleh Moh. Shofan, 2008: 78). Agama disalahgunakan dan disalaharahkan baik dari sisi eksternal maupun internal, agama profetik cenderung melakukan kekerasan setelah identitasnya terancam, karena yakin bahwa tindakannya didasarkan kehendak Tuhan (Moh Shofan: 2008: 93). Keragaman adalah sebuah kenyataan hidup di mana setiap orang harus berusaha sampai kepada sikap saling memahami satu sama lain. Dasar pluralisme agama kesatuan tujuan dan dialog yang terbuka.

Di balik perbedaan pada masing-masing agama tetap ada peluang dipertemukan mengingat kesamaan pada dimensi transendental. Semua agama apapun bentuk eksoterik (cara ibadah dan berbagai simbolik lainnya) akan berjumpa pada ranah transenentalnya yaitu Tuhan. Hal ini yang menjadi jantung semua agama menuju pada pluralisme etis-normatif. Sedangkan titik tekan multikulturalisme merupakan plurlisme budaya. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik (Furniwall dikutip oleh Herfenr, 2007: 16). Multikulturalisme mengakui adanya keragaman etnik dan budaya, agama dan tradisi masyarakat suatu bangsa, agar masing-masing saling menyesuaikan diri atas norma maupun kebiasaan yang dikonsolidasikan dan dihasilkan melalui pranata nasional, apakah melalui pendidikan maupun sistem hukum. Jika prularisme merupakan pengakuan realitas kebhinnekaan yang mewujud ke dalam ko-eksistensi, toleransi dan demokrasi, maka multikulturalisme lebih menekankan pada pengakuan keragaman etnik. budaya, agama dan tradisi untuk saling menyesuaikan diri.

B. Munculnya Pluralisme

Sebagai suatu kenyataan bahwa kita sebagai bangsa yang majemuk dilihat dari berbagai sudut pandang yang ada. Misalnya, bangsa Indonesia dilihat dari sudut pandang etnis itu terdiri dari

berbagai macam etnis, dari sudut budaya pun terdiri dari berbagai macam budaya. Demikian pula bila dilihat dari segi keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia sesuai kenyataan yang ada terdiri dari berbagai keyakinan dan kepercayaan agama. (Lihat Bab I) Dalam pandangan ini akan ditinjau lebih khusus yang berhubungan dengan keyakinan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia khususnya.

Pluralisme sebagai suatu faham kemajemukan yang telah ada dan muncul pada setiap bangsa di dunia ini. Namun demikian, ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan yang lebih khusus yaitu yang berhubungan dengan masalah pluralisme agama.

Pada hakekatnya pluralisme merupakan problem semua agama, karena di dalamnya menyangkut konten esensial dan issue yang kritikal-sensitif bagi kepentingan masing-masing agama, terutama yang terkait dengan keyakinan dan sistem peribadatan, yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh agama lain. Pluralisme agama yang tidak menyangkut masalah keyakinan dan sistem peribadatan, tidak sepeka dan sekritis pluralisme keyakinan dan peribadatan. Masalah berikutnya adalah pemahaman terhadap pluralisme ini yang berbeda-beda. Jika pluralisme diartikan sebagai saling pengakuan eksistensi masing-masing agama berikut seperangkat kebenaran yang diyakininya, maka hal ini tidak menjadi problem bagi agama-agama. Namun, jika pluralisme diartikan sebagai *penyamaan* semua agama atau pengakuan kebenaran pemeluk agama kepada agama lain, yang kemudian menganggap semua agama adalah sama, hal ini yang dikhawatirkan menimbulkan percampuran agama (*sinkritisme*). Namun demikian, tidak semua agama mempunyai penafsiran yang sama terhadap pluralisme, ada agama yang membuka diri seluas-luasnya terhadap makna pluralisme baik dalam pengertian ko-eksistensi maupun generalisasi kebenaran agama yang sama-sama benar, sehingga agama apapun yang dipeluk manusia akan mencapai *ending* yang sama yaitu surga. Dengan kata lain bahwa agama ini dimisalnya jalan bercabang banyak, dengan dan dari arah

manapun pada akhirnya akan mencapai terminal akhir kehidupan, yaitu surga.

Pemahaman terakhir inilah yang tidak dikehendaki oleh agama-agama *samawi* (baca: Islam, Kristen dan Yahudi). Sementara agama-agama *ardliy* (baca: Hindu, Budha, Kongfuzu dan lain-lain) lebih membuka diri terhadap pluralisme, baik dalam arti ko-eksistensi maupun penyamaan semua agama. Perbedaan persepsi dan sikap umat beragama tentu akan dipengaruhi oleh teks kitab suci maupun fatwa para pemuka agamanya, yang pada tataran pemuka agama tingkat kota atau tingkat kabupaten tak bisa lepas dari pengaruh itu.

Pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut Pencerahan *Enlightenment* Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Yaitu masa yang diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (*rasionalisme*) dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan agama. Pada tahun 1875 Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott, dan William Quan Judge mendirikan sebuah organisasi yahudi bernama *Theosophical Society* di kota New York dengan tujuan mengikat persaudaraan universal tanpa melihat kelompok, bangsa dan agama, di bawah pimpinan Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott, dan William Quan Judge. Kahruman (2010) menyebutkan beberapa tahun kemudian organisasi ini mendirikan *International Head Quarters* di Adyar, Chennai, India. Di bawah lambang *Theosophical Society* tersebut tertulis " *There is no religion higher than Truth* (Tidak ada yang lebih tinggi dari agama selain kebenaran)". Sedangkan tujuan utama perhimpunan Theosofi adalah:

1. Mengadakan inti persaudaraan antara sesama manusia tanpa memandang bangsa, kepercayaan, kelamin, kaum atau warna kulit.
2. Memajukan pelajaran dengan mencari persamaan dalam agama-agama, filsafat dan ilmu pengetahuan.

3. Menyelidiki hukum-hukum alam yang belum dapat diterangkan dan kekuatan-kekuatan dalam manusia yang masih terpendam.

Oleh sebab itu, *Theosophical Society* adalah sebuah badan kebenaran yang merupakan dasar dari semua agama, yang tidak dapat dimiliki dan dimonopoli oleh agama atau kepercayaan manapun. Theosofi menawarkan sebuah filsafat yang membuat kehidupan menjadi dapat dimengerti, dan theosofi menunjukkan bahwa keadilan dan cinta-kasihlah yang membimbing evolusi kehidupan. Ketika memasuki abad ke-20, gagasan pluralisme agama telah semakin kokoh dalam wacana pemikiran filsafat dan teologi barat.

Tokoh yang tercatat pada barisan pemula muncul dengan gigih mengedepankan gagasan pluralisme adalah seorang teolog Kristen Liberal **Ernst Troeltsch (1865-1923)**. Dalam sebuah makalahnya yang berjudul ***The Place of Christian it among the World Religions*** (Posisi Agama Kristen diantara Agama-Agama Dunia) yang disampaikan dalam sebuah kuliah di Universitas Oxford menjelang wafatnya pada tahun 1923. Troeltsch melontarkan gagasan pluralisme agama secara argumentative bahwa dalam semua agama, termasuk Kristen, selalu mengandung elemen kebenaran dan tidak satu agama pun yang memiliki kebenaran mutlak, konsep ketuhanan di muka bumi ini beragama dan tidak hanya satu.

Setelah Perang Dunia Kedua, yaitu ketika mulai terbuka kesempatan besar bagi generasi muda muslim untuk mengenyam pendidikan di universitas-universitas barat sehingga mereka dapat berkenalan dan bergesekan langsung dengan budaya barat. Kemudian di lain pihak, gagasan pluralisme agama menembus dan menyusup ke wacana pemikiran Islam melalui karya-karya pemikir-pemikir muslim seperti Rene Guenon (Abdul Wahid Yahya) dan Frithjof Schuon (Isa Nuruddin Ahmad). Menurut guenon, Semua agama termasuk agama Islam, tidak dapat dikatakan benar atau salah dengan cara mengkaji ajaran agamanya, sebab semua agama itu mempunyai kebenaran yang terkandung dalam Tradisi Primordial.

Semua agama dalam kegiatan ritualnya hanya merupakan cara untuk mencapai Tradisi Primordial. Rene Geunon meninggal pada tahun 1951 di Kairo sebagai seorang muslim dengan nama Abdul Wahid Yahya.

Pemikiran Rene Geunon diteruskan oleh muridnya Frijof Schuon (1907-1998). Sejak berusia 16 tahun, Schuon telah membaca tulisan Geunon "*Orient et Occident*". Kagum dengan pemikiran Geunon, Schuon berkirim surat dengan Geunon selama 20 tahun. Setelah berkorespondensi sekian lama, akhirnya Schuon berjumpa pertama kali dengan Rene Geunon di Mesir pada tahun 1938, dan masuk lislam pada tahun 1948 dengan nama Isa Nuruddin. Menurut buku "*Trancedental Unity of Religions*" yang ditulis oleh Schoun, agama-agama merupakan salah satu dari tiga wujud utama penjelmaan Zat Yang Mutlak (*Grand Theophanies of The Absolute*) yang mempunyai dua hakikat, yaitu: *asoteric* (batin) dan *exoteric* (dzahir), substansi (*substance*) dan aksiden (*accident*), atau essensi (*essence*) dan bentuk (*form*).

Semua agama bersatu dalam tingkat bathin (*esoteric*) walaupun berbeda dalam tingkat dzahir (*exoteric*). Kesatuan agama dalam tingkat bathin inilah yang disebut dengan "kesatuan agama-agama dalam tingkat transedent (*Trancedent Unity of Religion*). Oleh karena itu, setiap agama dalam tingkat lahir, tidak boleh menganggap dirinya mempunyai kebenaran mutlak (*absolutely absolute*). Dalam perkembangannya Schoun mendakwa dirinya sebagai seorang Syekh Tarekat dengan mendirikan Tarekat Szadzilliah Maryamiyah. Sewaktu di tanyakan kepadanya mengapa dia memakai nama Maryam maka dia menjawab: " Maryam adalah manusia yang dimuliakan dalam keluarga Daud, dia juga ibu yang mulia dalam agama Kristian. Dan juga perempuan yang mulia dalam sejarah Islam. Dia mencintai tiga agama dan mulai dalam ketiga agama tersebut "akhirnya Schoun meninggal pada tahun 1998 dengan nama Syekh Isa Nuruddin Ahmed al Sazdili al-Alawi el-Maryami.

C. Islam dan Pluralisme

Islam sebagai agama wahyu (*samawiy*) amatlah tegas di dalam masalah akidah dan ibadah, sehingga tidak ada tempat bagi penyamaan kebenarannya dengan agama lain, jika pluralisme diartikan sebagai keyakainan bahwa semua agama adalah sama benarnya. Karena kitab suci Al-Qur'an (QS. Al-Kafirun: 6) secara tegas menyatakan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Yang menjadi bahan perbincangan di kalangan tokoh atau ulama Islam sendiri adalah Pengakuan akan eksistensi dan kebenaran bagi agama lain, karena menurut iman islamiy, agama satu-satunya yang akan diterima oleh Tuhan adalah Islam, sedangkan yang lain akan ditolak.

Sejalan dengan prinsip tersebut pada tanggal 28 Juli 2005, MUI menerbitkan fatwa yang melarang pluralisme agama. Dalam fatwa tersebut, **pluralisme agama**, sebagai obyek persoalan yang ditanggapi, didefinisikan sebagai: "Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga". Dengan demikian, MUI menyatakan bahwa Pluralisme dalam konteks penyamaan kebenaran semua agama yang tertera tersebut bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Demikian pula menurut Lembaga Kajian dan Fatwa yang menentang adanya pluralisme agama atau *wihdatul adyaan*, karena menurut keputusan lembaga ini bahwa Islam adalah agama terakhir untuk seluruh umat manusia, tidak ada lagi agama yang diterima oleh Tuhan kecuali agama Islam, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir, sehingga tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Bahkan jika seandainya ada Nabi sebelumnya, yang kemudian diturunkan ke dunia seperti Nabi Isa menurut keyakinan kaum muslimin yang nanti akan diturunkan lagi ke dunia, maka Nabi Isa tidak menyiarkan ajarannya yang dahulu diembannya, melainkan akan melanjutkan risalah Nabi Muhammad saw.

Bahkan barangsiapa yang mengakui adanya Nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad saw, atau jika ada yang meyakini adanya agama yang sah selain Islam maka mereka dihukumi sebagai kafir dan di akherat kelak kemudian hari termasuk orang-orang yang merugi karena agama dan keyakinan tidak diterima oleh Tuhan (Allah), demikian halnya ajakan untuk menyatupadukan Al-Qur'an, Taurat dan Injil di dalam satu jilid, atau menyatukan tempat ibadah di dalam satu area yang sama dianggap melanggar akidah, dan dinilai keluar dari Islam. Kalau sekedar berdampingan bangunannya hal ini tidak jadi masalah.

Di dalam perkembangannya terdapat dua pandangan para pemuka agama Islam yang dipicu oleh padangan pergaulan antara muslim dan non-muslim yang kemudian menimbulkan munculnya dua pandangan terhadap pluralisme agama, yaitu pandangan kaum puritan dan pandangan kaum moderat. Kaum puritan yang menolak pluralisme di dalam agama di antaranya dikomandani oleh Adian Husaini, KH. Abdusshomad Bukhori dan Anis Malik Thoha. Sementara kelompok moderat yang mendukung pluralisme agama disponsori oleh Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat dan Azumardi Azra (Ngainun Naim, 2012: 33)

Menurut kaum moderat pluralisme adalah sebuah keniscayaan, sebab tidak mungkin manusia mempunyai kepercayaan yang sama, karena itu tak mungkin manusia menghilangkan pluralisme yang telah diciptakan oleh Tuhan. Telogi bukan agama, karena ia turun sesuai konteks jaman (Azumardi Azra yang dikutip Ngainun Naim, 2012: 50). Hal yang serupa dipaparkan oleh Komaruddin Hidayat (dikutip Ngainun Naim, 2012: 52), bahwa pluralisme adalah sebuah keniscayaan sebagaimana pluralisme di bidang bahasa dan etnis. Pemikiran pluralistik dan inklusifistik akan bisa meredam adanya konflik agama dan bisa jadi membawa orang lebih dewasa dalam mengapresiasi agama. Menurut Azumardi (dikutip Ngainun Naim, 2012) bahwa pluralisme ini adalah sebuah penghargaan kepada agama lain dalam kerangka memelihara kerukunan, menurutnya menciptakan masyarakat yang tunggal, monolitik, yang tidak plural

adalah sebuah perbuatan yang sia-sia, yang tepat ialah dengan mengembangkan sikap-sikap yang saling menghormati, toleran dan menghargai pluralisme.

Sementara itu, kelompok yang menolak pluralisme di antaranya adalah Adhian Husanini yang mengatakan bahwa pluraliasme agama adalah sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Dengan definisi seperti ini maka pluraliasme harus ditolak (Ngainun Naim, 2012: 63).

Senada dengan pendapat Adhian adalah Abdusshomad (Ngainun Naim, 2012: 67) yang memaparkan bahwa pluralisme agama mengajarkan semua agama adalah sama, oleh karenanya kebenaran agama adalah relatif, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim aganya saja yang benar. Pengertian pluralisme berbeda dengan pluraitas yang menunjukkan adanya realitas kehidupan bergama yang beragam. Kenyataan bahwa di masyarakat terdapat para pemeluk agama yang berbeda dan hidup secara berdampingan bukan pluralisme melainkan pluralitas, yaitu yang menunjukkan realitas keberagaman, Pluralitas merupakan upaya untuk mensejajarkan beberapa agama, sedangkan pluralisme merupakan pencampuradukkan beberapa ajaran agama.

Pada tanggal 28 Juli 2005, MUI menerbitkan fatwa yang melarang pluralisme. Dalam fatwa tersebut, **pluralisme agama**, sebagai obyek persoalan yang ditanggapi, dan didefinisikan sebagai: *"Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga"*.

Dengan demikian, MUI menyatakan bahwa Pluralisme dalam konteks yang tertera tersebut bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Dengan adanya definisi *pluralisme* yang berbeda tersebut, timbul **polemik panjang mengenai pluralisme di Indonesia.**

D. Pluralisme Agama dan Tantangannya

Pada era globalisasi masa kini, umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik intern atau antaragama, adalah fenomena nyata. Di masa lampau kehidupan keagamaan relative lebih tenteram karena umat-umat beragama bagaikan kamp-kamp yang terisolasi dari tantangan-tantangan dunia luar. Sebaliknya, masa kini tidak sedikit pertanyaan kritis yang harus ditanggapi oleh umat beragama yang dapat diklasifikasikan rancu dan merisaukan.

Sebagai konsekuensi tampilnya sekian banyak agama baru, lahir pula serangkaian pertanyaan. Pertanyaan ini antara lain: Apabila Tuhan itu Esa, tidakkah sebaiknya agama itu tunggal saja? Lalu disusul dengan pertanyaan berikutnya: Apabila pluralism agama tidak dapat dielakkan, maka yang manad di antara agama-agama ini yang benar, atautkah semuanya sesat?

Kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut sulit dijawab dengan suatu argumentasi yang meyakinkan, maka pertanyaan lebih mudah adalah sebagai berikut: Mungkinkah terdapat persamaan doktrin atau kesamaan tujuan di antara aneka macam agama yang ada. Dan, kalau demikian halnya, maka bagaimana cara terbaik untuk menjalin hubungan yang harmoni antaragama? Atau lebih spesifik lagi, bagaimana seharusnya agama yang saya anut dan percaya kebenarannya dapat berinteraksi dengan agama lain? Cara dan pendekatan apa yang harus saya tempuh, konfrontatif atau persuasifkah? Pada akhirnya serangkaian pertanyaan ini ditutup dengan suatu renungan besar yang merisaukan: Mengapa aku memeluk suatu agama dan tidak ikut agama lain?

1. Pandangan Agama Hindu

Agama ini mengajarkan empat jalan mencapai tujuan menuju tuhan, yaitu (1) Jalan menuju Tuhan melalui Ilmu Pengetahuan, melalui latihan ruhani yang disebut Yoga, dengan mengandalkan latihan-latihan (2) Jalan menuju Tuhan melalui Cinta, karena manusia lebih didominasi oleh perasaan dari pada rasionalitas dan intelektualitas, (3) Jalan menuju Tuhan melalui kerja dan (4) Jalan menuju tuhan melalui latihan Psikologis (Huston Smith, 1985: 59). Menurut agama Hindu banyak jalan menuju puncak yang sama. Itulah sebabnya maka agama ini mengajarkan bahwa setiap kali orang Hindu mendukung Universalisme Radikal, dan secara bombastik memproklamasikan bahwa "semua agama adalah sama", dia melakukan itu atas kerugian besar dari agama Hindu yang dia katakan di-cintai. (Frank Gaetano Morales, cendekiawan Hindu). Atas dasar pemikiran itu maka Agama Hindu merupakan agama yang sangat mendukung terhadap pluralisme agama.

2. Pandangan Agama Buddha

Dengan mencontoh pandangan **Sang Buddha** tentang toleransi beragama, **Raja Asoka** Maurya membuat dekrit yang berbunyi "...janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormat atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang disamping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya kita akan merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama lain – semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir 'bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri' maka dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragumlah yang dianjurkan dengan pengertian, bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain...."

Ketika Suku Sakya dan Suku Koliya ingin berperang karena memperebutkan air sungai Rohini. Sang Buddha dengan Mata Bathinya mengetahui kejadian itu dan Buddha dengan Kesaktiannya terbang ke udara, tepat di tengah-tengah Sungai Rohini. Mereka langsung bersujud ketika mereka melihat Sang Buddha, Sang Buddha bertanya pada pimpinan dari kedua pihak itu, satu demi satu, akhirnya sampailah kepada pekerja harian. Pekerja harian itu menjawab: Pertengkaran ini hanya karena air sungai Rohini, Yang Mulia." Kemudian Sang Buddha bertanya pada kedua Raja itu: "Berapakah nilai air sungai itu, Raja Mulia?" "Sangat kecil nilainya, Yang Mulia." "Berapa besarkah nilai Khattiya (Negeri) ini, Raja Mulia?" "Khattiya ini tidak ternilai, Yang Mulia." "Bukanlah hal yang baik dan pantas apabila hanya karena air yang sedikit ini kalian menghancurkan Khattiya (Negeri) yang tidak ternilai ini."

Kedua pihak itu diam seribu bahasa. Sang Buddha berkata lagi: "O, Raja Mulia, mengapa kalian bertindak seperti ini? Apabila saya tidak ada di sini sekarang, kalian akan bertempur, membuat sungai ini berlimbah darah. Kalian tidak pantas bertindak demikian. Kalian hidup bermusuhan, menuruti hati yang diliputi lima jenis nafsu kebencian. Saya hidup bebas dari kebencian. Kalian hidup menderita karena sakit yang disebabkan oleh nafsu kejahatan. Saya hidup bebas dari penyakit. Kalian hidup dipenuhi keinginan, dengan memuaskan lima jenis hawa nafsu keserakahan. Saya hidup bebas dari segala nafsu keserakahan." Setelah bersabda demikian, Sang Buddha mengucapkan syair-syair ini: *"Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci, di antara orang-orang yang membenci kita hidup tanpa membenci."* (Dhammapadam Sukha Vagga no.1 dalam ([https://id.wikipedia.org/wiki/ Pluralisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme)). Peristiwa tersebut menggambarkan betapa agama Budha ini sangat menjunjung tinggi pluralisme agama seluas-luasnya.

3. Pandangan Agama Katolik

Paus Yohannes Paulus II, tahun 2000, mengeluarkan Dekrit **Dominus Jesus'**. Penjelasan ini, selain menolak paham Pluralisme

Agama, juga menegaskan kembali bahwa **Yesus Kristus** adalah satu-satunya pengantar keselamatan Ilahi dan tidak ada orang yang bisa ke Bapa selain melalui Yesus. Pluralisme Agama berkembang pesat dalam masyarakat Kristen barat disebabkan setidaknya oleh tiga hal: yaitu (1) Trauma sejarah kekuasaan gereja di Abad Pertengahan dan konflik Katolik-Protestan, (2) Problema teologi Kristen, dan (3) Problema **Teks Alkitab**.

Dalam tradisi Kristen, dikenal ada tiga cara pendekatan atau cara pandang teologis terhadap agama lain. (1) eksklusivisme, yang memandang hanya orang-orang yang mendengar dan menerima Alkitab yang akan diselamatkan. Di luar itu, ia tidak selamat. (2) inklusivisme, yang berpandangan, meskipun Kristen merupakan agama yang benar, tetapi keselamatan juga mungkin terdapat pada agama lain. (3) pluralisme, yang memandang semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju inti dari realitas agama. Sementara itu, dalam pandangan Pluralisme Agama, tidak ada agama yang dipandang lebih superior dari agama lainnya. Semuanya dianggap sebagai jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan.

4. Pandangan Agama Konghutu

Berdasarkan kitab Zhong Yong agama adalah bimbingan hidup karunia Tian/Tuhan Yang Maha Esa (*Tian Shi*) agar manusia mampu membina diri hidup di dalam Dao atau Jalan Suci, yakni "hidup menegakkan Firman Tian yang mewujudkan sebagai Watak Sejati, hakikat kemanusiaan". Hidup beragama berarti hidup beriman kepada Tian dan lurus satya menegakkan firman-Nya http://www.coolsocialsearch.com/home.html?u=27485408&src_type=null&gl=id&loc=98

Sebenarnya agama Konghucu lebih tepat disebut sebagai gerakan moral dari pada paham keagamaan, karena ajaran-ajarannya lebih menyentuh pada nilai-nilai etika dan tidak banyak membicarakan tentang ketuhanan dan sistem peribadatan.

E. Pluralisme Dalam Persepsi Tokoh Agama di Indonesia

Memberikan arah pemikiran religius berbagai agama di Indonesia, paling tidak Agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu yang berkembang di masyarakat Indoensia, yang akhir-akhir ini memberikan sinyal positif terhadap keanekargaman agama berikut perkembangannya. Melalui berbagai media cetak, elektronik bahkan media sosial perbincangan tentang pluralisme dan multikulturalisme semakin mendapatkan porsi pembahasan yang semakin meningkat intensitas dan ruang lngkup kajiannya.

Secara terbuka para tokoh dari berbagai agama semakin semangat menuangkan pokok-pikirannya untuk mencari format pluralisme agama, tanpa menyinggung apalagi mengorbankan masing-masing keimanan yang dipegangnya selama ini. Pluralisme yang lebih bernuansa saling mengakui eksistensi mereka masing-masing (ko-eksistensi dan ko-rekognisi), bukan arah pemikiran yang sinkretis-liberalistik, bahkan menolak radikalisme-anarkhisme dan narsisme bagi para penganutnya. Salah satu pendukung konsep pluralisme di kalangan generasi muda Islam adalah Moh. Shofan.

Menurut Moh. Shofan (2008:59) tidak ada halangan seorang muslim mengucapkan "*Selamat Natal* bagi umat Kristen, meskipun sebagian kalangan umat Islam menilai sebagai bentuk tidak kekonsistensinan dalam beragama. Menurutnya masing-masing orang punya kebebasan untuk menafsirkan agama yang dipeluknya, bukan Islam yang skeptis apriori terhadap eksistensi kelompok di luar dirinya. Islam yang diimani adalah Islam yang apresiatif dan akomodatif terhadap berbagai ragam etnis, budaya, ras, termasuk agama-agama di luar Islam, Kristen, Yahudi, Shabiin, dan aliran-aliran lain, bahkan aliran yang tidak percaya terhadap agama, maupun Tuhan sekalipun. Islam yang penuh toleransi, terbuka dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. (Moh. Shofan, 2008: 5)

Menurut Moh. Shofan bahwa Pluralisme difahami. *Pertama*, pluralisme bukan hanya beragam atau majemuk, pluralisme lebih dari sekedar dengan ikatan aktif kepada kemajemukan itu. Keragaman adalah fakta yang dapat dilihat tentang dunia dan kebudayaan. *Kedua*, pluralisme lebih dari sekedar toleransi, tapi

lebih pada kemampuan memahami orang lain. *Ketiga*, pluralisme bukan relativisme, melainkan pertautan komitmen antara komitmen religius yang nyata dan komitmen sekuler yang nyata. Pluralisme didasarkan pada perbedaan bukan persamaan. Pluralisme adalah sebuah ikatan, bukan pelepasan perbedaan dan kekhususan.

Namun, harus ditumbuhkan bahwa hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang penuh semangat bukan hanya sekedar hidup berdampingan tanpa memedulikan orang lain. Hal ini membutuhkan ikatan kerja sama, dan kerja nyata. (Moh. Sbofan, 2008: 50). Dalam pembicaraan tentang pluralisme yang tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan filsafat, kebudayaan dan agama. Karena memang akar permasalahannya terletak pada tiga hal tersebut. Pluralisme bisa dipahami sebagai keanekaragaman agama, pemikiran filsafat dan juga kebudayaan. Dalam konteks ini terdapat titik temu pemahamannya yang kurang lebih sama dengan multikulturalisme.

Islam melalui Al-Qur'an mengajarkan paham kemajemukan dan keberagaman (pluralitas), yang tidak perlu diartikan sebagai pengakuan akan kebenaran ajarannya, melainkan bahwa keberagaman itu ada dan tidak bisa dinafikan, karena hal itu merupakan realitas sosial yang tak terbantahkan. Kebenaran di kalangan muslim sendiri banyak diselewengkan, misalnya pengkultusan terhadap yang masih hidup maupun yang telah mati. Artinya kemajemukan agama diberikan kebebasan untuk hidup, (Nurkholis Madjid, 1992: 177-178)

F. Pluralisme Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

1. Selayang Pandang Agama Kristen

Agama Kristen juga disebut sebagai agama Nashrani atau Nashara, dinisbahkan dengan kota *Nazareth*, sebuah kota di sebelah utara Palestina. Karena itu pengikut Isa Al-Masih yang berasal dari dan juga dibesarkan di kota Nazareth maka ajaran dan juga pemeluknya disebut Nashrani. Adapun sebutan Kristen diambil dari sebutan pembawanya yaitu *Yesus Kristus*, sedangkan sebutan

Al-Masih (Masehi) artinya yang ditunggu, yang juga merupakan sebutan atau gelar dari Yesus Kristus. Ketiga nama tersebut yaitu Kristen, Al-Masih, Nashrani tersebut mencakup semua sekte atau aliran gereja, Gereja Nashrani, Gereja Katolik, Gereja Protestan, Gereja Anglikan, Gereja Ortodoks, Gereja Advent Hari Ketuju, Gerja Pantekosta, Gereja Maronit, dan sebutan gereja lainnya. Akan tetapi untuk kasus Indonesia hanya ada dua aliran atau sekte besar, yaitu Katolik dan Protestan (Hasbullah Bakri, 1986: 129), yang keduanya juga terbagai-bagi lagi menjadi berbagai macam sekte, baik yang bersifat nasional maupun lokal atau komunitas tertentu.

Umat Kristen dengan berbagai sekte atau aliran tersebut mempunyai penganut yang sangat besar, di seluruh benua dan yang terbanyak berada di Eropa Barat dan Amerika, yang disinyalir lebih dari 500 sekte atau aliran gereja. Di Indonesia dikenal juga berbagai macam sekte atau nama gereja, yang semua aliran itu terhimpun di dalam Persatuan Gereja Indoneia (PGI). Dari sekte Protestan yang menyebut dirinya Kristen, berbeda dengan Gereja atau Sekte Katolik, juga terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Gereja Kristen Indonesia sebutan untuk level nasional, dan Gereja dari Komunitas tertentu yang didasarkan pada daerah, suku atau komunitas lainnya (Wawancara dengan Bambang Pratama, 11-10-15)

Yang diakui sebagai pembangun agama ini adalah Isa Al-Masih yang juga disebut Yesus Kristus di kota Betlehem Yerusalem, Palestina yang sekarang berada di bawah pengendalian Israel. Tentang kelahirannya terjadi perbedaan antara tiga agama besar (Yahudi, Nashrani dan Islam). Penganut Kristen mempercayai bahwa Isa al-Masih merupakan penjelmaan Tuhan sebagai manusia yang lahir dari seorang wanita suci dan perawan bernama Maria atau Maryam.

Dalam perkembangannya Isa Al-Masih mempunyai murid yang melanjutkan penyiaran ajarannya, yang kemudian disebut Rasul-Rasul. Ada 12 murid yang mendapat tugas utama menyampaikan ajarannya serta menguatkan kembali kitab sebelumnya yaitu Taurat, mereka itu ialah Petrus, Andreas, Yahya, Pilipus, Bartomolius, Tohmas,

Matius, Yaqub, Titus, Simon dan Yudas. Di samping dua belas murid yang pernah bertemu dengan Isa Al-Masih ada seorang Rasul lagi yang tidak pernah beremu dengan Isa al-Masih, yaitu Paulus.

Kitab suci agama Kristen adalah Bibel atau Al-Kitab, yang di dalam Al-Qur'an disebut Injil. Namun, dalam kenyataannya agama Kristen ini mengakui dua macam kitab yaitu Kitab Taurat yang disebut Perjanjian Lama, dan Kitab Injil yang disebut Perjanjian Baru. Terdapat 17 bagian yang berisi sejarah, 6 bagian kitab-kitab syair, 16 kitab para nabi, sedangkan 17 kitab dan surat yang terkandung di dalam Perjanjian Baru berisi 5 bagian sejarah, dan 21 bagian berisi ceritera para nabi (Hasbullah Bakri, 1986: 129-136).

2. Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Agama Kristen

Merebaknya isu pluralisme agama alakhir-akhir ini merupakan sebuah upaya menyamakan berbagai macam kepercayaan dan pengmalan ibadahnya. Pluralisme agama menyatakan "semua itu baik dan benar." Seiring dengan maraknya paham inklusivisme, dalam masyarakat muslim, "agama baru" ini mndapatkan respons yang hingar-bingar dari berbagai kalangan Ormas Islam dan laris di kalangan Islam liberal, Sehingga Majelis Ulama Indonesia yang "memayungi" kepentingan kemurnian akidah dan penyelamatan ibadah kaum muslimin secara tegas mengemukakan fatwa Nomor: 7/MUNAS/VII/MUI/2005 yang inti keputusan fatwanya adalah melarang kaum muslimin mengikuti paham Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme. Kalangan Islam moderat atau Islam inklusif dan di kalangan Kristen yang memiliki sikap dan pandangan yang kurang-lebih sama dengan kelompok Muslim tersebut. Tujuannya untuk membangun toleransi agama-agama dan kerukunan sesama umat beragama yang selama ini banyak terluka. Dengan pluralisme agama, Islam pluralis berharap mendapat simpati yang luas dari Kristen dan non-Muslim lainnya. Lantas bagaimana Kristen bersikap dan menanggapi. Inilah yang menjadi telahan berikut ini.

Pluralisme agama dipahami minimum dalam tiga kategori (Bedjo SE) sebagai berikut: *Pertama*, kategori sosial, dengan pengertian

bahwa pluralisme agama berarti "semua agama berhak untuk ada dan hidup". Secara sosial, kita harus belajar untuk toleran dan menghormati iman atau kepercayaan penganut agama lain. *Kedua*, kategori etika atau moral, dalam arti bahwa "semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah". Jika kita menganut pluralisme agama dalam nuansa etis, kita didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain yang mempunyai pandangan moral berbeda, Ketiga, kategori teologis-filosofis. yang berarti "agama-agama pada hakekatnya setara, sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan". Nampaknya kalimat yang lebih umum adalah "banyak jalan menuju Roma". Semua agama menuju pada Allah, hanya jalannya yang berbeda-beda. Penyebutan pluralisme agama, seringkali mengarah pada pengertian pluralisme agama dalam kategori teologis-filosofis ini

Pluralisme agama memang "simpatik" karena berkeinginan untuk membangun teologi terbuka yang terdengar amat toleran, "semua agama sama-sama benar. Semua agama menyelamatkan" umat manusia. Walaupun demikian menurut Berdjo SE (salah seorang pemikir Kristiani) berpandangan bahwa teologi pluralisme agama pada dasarnya *menyangkali iman Kristen sejati* yang kembali pada Alkitab, dengan beberapa analisis kritis: *Pertama*, Pluralisme agama sebagai pendangkalan iman. Orang yang percaya pada teologi pluralisme agama biasanya tidak benar-benar mendasarkan pandangannya atas dasar kitab suci agama yang dianutnya atau tidak benar-benar berteologi berdasarkan sumber utama (kitab suci).

Kedua, Pluralisme agama memiliki dasar yang lemah karena melandaskan diri pada *Pragmatisme*. Pluralisme yang mendasari agama adalah sebuah cara berpikir yang tidak tepat. Demi keharmonisan maka menganggap semua agama benar adalah mentalitas orang yang dangkal dan penakut. Selanjutnya, relativisme kebenaran adalah sebuah pandangan yang salah. Penganut relativisme agama tampaknya sering tidak bisa membedakan antara relativisme dalam hal selera.

Ketiga, penganut pluralisme Agama seringkali tidak konsisten. Penganut pluralisme agama sering menuduh golongan yang percaya bahwa hanya agamanyalah yang benar (sering disebut eksklusivisme atau partikularisme dalam teologi Kristen) sebagai fanatik, fundamentalis dan memutlakkan agamanya. Padahal dengan tuduhan seperti ini, kaum pluralis telah menyangkali pandangannya sendiri bahwa tiap orang boleh meyakini agamanya masing-masing secara bebas.

Keempat, pluralisme agama menghasilkan toleransi yang semu. Jika kita membangun toleransi atas dasar kepercayaan bahwa semua agama sama-sama benar, hal itu adalah toleransi yang semu. Karena di dalamnya terlintas pendangkalan terhadap keyakinan agama yang dipeluknya selama ini.

Kelima, kritik terhadap pluralisme agama versi John Hick bahwa jika "The Real" atau Allah-nya Hick memang melampaui konsep yang baik atau yang jahat, mengapa Hick justeru menggunakan kriteria "kekudusan" untuk mengetahui seseorang itu sudah diselamatkan atau tidak diselamatkan? Ini adalah sebuah kriteria yang bisa kita pertanyakan keabsahannya. Selanjutnya, bagi Hick, keselamatan adalah transformasi moral akibat perubahan pusat kehidupannya dari diri sendiri kepada "The Real". Hal ini mencerminkan teologi yang tidak berdasarkan Alkitab, walaupun Hick sendiri mengaku Kristen.

Dari analisis kritis tersebut Bedjo SE menyimpulkan bahwa Pluralisme agama dalam pengetahuan teologi-filosofi memiliki banyak kelemahan dalam logika rasional dan konsistensi teologis. Selain itu berdasarkan epistemologi Alkitab, kita harus menolak pandangan "semua agama menuju pada Allah dan semua agama menyelamatkan". Orang Kristen perlu berani mengakui perkataan Yesus "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Sikap demikian bukanlah sikap fanatik melainkan konsisten dan bertanggung jawab dalam beriman kristiani. Fanatisme adalah mempercayai sesuatu atau seseorang tanpa bersikap kritis terhadapnya. Seseorang

yang belum pernah belajar semua agama tetapi terburu-buru mengatakan semua agama pada dasarnya sama justeru adalah orang yang fanatik terhadap pluralisme agama. Akhirnya, tentu saja kita perlu menerima pluralisme agama secara sosial, dan etis tetapi pluralisme agama dalam kategori teologi-filosofi harus kita tolak dengan tegas.

G. Agama Hindu Memandang Pluralisme Agama dan Multikulturalisme

1. Agama Hindu Selayang Panang

Agama Hindu disebut juga sebagai agama Brahma, Agama Veda atau Agama Dharma, namun yang sering disebut atau dikenal oleh bangsa Indonesia adalah Agama Hindu, yang berasal dari Hindia Utara. Agama Hindu tidak mempunyai nabi. Agama ini berawal dari Kaum Brahma atau golongan pendeta yang menghimpun syair-syair yang kemudian menjadi Kitab suci mereka. Meskipun ada yang berhipotesis bahwa Brahma itu berasal dari kata Ibrahim. Sehingga dikatakan bahwa agama ini dari agama Ibrahim, meskipun hipotesis ini sulit dibuktikan keberannya. Yang lebih bisa dijadikan acuan ialah bahwa Agama Hindu itu adalah percampuran antara kepercayaan dan agama yang dibawa bangsa Aria yang masuk ke India dan Iran kira-kira tahun 1500 sm. Penganut Hindu menempatkan hampir semua benda atau peristiwa luar biasa selalu padanya ada dewanya, seperti api dengan Dewa Agni, bulan dengan nama Dewa Candra, matahari dengan Dewa Surya atau Beruna, angin dengan Dewa Bayu, peristiwa perang dengan nama Dewa Yuda, pencabutan nyawa dengan Dewa Yama, dewi kesuburan dengan Dewi Sri, dan banyak lagi. Namun, dari sekian banyak dewa ini ada tiga dewa utama yang disebut Trimurti terdiri dari Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam dan Dewa Shiwa sebagai penghancur alam semesta. Oleh sebab itu, pemeluk Agama Hindu lebih dekat kepada ketiga dewa tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dikaitkan dengan fungsi masing-masing dewa tersebut. Ketika ingin mewujudkan sesuatu maka Dewa

Brahma yang sering disebut, ketika memelihara sesuatu maka Dewa Wisnu yang sering dipanggil, dan jika ingin menghancurkan atau memusnahkan sesuatu maka Dewa Shiwa yang sering disebutnya.

Ada empat jalan menuju Tuhan, (1) jalan menuju Tuhan melalui ilmu pengetahuan (2) jalan menuju Tuhan melalui cinta, (3) jalan menuju Tuhan melalui kerja, dan (4) jalan menuju Tuhan melalui latihan kejiwaan yang disebut Yoga. Demikian halnya ada empat tahapan kehidupan. *Tahap pertama* menurut agama Hindu adalah tahap sebagai seorang pelajar, biasanya tahap ini bermula setelah usia 12 tahun ditandai upacara inisiasi antara umur 8 dan 12 tahun dan berlangsung selama 12 tahun. *Tahap kedua*, dimulai dengan upacara perkawinan adalah tahap berumah tangga selama masa setengah hari kehidupan ini di saat kekuatan jasmani dan ruhani berada di puncaknya maka secara alamiah kepentingan serta energi diarahkan keluar. Ada tiga bidang dimana energi seseorang ini bisa berfungsi secara memuaskan yaitu dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakatnya di lingkungan asalnya. *Tahap ketiga* adalah tahap pencapaian kedewasaan. *Tahap keempat* adalah tahap usia renta dimana seseorang telah memasuki usia pensiun. Kitab suci yang dijadikan pedoman hidup mereka ialah Rech Weda, Weda Yajur Weda, Atarpa Weda.

Di dalam kehidupan masyarakat terbagi ke dalam empat kasta, (1) kasta Bramana yang terdiri dari kaum pendeta dan pemuka agama yang dianggap suci, (2) kasta Ksatria yaitu kaum bangsawan dan para penguasa, (3) Waisya yaitu para pedagang dan, (4) kasta Sudra yaitu para petani dan pekerja kasar dan kelompok yang sangat rendah kastanya sehingga tidak dimasukkan ke dalam empat kasta tersebut yaitu kasta Parea, yang terdiri dari para pengemis dan gelandangan. Masing-masing kasta ini dibatasi pergaulan antara satu kasta dengan kasta lainnya, bahkan tidak diperbolehkan terjadi perkawinan antara kasta yang berbeda.

2. Religiuitas Hindu dan Kemasam Pluralisme dalam Toleransi

Menurut Axel Michaels, ada tiga bentuk religi Hindu dan empat macam religiuitas Hindu. Pembagian agama Hindu menjadi tiga bentuk sesuai dengan metode pembagian dari India yang mengelompokkannya ke dalam: praktik ritual menurut Weda, agama rakyat dan lokal, dan sekte keagamaan:

Pertama, Hinduisme Brahmanis-Sanskritis suatu agama politeistis, ritualistis, dan kependetaan yang berpusat pada suatu keluarga besar serta upacara pengorbanan yang merujuk kepada kitab-kitab Weda sebagai keabsahannya. Agama ini mendapat sorotan utama dalam banyak risalah tentang agama Hindu karena memenuhi banyak kriteria untuk disebut sebagai agama, serta karena agama ini merupakan yang dominan di berbagai wilayah India, sebab masyarakat non-brahmana pun mencoba untuk mengasimilasinya.

Kedua, Agama rakyat dan agama suku: suatu agama lokal yang politeistis, kadangkala animistis, dengan tradisi lisan yang luas. Kadangkala bertentangan dengan Hinduisme Brahmanis-Sanskritis.

Ketiga, Agama bentukan tradisi dengan komunitas monoistis yang dibentuk untuk mencari keselamatan, biasanya menjauhkan diri dari belenggu duniawi, dan seringkali anti-Brahmanis. Agama ini dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga bagian: (1) Agama sektarian, aliran keagamaan yang menggarisbawahi konsep filosofis dari Hinduisme dan menekankan praktik religius menurut konsep tersebut, (2) Agama-bentukan sinkretis: agama tersendiri yang terbentuk dari sinkretisme antara Hinduisme dengan agama lain, contohnya Hindu-Islam (Sikretisme), Hindu-Buddha (Budhisme Newara), atau Hindu-Kristen (Neohinduisme), (3) Agama proselitistis atau "Guru-isme": kelompok keagamaan yang berawal dari seorang guru yang biasanya menekankan isu universalisme.-

Ada empat religiuitas Hindu (Michaels), yakni: *Pertama*, Ritualisme: terutama mengacu pada ritualisme Weda-Brahmanistis (*Vedic-Brahmanistic ritualism*) yang domestik dan butuh kurban, namun dapat juga meliputi beberapa bentuk Tantrisme. Ini

merupakan *karma-marga* klasik. *Kedua*, Spiritualisme berupa kesalehan intelektual, yang bertujuan untuk mencari kebebasan (moksa) bagi individu, yang biasanya dengan melalui bimbingan seorang *guru*. Hal ini merupakan karakteristik Guruisme esoterik masa kini, dan beberapa macam Tantrisme. *Ketiga*, Devosionalisme: pemujaan kepada Tuhan, seperti yang ditekankan dalam tradisi *bhakti* dan *Kresnaisme*-yang merupakan *bhakti-marga* klasik. *Keempat*, Heroisme: bentuk religiuitas *politeistis* yang berpangkal pada tradisi militeristis, seperti Ramaisme dan sebagian dari Hinduisme politis. Yang juga disebut *wirya-marga*.

Sementara itu toleransi sebagai salah satu perwujudan pluralisme di dalam Agama Hindu dalam *Konferensi Agama-Agama Dunia (1893)* di *Chicago*, *Swami Vivekananda* sebagai perwakilan Hindu mengawali pidatonya dengan salam "*Sisters and brothers of America!*" dan mendapatkan sambutan yang hangat. Ia memperkenalkan Hinduisme sebagai agama yang mengajarkan toleransi dan bersikap sangat terbuka.

Agama Hindu memiliki ciri khas sebagai salah satu agama yang paling toleran karena tiadanya skisma meskipun ada kemajemukan tradisi yang bernaung di bawah simbol-simbol keagamaan Hinduisme. Pada awal perkembangannya, saat tidak danya perselisihan antaragama, umat Hindu menganggap setiap orang yang mereka temui sebagai umat Hindu pula. Tetapi pada masa kini, umat Hindu menerima pengaruh dari Barat tentang pengadaan konversi agama, maka banyak umat Hindu berpendapat bahwa identitas kehinduan diperoleh semenjak lahir sementara yang lainnya berpendapat bahwa siapa pun yang mengikuti kepercayaan dan praktik agama Hindu merupakan seorang Hindu tanpa melihat agama resminya.

Gandhi menyatakan bahwa Hinduisme bebas dari dogma-dogma yang memaksa, serta dapat menampung berbagai bentuk ekspresi diri dalam ruang lingkup yang besar. Dalam tubuh agama Hindu, perbedaan pada setiap tradisi bahkan pada agama lain tidak untuk diperkarakan, karena ada keyakinan bahwa setiap orang

memuja Tuhan yang sama dengan nama yang berbeda, entah disadari atau tidak oleh umat bersangkutan. Dalam kitab *Regweda* terdapat suatu bait yang sering dikutip oleh umat Hindu untuk menegaskan hal tersebut, sebagai berikut: yang artinya “Hanya ada satu kebenaran, tetapi para cendekiawan menyebut-Nya dengan banyak nama.”

Agama Hindu memandang seluruh dunia sebagai satu keluarga besar yang mengagungkan satu kebenaran yang sama, sehingga agama tersebut menghargai segala bentuk keyakinan dan tidak mempersoalkan perbedaan agama maka dari itu, agama Hindu tidak mengakui konsep ***murtad, bidah,*** dan ***penghujatan.*** Agama Hindu bersifat mendukung ***pluralisme agama*** dan lebih menekankan harmoni dalam kehidupan antarumat beragama, dengan tetap mengindahkan bahwa setiap agama memiliki perbedaan mutlak yang tak patut diperselisihkan. Menurut tokoh spiritual Hindu **Swami Vivekananda**, setiap orang tidak hanya patut menghargai agama lain, namun juga merangkulnya dengan pikiran yang baik, dan kebenaran itulah yang merupakan dasar bagi setiap agama.

Dalam agama Hindu, toleransi beragama tidak hanya ditujukan pada umat agama lain, namun juga pada umat Hindu sendiri. Hal ini terkait dengan keberadaan beragam tradisi dalam tubuh Hinduisme. Agama Hindu memberikan jaminan kebebasan bagi para penganutnya untuk memilih suatu pemahaman dan melakukan tata cara persembahyangan tertentu. Sebuah seloka dalam *Bhagawadgita* sering dikutip untuk mendukung pernyataan tersebut: Yang artinya: “Jalan manapun yang ditempuh seseorang kepada-Ku, Aku memberinya anugerah setimpal. Semua orang mencari-Ku dengan berbagai jalan, wahai Arjuna.”

Dalam komunka Agama-Agama Dunia (1893) di Chicago, Vivekananda mengutip suatu ayat yang menyatakan bahwa setiap orang menempuh jalan yang berbeda-beda dalam memuja Tuhan, sebagaimana berbagai aliran sungai pada akhirnya menyatu di lautan. (*Portal agama Hindu*)

H. Agama Budha, Pluralisme Agama dan Multikulturalisme

1. Agama Budha Selayang Pandang

Agama Budha dibangun oleh Sidharta Gautama abad ke-5 Sebelum Masehi, dia adalah seorang putra dari Raja Suddodana dari kerajaan Skya. Pada usia muda Sidharta dikawinkan dengan putri Ysodharma anak pamannya dan mempunyai seorang putra bernama Rahula, namun Sidharta muda tidak tertarik pada kekuasaan dan gemerlap dunia. Dia lalu mencari kesempatan bertapa diri keluar kota saisnya. Pada saat bertapa itulah dia mendapatkan cahaya terang, pada saat bertapa di bawah pohon "budhi".

Sidharta mengajarkan dharma yaitu suatu doktrin pokok yang telah dirumuskan di dalam *Aryasetiantri pada saat Budha Gautama berada di Bonares. Ajaran dharama itu dijabarkan ke dalam delapan dharma, yaitu (1) percaya yang benar, (2) cita-cita yang benar, (3) ucapan yang benar, (4) perbuatan yang benar, (5) hidup yang benar, (6) mempelajari hukum yang benar, (7) ingatan yang benar, (8) tafakur atau semadi yang benar.* (Hasbullah Bakri, 1986: 64)

Selain ajaran tentang dharma Budha juga mengajarkan *Anitya*, bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, ajaran *anatman* segala sesuatu itu selalu berubah, ajaran *karma* ajaran reinkarnasi (fisik) bukan jiwa, ajaran *pelepasan dari dunia fana menuju "yang kekal"* ajaran *sangha* yaitu pesekutuan para rahib. Para rahib mengajarkan tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, tidak boleh meminum minuman keras, tidak boleh berbuat mesum, tidak boleh makan sebelum waktunya, tidak boleh berpesta, tidak boleh bersolek, tidak boleh tidur di atas kasur, tidak boleh menerima hadiah uang atau perhiasan. (Hasbullah Bakri, 1986: 71)

Budhisme merupakan salah satu agama utama dunia dalam hal penganut dan penyebaran secara geografis dan sosial budaya. Budhisme makin populer dan berpengaruh di dunia Barat, meskipun memiliki banyak kesamaan dengan Hinduisme di mana keduanya mengajarkan tentang karma (etika sebab akibat), Maya (natur alam yang adalah ilusi), dan Samsara (lingkaran reinkarnasi). Para

penganut Budha percaya bahwa tujuan hidup yang utama adalah mencapai "pencerahan" sebagaimana yang mereka pahami, dengan hidup samsara guna mencapai Nirwana.

Pencerahan yang ditetapkan oleh Gautama ialah "jalan tengah," bukan melalui kemewahan atau penyiksaan diri. Lagipula, dia mendapatkan apa yang kemudian dikenal sebagai "Empat Kebenaran Mulia" yaitu: 1) hidup adalah penderitaan (*Dukha*), 2) penderitaan adalah karena keinginan (*Tanha*, atau "keterikatan"), 3) seseorang dapat menghapus penderitaan dengan menghapus keterikatan, dan 4) hal ini dicapai dengan mengikuti jalan mulia delapan unsur. "Kedelapan unsur" terdiri dari memiliki: 1) pemahaman yang benar, 2) itikad yang benar, 3) perkataan yang benar, 4) perbuatan yang benar, 5) hidup yang benar (menjadi pertapa), 6) upaya yang benar (mengarahkan tenaga secara pantas), 7) perhatian yang benar (meditasi), dan 8) konsentrasi yang benar (fokus). Pengajaran-pengajaran Budha dikumpulkan dalam Tripitaka atau "tiga keranjang".

2. Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Agama Budha

Budha tidak menganggap dirinya sebagai Tuhan melainkan "juru selamat". Dalam hal teologis Budha sangat terbuka, sehingga di antara pengikutnya ada yang teistik, ateistik, panteistik dan sinkretik. Kondisi ini merupakan modal utama pluralisme agama di kalangan pengikut Budha. Jika dalam ajaran Hindu aspek teologis-etis tidak menjadi aspek utama di dalamnya, yang justru ketat dalam konteks sosial budaya dengan sistem kasta. Berbeda halnya dengan agama Budha yang justru membuka seluas-luasnya kebebasan bermasyarakat yang tidak disekat-sekat oleh strata atau kasata-kasta. Dengan kata lain keterikatan teologis yang longgar, pergaulan sosial yang terbuka tanpa strata, maka yang menjadi fokus utama adalah etika atau moral yang dikenal dengan empat kebenaran utama (*dukha*, *tanha*, *tanpa hasrat*, dan *peniadaan*) yang kemudian dikemas di dalam delapan kebenaran (*pengertian*, *maksud bicara*, *laku*, *kerja*, *ikhtiar*, *ingatan*, dan *renungan yang benar*).

Tidak ketatnya dalam sistem teologis dan ritual, serta kelonggaran dalam tata-sosial, hal ini yang membuka seluas-luasnya penerimaan pluralisme beragama. Jika di Hindu ada kasta Brahma yang dianggap paling muliya, dan kasta sudra dipandang yang paling rendah, justeru Budha menolak anggapan seperti itu. Paham demikian pada jamanya dianggap sebagai paling revolusioner, karena menantang *establishment* yang selama ini telah melembaga di dalam masyarakat. Pada perkembangannya agama Budha juga terbagai menjadi beberapa madzab yang menyebar luas terutama di kawasan Asia, atau dikenal sebagai agama timur.

I. Agama Islam Memandang Pluralisme Agama dan Multikulturalisme

1. Agama Islam Selayang Pandang

Islam adalah agawa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai Nabi terakhir untuk disebarluaskan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam di segala jaman setelah terutusnya dan tidak ada lagi Nabi setelahnya. Islam yang mengajarkan keyakinan Tuhan yang Maha Esa, tidak ada pendamping, tidak ada pembanding, tidak ada pengiring dan tidak ada padanan bagi-Nya, yang disebut dengan *tauhidullah*. Penjabaran lebih lanjut dari tauhidullah adalah sendi-sendi keimanan, yang disebut "arkanul iman" atau sendi keyakinan yang enam yaitu: 1) iman kepada Allah (yang Esa), 2) iman kepada para Malaikat, 3) iman kepada kitab-kitab Allah, 4) iman kepada para Rasul, 5) iman kepada hari akhir, dan 6) iman kepada takdir (*qodla* dan *qodar*). Pengejawantahan dari *arkanul iman* adalah *arkanul Islam*, yaitu melakukan persaksian akan keberadaan Allah dan kerasulan Muhammad saw, menjalankan sholat (lima waktu), membayarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadlan dan pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Lima bentuk pegnejawantahan dari iman ini juga disebut "Ibadah"

Ajaran lain yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam adalah Ihsan, yaitu pelaksanaan *arkanul iman* dan *arkanul islam* secara konsisten dan istiqomah. Ihsan juga dikenal dengan istilah amal sholih, atau amaliyah ibadah yang ikhlas dan sadar diri bahwa apa yang dilakukan itu dalam pengawasan Allah dalam segala bentuk dan gerak-gerik manusia, baik perkataan, perbuatan, maupun kata hati (HR. Muslim dalam Annwawi, 2007: 23-25)

Ketiga landasan dasar di dalam ajaran Islam ini tidak berarti menghasikan ajaran yang lain, melainkan ketiga anasir tersebut merupakan landasan fundamental dan sekaligus menjiwai seluruh ajaran-ajaran lainnya, termasuk dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, keilmuan dan peradaban serta aspek kehidupan lainnya. Dengan bahasa agamawi diistilahkan dengan *kaffatan linnaas*, untuk seluruh umat manusia, *hudan linnaas* sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan *rahmatan lil aalamien* yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.

Kitab suci agama Islam adalah Al-Qur'an, sebagai sumber hukumnya di samping Al-Qur'an adalah Al-Hadits, yang berfungsi sebagai penafsiran, penjelasan maupun pemerincian atas ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global. Al-Qur'an diyakini sebagai wahyu yang diturunkan Allah melalui Malaikat Jibril kepada Muhammad saw sebagai petunjuk, pedoman hidup serta mu'jizat bagi kerisalahan Muhammad. Al-Quran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di seluruh alam semesta di berbagai jaman hingga hari kiamat (Joesoef Souya'yb, 1996: 401).

Demikian halnya kenabian Muhammad merupakan Nabi dan Rasul Pamungkas, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlaq umat manusia dan sebagai rahmat alam semesta. Apa yang keluar dari nabi dianggap sebagai sumber hukum yang kedua, yang disebut dengan al-Hadits atau as-Sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan, sikap dan keinginan Nabi menjadi sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Sumber Hukum yang ketiga adalah Ijtihad, yaitu akurasi dan aktualisasi seluruh potensi insani untuk menamatkan kepastian hukum jika

secara eksplisit tidak ditemukan oleh seorang Mujtahid di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Perjuangan nabi dalam menyiarkan Islam cukup mendapat tantangan sengit dari orang kafir Quraisy, sehingga beliau harus mengalami hijrah tiga kali, yaitu ke Thaif, ke Habsyah dan yang terakhir adalah ke Madinah, yang semula bernama Yatsrib. Hijrahnya yang terakhir ini membawa perubahan yang sangat radikal-fundamental, dengan perubahan dari masyarakat yang berakidah sesat berganti pada akidah *tauhidullah*, dari masyarakat yang tidak bermoral dan tak kenal hukum menjadi masyarakat yang tertib moral dan tertib hukum. Dan yang jauh lebih fenomenal ialah mengubah Yatsrib menjadi Madinah yang beradab, berpemerintahan dan bernegara yang demokratis, negara yang dihuni oleh berbagai macam etnis, keyakinan dan komunitas-komunitas yang beraneka ragam menjadi satu negara demokratis di bawah undang-undang yang bernama Piagam Madinah dengan "kepala negara" seorang Nabi dan Rasul yang membebaskan manusia dari segala kejahatan, keburukan dan kegelapan menuju cahaya kebenaran dengan Islam.

Jika di Makkah sebelum hijrah Muhammad lebih menekankan pada pelurusan akidah dan akhlaq, sedangkan di Madinah disempurnakan dengan tata-kemasyarakatan, tata tertib hukum, tata demokrasi, dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang "demokratis, pluralistik, humanis" di bawah ruh Islam.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw kekhalifahan dilanjutkan oleh para Khulafaurrasyidin yaitu; Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aly. Setelah berakhirnya masa khulafaurrasyidin, kekuasaan khilafah berpindah-pindah dari Dinasti Umayyah bergulir ke Dinasti Bani Abbasiyah, dan belahan Eropa muncul lagi Dinasti Umayyah di Meshir Daulat Fathimiyah dan Turki dikenal dengan Turki Utsmani. Dengan meluasnya wilayah kekhalifahan Islam yang juga diperintah oleh berapa khalifah ini dibarengi dengan meluasnya faham-paham keagamaan.

Di dalam hukum Islam ada empat madzab besar yang dipimpin oleh para mujtahid besar, yaitu Syafii, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Demikian juga di alam teologi muncul berbagai aliran dengan tokoh besarnya Wahil bin Atha, Abu Hasan Al-Asyari, Abu Manshur Al-Maturidi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan kemudian disusul oleh para filosof besar dan dikenang sepanjang jaman seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Ruyd, Ibnu Shina, Al-Gozaly yang karya-karyanya sampai sekarang masih menjadi acuan utama. Selain teologi, hukum, filsafat yang sempat mewarnai dunia Islam Ilmu Tasauf sebagai pengetahuan dan pengamalan mistik di dalam Islam juga berkembang pesat.

Masa keemasan kekhalifahan Islam ini berakhir dengan kejayaan bangsa Mongolia di bawah Jengiskhan yang melakukan penyerbuan ke negara-negara Islam. Oleh karena itu, secara politis berat untuk bangkit kembali maka umat Islam menghidupkan gerakan di bawah tanah dengan thoriqah, atau amaliyah kesufian, bukan lagi melalui jalur politik. Di antara thariqah yang terkenal adalah Thariqah Naqshabandiyah, Qadariyah, Maulawiyah, Rifaiyah, Sadzaliyah dan Akbaryah dan masih banyak lagi (Joesoef Sou'yib, 1996: 444-450)

BAB 4

MULTIKULTURALISME SEBAGAI SUATU KENISCAYAAN

A. Mengapa Multikulturalisme ada?

Multikulturalisme mengakui adanya keragaman etnik dan budaya, agama dan tradisi masyarakat suatu bangsa, agar masing-masing saling menyesuaikan diri atas norma maupun kebiasaan yang dikonsolidasikan dan dihasilkan melalui pranata nasional, apakah melalui pendidikan maupun sistem hukum. Jika pluralisme merupakan pengakuan realitas kebhinnekaan yang mewujudkan ke dalam co-eksistensi, toleransi dan demokrasi, maka multikulturalisme lebih menekankan pada pengakuan keragaman etnik, budaya, agama dan tradisi untuk saling menyesuaikan diri.

Dalam hal multikulturalisme yang dimaknai dengan kemajmukan budaya, yang kemudian melahirkan toleransi antara agama dan kerukunan antarumat beragama di kalangan para penganut berbagai agama. Terlebih ketika ruang gerak kebudayaan jauh lebih lebih terbuka dari pada masalah akidah dan ibadah. Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat-formal dalam menjalankan keimanan dan peribadatan, tidak ada kata toleransi di dalamnya kecuali membiarkan masing-masing pemeluk agama menjalankan keimanan dan peribadatnya masing-masing sesuai kepercayaan mereka (QS. Al-Kafirun: 6).

Sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadits, bahwa Allah telah menggariskan yang wajib agar tidak disia-siakan, telah menetapkan yang haram agar tidak melanggarnya, dan Allah telah tentukan ketentuan-ketentuan yang tegas jangan melampaui batas ketentuan itu. Dan, yang menarik adalah bahwa Allah tidak "mencampuri" di luar yang tiga perkara tersebut bukan karena Allah lupa, melainkan memberikan kasih-sayang seluas-luasnya

kepada seluruh umat manusia untuk menjalankannya, sebagai rahmat. Termasuk di antaranya adalah perilaku budaya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan peribadatan (HR. Ibnu Dafi'q dalam An-Nawawi, 2007).

Pemahaman tentang rahmat bagi alam semesta, tidak dibatasinya ruang gerak di luar "sistem keimanan dan ibadah khusus" memberikan makna yang dalam bahwa Islam memberikan keleluasaan melakukan kegiatan budaya. Akibatnya budaya Islam di berbagai kawasan berbeda tampilannya, sesuai dengan muatan budaya lokal atau nasional di mana Islam itu dipeluk oleh para penganutnya.

B. Hakekat Multikulturalisme

Pada hakekatnya multikulturalisme adalah suatu keniscayaan pada setiap kelompok masyarakat yang ada. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Faktor geografis, faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat (multikultural). 2. Pengaruh budaya asing, mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural, karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan terpengaruh pola pikir (*mind set*) mereka dan menjadikan perbedaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. 3. Kondisi iklim yang berbeda, maksudnya hampir sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah akan menimbulkan perbedaan-perbedaan.

Abad XXI ini diperkirakan mengalami transformasi dalam segala aspek kehidupan manusia. Proses transformasi itu dapat dirangkum dengan istilah globalisasi. Pengertian umum globalisasi merupakan yang baru masuk kajian dunia universal pada tahun 80-an, pertamanya merupakan suatu pengertian sosiologis yang dicetuskan oleh Roland Robertson dari Uniniversity of Pittsburgh. (Tilaar, 1997)

Seiring dengan isu globalisasi yang tengah mencuat, isu tentang multikulturalisme juga mendampingi pada tahun 1980-an di Kanada. Menurut Kamus Longet Oxford Dictionary istilah "*multiculturalism*" merupakan derivasi dari kata "*multicultural*". Kamus ini menyitir kalimat dari surat kabar Kanada, Montreal Times yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multicultural dan multilingual.

Melani Budianta (2003) menyatakan multikulturalisme diawali munculnya teori *melting pot* yang diwacanakan oleh J. Hector St. John De Crevecoeur seorang imigran asal Normandia di Amerika yang menggambarkan bercampurnya berbagai manusia dari latar belakang berbeda menjadi bangsa baru "Manusia baru". Namun, bagaimanapun juga konsep *melting pot* masih menunjukkan perspektif yang bersifat monokultur, karena acuan atau "ctakan budaya" yang dipakai untuk "melelehkan" berbagai asal budaya tersebut mempunyai perspektif yang secara umum diwarnai oleh kelompok kulit putih, berorientasi budaya *Anglo-Saxon* dan Kristen Protestan (*White Anglo Saxon Protestan - WASP*) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa.

Ketika komposisi etnik Amerika kian beragam disertai budayanya, maka teori *melting pot* kemudian dikritik dan muncul teori baru dengan nama *salad bowl* sebagai sebuah teori alternative yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dan membangun budaya baru yang dibangun dalam keberagaman, teori *salad bowl* tidak menghilangkan budaya asal, tetapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika.

Dengan berbagai teori di atas, Bangsa Amerika berupaya mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun, pada decade 1960-an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok kulit hitam tidak kunjung mendapatkan kesetaraan hak secara social dan politik. Gerakan masyarakat sipil ini kemudin diikuti oleh kaum perempuan apad

atahun 1970-an dan “kaum kulit berwarna” lainnya. Atas dasar itulah berkembang *multiculturalism* pada awal 1980-an.

Multikulturalisme berkaitan pula dengan epistemologi. Berbeda dengan epistemology filsafat yang memberikan arti asal usul ilmu pengetahuan, multikulturalisme dalam epistemology ilmu social mempunyai makna yang berbeda. Dalam epistemologi social, tidak ada kebenaran yang mutlak. Hal itu berarti berilmu pengetahuan selalu mengandung arti nilai. Di dalam suatu masyarakat, yang benar adalah yang baik bagi masyarakat, yang benar tidak mendahului yang baik.

Pengertian multikulturalisme menurut Tilaar (2004) dapat dibedakan sebagai pengertian tradisional multikulturalisme yang disebut juga gelombang pertama aliran multikulturalisme mempunyai dua ciri utama, yaitu *pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), dan *kedua* legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya.

Di dalam gelombang pertama multikulturalisme baru mengandung hal-hal esensial dalam perjuangan perlakuan budaya terhadap yang berbeda (*the other*). Dalam tahap perkembangan selanjutnya yang disebut gelombang kedua, multikulturalisme telah menampung berbagai jenis pemikiran baru, di antaranya *pertama*, pengaruh *cultural studies*. *Cultural studies* antara lain melihat secara praktis dan kritis masalah-masalah esensial di dalam kebudayaan kontemporer seperti identitas kelompok, distribusi kekuasaan, peranan kelompok marjinal, feminisme, dan toleransi antarkelompok dan agama.

Kedua, Multikulturalisme juga mendapat pengaruh pos-kolonialisme. Pemikiran pos-kolonial melihat kembali hubungan antara eks penjajah (*the colonizer*) dengan daerah jajahannya (*the colonized*) yang telah banyak meninggalkan stigma perendahan kaum terjajah. Pandangan-pandangan pos-kolonialisme antara lain ingin mengungkit kembali nilai-nilai *indigenous* di dalam budaya

sendiri dan berupaya melahirkan kembali kebanggaan terhadap budaya asing.

Pengertian multikulturalisme sendiri kini berarti telah mengalami banyak perubahan dan arah yang lebih beragam tanpa menghindarkan diri dari era masyarakat terbuka, hidup di dalam suatu dunia dan bertanggung jawab bersama atas keselamatannya. Pengalaman keberhasilan menerapkan multikultural dalam sebuah kebijakan Negara dapatlah menengok Kanada. Sejak 1972, didirikanlah Kementerian Negara untuk Urusan Multikulturalisme dan pada tahun 1982, multikulturalisme dimasukkan dalam undang-undang sebagai bagian dari *Canadian Charter of Rights and Freedoms*.

Indonesia sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Azra (2003) menyadari keragaman etnik dan budaya masyarakatnya. Sekalipun Indonesia sebuah Negara yang memiliki keragaman etnik, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi, gagasan besar tersebut kemudian tenggelam dalam sejarah dan politik "keseragaman budaya" di zaman Soekarno dan Soeharto.

Pembentukan masyarakat multicultural di Indonesia yang sehat menurut Azra tidak secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya, harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang paling strategis dalam hal ini adalah melalui pendidikan multicultural yang disenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas. Urgensi pendidikan multicultural dirasakan mendesak bagi Negara majemuk seperti Indonesia ini.

Pengaruh *ketiga*, globalisasi yang ternyata telah melahirkan budaya global yang memiskinkan budaya-budaya asli. Untuk itu timbul upaya menentang globalisasi dengan melihat kembali peranan keragaman budaya di masyarakat. Revitalisasi budaya

lokal dipandang mampu mengimbangi globalisasi yang mengarah kepada monokultur budaya dunia.

Keempat, feminisme dan pos-feminisme. Gerakan feminisme yang semula berupaya mencari kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki meningkat ke arah kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan bukan hanya menuntut penghargaan yang sama dengan laki-laki, tetapi juga sebagai mitra sejajar dalam melaksanakan semua tugas dan pekerjaan di dalam masyarakat.

Kelima, pos-strukturalisme. Pandangan ini mengemukakan perlunya dekonstruksi dan rekonstruksi masyarakat yang telah mempunyai struktur mapan yang biasanya hanya untuk melanggengkan struktur kekuasaan yang ada.

Multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Ada beberapa pandangan mengenai multikulturalisme ini di antaranya adalah:

- “Multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007)
- Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan (“A Multicultural society, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conception of the world, system of [meaning, values, forms of social organizations, histories, customs and practices”]; Parekh, 1997 yang dikutip dari Azra, 2007).

- Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Lawrence Blum, dikutip Lubis, 2006:174)
- Sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Suparlan, 2002, merangkum Fay 2006, Jari dan Jary 1991, Watson 2000)
- Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut (A. Rifai Harahap, 2007, mengutip M. Atho' Muzhar).

C. Multikulturalisme dalam Persepsi Tokoh Agama

1. Pemuka Agama Hindu Memandang dan Menyikapi Multikulturalisme

Perbedaan etnis, bangsa, bahasa, adat-istiadat dan agama merupakan suatu realitas, dan sekaligus sebagai kekayaan bangsa Indoensia sebagai pengejawantahan dari Bineka Tunggal Ika. Jika ada pemeluk agama lain yang merayakan hari besarnya, selama tidak mengganggu keimanan dan sistem peribadatan kita, silahkan saja. Namun, jika upacara agama lain itu menimbulkan gangguan keyakinan dan peribadatan kita, maka sebaiknya hal itu dihindari.

Dalam hal perbedaan tradisi, budaya, seni dan tatanan sosial mesti diakui, sejauh tidak mengganggu nilai-nilai ajaran yang kita yakini, boleh saja kita bersama pemeluk agama lain untuk melakukan kegiatan budaya. Di samping kita mengakui budaya masing-masing agama mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda. Di Indonesia ini ada beberapa budaya Hindu yang diadopsi oleh umat Islam misalnya kesenian wayang, penghormatan kepada leluhur yang di dalam Islam juga dilakukan.

Perbedaan jender, suku bangsa, bahasa, tradisi, kebiasaan, upacara dan kegiatan seni budaya yang dilakukan oleh berbagai agama dan masyarakat yang berbeda-beda tidak ada alasan untuk mengelaknya. Hal itu juga mendukung terhadap kebersamaan dan memperkaya budaya Nusantara. Perbedaan seni-budaya, tradisi, upacara adat dan sebagainya sebaiknya tetap dipertahankan, apalagi jika tradisi itu menguatkan tradisi keagamaan umat Hindu.

Masing-masing budaya mempunyai keunikan tersendiri, sehingga tidak serta-merta kebudayaan ini lebih baik dari pada yang lainnya dan sebagainya. Dalam hal multikulturalisme sebaiknya masyarakat bersama pemerintah memberikan dukungan pemeliharaan dan pengembangannya.

Multikulturalisme bukan masalah yang harus dipermasalahkan atau diperbincangkan bertele-tele, karena itu bersifat keduniaan dan tidak menyangkut akidah maupun ibadah, berbeda halnya dengan pluralisme agama yang menyentuh ranah keagamaan yang harus disikapi secara lebih berhati-hati, dari pada menyikapi perbedaan kebudayaan (multikulturalisme). Multikulturalisme tidak termasuk dalam prioritas fatwa MUI, sehingga tidak sesensitif pluralisme agama.

Multikulturalisme sangat erat hubungannya dengan “Binneka Tunggal Ika”, bahkan di dalam multikulturalisme itu terkandung makna ajaran binneka tunggal ika yang sesungguhnya. Untuk membekali siswa tentang keberagaman Nusantara maka perlu para siswa itu diberikan materi ajar Multikulturalisme secara profesional dan proporsional, bukan untuk kepentingan politik penguasa. Di samping menghidupkan budaya yang berbasis kedaerahan, sebaiknya juga dikembangkan kebudayaan yang berbasis pada agama.

Seseorang yang belum pernah mendatangi upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh pemeluk agama lain tidak menjadi persoalan. Sebab, khawatir disalahtafsirkan oleh umat. Jika undangan itu yang bersifat pribadi, atau pergaulan sesama

warga, maka tidak ada halangan untuk mengikutinya. Misalnya undangan syukuran, undangan perkawinan dan lain-lain. Hari raya agama atau upacara keagamaan perlu dipertahankan karena hal itu memperkaya khazanah budaya bangsa, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan adat ketimuran.

Perlu adanya forum yang sering mempertemukan antar pemeluk agama, seperti diskusi budaya, pameran dan karnaval budaya yang juga dihadiri oleh para pemuka agama, bukan dalam rangka membandingkan dan menyaingkannya melainkan bertukar pikiran tentang bagaimana pemeliharaan dan pengembangannya. Mencari titik kesamaan dan mengeliminasi perbedaan dalam praktek berbudaya, sehingga pada saatnya bisa menjadi satu warna budaya.

Jika kebudayaan itu berbasiskan agama, maka tidak ada salahnya pemeluk agama yang bersangkutan yang mengembangkannya, tanpa menutup kemungkinan sumbangsih dari pemikiran pemeluk agama lain. Semua tradisi budaya agama yang berbeda itu biarkan masing-masing bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Mungkin suatu waktu perlu ada tampilan kebudayaan secara bersama antar budaya yang berbasis agama. Mendukung keanekaragaman bahasa, suku bangsa, tradisi dan adat-istiadat yang berasal dari agama yang berbeda. Dalam hal ini Binneka Tuggal Ika akan semakin menampilkan dirinya. Memang ada keinginan untuk saling mempelajari, dan kemudian mengadopsi tradisi, upacara atau peristiwa budaya dari pemeluk agama lain.

2. Pemuka Agama Budha Memandang dan Mensikapi Pluralisme Agama dan Multikulturalisme

Data dan Informasi tentang Budhisme ini dilakukan wawancaranya dengan Ibu Munita, salah seorang pemuka agama Budha di Vihara Kota Bandung. Menurut dia bahwa pluralisme agama dalam arti menyamakan semua ajaran agama dalam segala hal, termasuk paham semua agama benar dan sama-sama nanti semua pemeluk agama berdampingan di surga, merupakan paham yang wajar saja dan tidak menyesatkan dan tidak bertentangan dengan

esensi ajaran Islam. Budha lebih menekankan kepada dharma yang benar, berpengetahuan, berpikir, berbicara, berbuat, dan bekerja secara benar, itu jauh lebih penting dari pada membicarakan pluralisme agama. Pluralisme yang menganggap semua agama sama benarnya, adalah sebuah kewajaran dan tidak ada unsur penyelewengan keimanan umat Budha. Pluralisme dalam pengertian ini tidak dipermasalahkan dikaitkan dengan keyakinan umat Budha. Meskipun demikian Budha mengakui adanya keberagaman agama, dan umat Budha akan selalu memelihara kedamaian dan kerukunan. Bahkan kebersamaan meskipun menyentuh masalah akidah dan ibadah, misalnya dalam program sosial-ekonomi, kemasyarakatan bisa direalisasikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan ibadah keyakinan agama. Budha tidak mementingkan tata-cara peribadatan. Namun, yang lebih penting adalah bermoral baik, berbudi mulya.

Adanya perbedaan antaragama adalah sebuah kenyataan, dan masing-masing mempunyai eksistensinya sendiri. Adanya saling mengakui eksistensinya, sesuai kebenaran masing-masing agama. Oleh sebab itu, Budha mengakui keberadaan di luar ajaran Budha itu sendiri selama tidak membenarkan atau mengakui kebenaran ajaran agama lain, terutama dalam bidang akidah dan ibadah. Kedamaian dan kerukunan tidak terhalang adanya keyakinan dan peribadatan yang berbeda.

Tidak mungkin meniadakan perbedaan, perbedaan itu akan selalu ada selama kehidupan itu ada. Yang penting bukan menghilangkan perbedaan, akan tetapi bagaimana mengelola perbedaan itu tidak menjadi ajang konflik, melainkan menunjukkan keanekaragaman yang bisa diperemukan dalam kedamaian dan kerukunan.

Memang benar bahwa agama yang saya yakini kebenarannya adalah agama Budha, tanpa harus menyinggung "kebenaran" yang diyakini oleh agama lain. Pluralisme agama tidak ada masalah jika dimaknai penyamaan kebenaran semua agama, melainkan pengakuan atas realitas keberagaman agama itu sebagai sebuah

realitas. Karena itu menyamakan semua agama dalam segala hal adalah pekerjaan yang sia-sia. Karena masing-masing mempunyai keyakinannya sendiri tentang kebenaran menurut agamanya. Jika toh kebetulan ada aspek sosial atau moral yang sama, hal itu nampak pada pengejawantahan nilainya bukan pada nilai asasi atau sumber kitab sucinya yang sama.

Pluralisme agama semestinya didefinisikan sebagai pengakuan realitas keberagaman agama, tapi tidak menutup kemungkinan penyamaan semua ajaran agama. Pluralisme bisa saja dipahami sebagai paham yang mengupayakan agar semua agama mengakui kebenaran keimanan dan peribadatan agama lain, akan tetapi pluralisme semestinya dimaknai sebagai pengakuan bahwa pemeluk agama lain mempunyai hak yang sama untuk menjalankan keyakinan dan peribadatan sendiri.

Adanya salah persepsi kebanyakan umat beragama ini seolah pluralisme itu merupakan upaya penyatuan semua agama dalam satu sistem keyakinan atau satu sistem peribadatan yang dipadukan. Padahal makna asli pluralisme itu adalah saling adanya pengakuan akan kebenaran masing-masing, pengakuan akan keberagaman. Tidak diperbolehkan jika pluralisme itu berarti penyamaan kebenaran semua agama sehingga kemungkinan adanya peribadatan bersama antar agama. Misalnya melaksanakan ibadah bersama pemeluk agama lain, jika kebersamaan itu dalam hal yang nonkeimanan dan nonperibadatan, maka sebaiknya kita diperkenankan untuk melakukannya, sebatas tidak disalahgunakan untuk kepentingan agama lain, dan boleh dilakukan sebatas ama-sama anggota masyarakat.

Mempertahankan keyakinan kami sebagai umat Budha, dan tentu pemeluk agama lain juga berhak untuk memepertahankan keyakinannya. Mengakui kebenaran yang diyakini oleh agama masing-masing, sesuai keyakinan mereka. Memang kami menganggap orang yang tidak seagama itu sebagai pemeluk agama lain, namun dalam kepentingan kedamaian dan kerukunan

antarumat beragama tidak disampaikan kepada pemeluk agama lain secara provokatif yang menjurus kepada konflik.

Untuk menanggulangi konflik antar pemeluk agama, memang perlu diadakan berbagai macam forum kebersamaan, misalnya diskusi antar agama dengan pemahaman agama masing-masing secara mendalam, dan sikap kedewasaan beragama. Dalam hal ada kesamaan dalam kehidupan dan kegiatan sosial, sebaiknya dirumsukan bersama, sehingga benar-benar program ini akan melahirkan kerja sama antara agama yang membuahkan kedamaian dan kerukunan bersama. Misalnya ketika membantu orang yang terkena bencana alam, musibah kebakaran tanpa melihat apa pun agamanya secara bersama-sama memberikan pertolongan. Forum pertemuan, program kerja sama dan bentuk lain yang mendukung kedamaian dan kerukunan antar agama menjadi program bersama atau masing-masing agama mencanangkannya.

Jika ada gagasan untuk menyatukan kitab suci dalam satu jilid, menyatukan tempat ibadah, doa bersama atau kegiatan ibadah, tidak ada masalah selama ada kesepakatan antar pemeluk agama yang berbeda tersebut, selama hal itu tidak akan membingungkan umat, seolah menyamakan semua peribadatan dari agama yang berbeda-beda. Toleransi antar umat beragama sangat diperlukan, yaitu dengan cara tidak intervensi keimanan dan peribadatan mereka. Menghormati keyakinan dan peribadatan mereka, meskipun kita tidak sepaham tentang kebenaran yang mereka lakukan.

Perbedaan etnis, bangsa, bahasa, adat-istiadat dan agama merupakan suatu realitas, dan sekaligus sebagai kekayaan bangsa Indonesia sebagai pengejawantahan dari Bineka Tunggal Ika. Jika ada pemeluk agama lain yang merayakan hari vesarnya, selama tidak mengganggu keimanan dan sistem peribadatan kita silahkan saja. Namun jika upacara agama lain itu menimbulkan gangguan keyakinan dan peribadatan kita, maka sebaiknya hal itu dihindari.

Dalam hal perbedaan tradisi, budaya, seni dan tatanan sosial mestinya diakui, dan sejauh tidak mengganggu nilai-nilai ajaran yang kita

yakini, boleh saja kita bersama pemeluk agama lain untuk melakukan kegiatan budaya. Di samping kita mengakui budaya masing-masing agama mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda.

Perbedaan jender, suku bangsa, bahasa, tradisi, kebiasaan, upacara dan kegiatan seni budaya yang dilakukan oleh berbagai agama dan masyarakat yang berbeda-beda tidak ada alasan untuk mengelaknya. Hal itu juga mendukung terhadap kebersamaan dan memperkaya budaya Nusantara. Perbedaan seni-budaya, tradisi, upacara adat dan sebagainya sebaiknya tetap dipertahankan, apalagi jika tradisi itu menguatkan tradisi keagamaan umat Islam.

Masing-masing budaya mempunyai keunikan tersendiri, sehingga tidak serta-merta kebudayaan ini lebih baik dari pada yang lainnya dan sebagainya. Dalam hal multikulturalisme sebaiknya masyarakat bersama pemerintah memberikan dukungan pemeliharaan dan pengembangannya.

Multikulturalisme bukan masalah yang harus dipremasalahkan atau diperbincangkan bertele-tele, karena itu bersifat keduniaan dan tidak menyangkut akidah maupun ibadah, berbeda halnya dengan pluralisme agama yang menyentuh ranah keagamaan yang harus disikapi secara lebih berhati-hati, dari pada menyikapi perbedaan kebudayaan (multikulturalisme). Multikulturalisme tidak termasuk dalam prioritas fatwa Islam, sehingga dan tidak sesensitif pluralisme agama.

Multikulturalisme sangat erat hubunannya dengan Bineka Tunggal Ika, bahkan di dalam multikulturalisme itu terkandung makna ajaran bineka tunggal Ika yang sesungguhnya. Untuk membekali siswa tentang keberagaman Nusantara maka perlu para siswa itu diberikan materi ajar Multikulturalisme secara profesional dan proporsional, bukan untuk kepentingan politik penguasa. Di samping menghidupkan budaya yang berbasis kedaerahan, sebaiknya juga dikembangkan kebudayaan yang berbasis pada agama.

Belum pernah mendatangi upacara kegamaan yang diselenggarakan oleh pemeluk agama lain. Khawatir jika

disalahtafsirkan oleh umat. Jika undangan itu yang bersifat pribadi, atau pergaulan sesama warga, maka tidak ada halangan untuk mengikutinya. Misalnya undangan syukuran, undangan perkawinan. Hari raya agama atau upacara keagamaan perlu dipertahankan karena hal itu memperkaya khazanah budaya bangsa, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan adat ketimuran.

Perlu ada forum kebersamaan antar umat beragama, seperti melalui diskusi budaya yang juga dihadiri oleh para pemuka agama, bukan dalam rangka membandingkan dan menyaingkannya melainkan bertukar pikiran tentang bagaimana pemeliharaan dan pengembangannya. Mencari titik kesamaan dan mengeliminasi perbedaan dalam perbedaan praktek berbudaya, sehingga pada saatnya bisa menjadi satu warna budaya.

3. Pemuka Agama Islam Memandang dan Menyikapi Pluralisme Agama dan Multikulturalisme

Data penelitian yang diambil dari para pemuka agama Islam dipilih dari kalangan Majelis Ulama Indoensia Kota Bandung dengan mengambil Ketua dan Sekretaris MUI Kota Bandung, Pimpinan Nahdlatul Ulama yaitu ketua Nahdlatul Ulama Kota Bandung, Pimpinan Mhammadiyah Koata Bandung dan Ketua Pengurus Daerah Persatuan Islam. Dalam wawancara ini dilakukan pada tempat yang berbeda namun dengan materi yang kurang lebih sama. Demikian halnya pandangan dan sikap dari para pemuka agama Islam ini hampir semuanya sama, yang berbeda hanya masalah implementasinya. Oleh sebab itu, tidak dipaparkan secara rinci satu-persatu dari masing-masing pemuka Ormas Islam ini, kecuali beberapa hal yang bersifat spesifik dan terdapat perbedaan.

Data yang diperoleh lalu dirangkum di dalam sub-bab ini yang berisi intisari dari hasil wawancara. Bahkan secara redaksional dan sistematika dengan hasil wawancara dari pemuka lain mempunyai alur pikir dan sistematika yang sama, dengan hasil yang di dalamnya terdapat banyak persamaan, di samping juga beberapa hal yang menyangkut akidah dan peribadatan yang terdapat pandangan

yang berbeda. Kesamaan redaksional ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan, meskipun diakui penyusunan kalimat agak menjenuhkan karena redaksi yang kurang lebih sama, dengan materi pandangan dan sikap yang ada perbedaan di samping persamaan.

Para pemuka Agama Islam yang diwakili oleh Ketua Majelis Ulama Kota Bandung memandang bahwa pluralisme agama dalam arti menyamakan semua ajaran agama dalam segala hal, termasuk paham semua agama benar dan sama-sama nanti semua pemeluk agama berdampingan di surga, merupakan paham yang menyesatkan dan bertentangan dengan esensi ajaran Islam. Pluralisme yang menganggap semua agama sama benarnya, adalah sebuah penyelewengan keimanan umat Islam. Pluralisme dalam pengertian ini tidak sesuai dengan keyakinan umat Islam. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2005 (Fatwa MUI No. 7/MUNAS-VIII/MUI/11/2005) yang menetapkan bahwa pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama bertentangan dengan ajaran Islam dan harus ditolak. Meskipun demikian Islam mengakui adanya keberagaman agama, dan Islam tetap memelihara kedamaian dan kerukunan. Bahkan kebersamaan yang tidak menyangkut akidah dan ibadah, misalnya dalam program sosial-ekonomi, kemasyarakatan bisa direalisasikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan ibadah serta keyakinan agama.

Sikap yang berbeda dalam hal ini ialah adanya sikap yang tegas dari Persatuan Islam, sehingga tidak pernah mengikuti forum bersama ini. Berbeda dengan NU yang lebih aktif berpartisipasi di dalam forum-forum kerukunan umat beragama. Meskipun kedua Ormas Islam ini sama dalam pandangannya terhadap pluralisme agama ini menganggap suatu pemikiran yang sesat.

Adanya perbedaan antar agama adalah sebuah kenyataan, dan masing-masing mempunyai eksistensinya sendiri. Adanya saling mengakui eksistensinya, sesuai kebenaran masing-masing agama Al-Qur'an memberikan pengakuan akan keanekaragaman itu. Oleh sebab itu, Islam mengakui keberadaan keimanan lain di luar Islam

selama tidak membenarkan atau mengakui kebenaran ajaran agama lain, terlebih dalam bidang akidah dan ibadah. Kedamaian dan kerukunan tidak terhalang adanya keyakinan dan peribadatan yang berbeda.

Tidak mungkin meniadakan perbedaan, perbedaan itu akan selalu ada selama kehidupan itu ada. Yang penting bukan menghilangkan perbedaan, akan tetapi bagaimana mengelola perbedaan itu tidak menjadi ajang konflik, melainkan menunjukkan keanekaragaman yang bisa dipertemukan dalam kedamaian dan kerukunan.

Memang benar bahwa agama yang diyakini umat Islam tentang kebenarannya adalah agama Islam, tanpa harus menyinggung "kebenaran" yang diyakini oleh agama lain. Pluralisme agama hendaknya tidak dimaknai penyamaan kebenaran semua agama, melainkan pengakuan atas realitas keberagaman agama itu sebagai sebuah realitas. Karena itu menyamakan semua agama dalam segala hal adalah pekerjaan yang sia-sia. Karena masing-masing mempunyai keyakinannya sendiri tentang kebenaran menurut agamanya. Jika toh kebetulan ada aspek sosial atau moral yang sama, hal itu nampak pada pengejawantahan nilainya bukan pada nilai asasi atau sumber acuan kitab sucinya yang sama.

Pluralisme agama semestinya didefinisikan sebagai pengakuan realitas keberagaman agama, bukan penyamaan semua ajaran agama. Pluralisme jangan dipahami sebagai paham yang mengupayakan agar semua agama mengakui kebenaran keimanan dan peribadatan agama lain, akan tetapi pluralisme semestinya dimaknai sebagai pengakuan bahwa pemeluk agama lain mempunyai hak yang sama untuk menjalankan keyakinan dan peribadatannya sendiri.

Adanya salah persepsi kebanyakan umat beragama ini seolah pluralisme itu merupakan upaya penyatuan semua agama dalam satu sistem keyakinan atau satu sistem peribadatan yang dipadukan. Padahal makna asli pluralisme itu adalah saling adanya pengakuan akan kebenarannya masing-masing, pengakuan akan keberagaman.

Tidak setuju jika pluralisme itu berarti penyamaan kebenaran semua agama sehingga kemungkinan adanya peribadatan bersama antar agama. Misalnya melaksanakan ibadah bersama pemeluk agama lain. Jika kebersamaan itu dalam hal yang non-keimanan dan non-peribadatan, maka sebaiknya kita diperkenankan untuk melakukannya, sebatas tidak disalahgunakan untuk kepentingan agama lain, dan boleh dilakukan sebatas sama-sama anggota masyarakat.

Mempertahankan keyakinan kami sebagai muslim, dan tentu pemeluk agama lain juga berhak untuk memertahankan keyakinannya. Mengakui kebenaran yang diyakini oleh agama masing-masing, sesuai keyakinan mereka. Memang kami menganggap orang yang tidak seagama itu sebagai kafir, namun dalam kepentingan kedamaian dan kerukunan antarumat beragama tidak disampaikan kepada pemeluk agama lain secara provokatif yang menjurus kepada konflik. Jika toh ada sebutan kafir di dalam Al-Qur'an sebaiknya hanya disampaikan pada pemeluk agama yang sama (muslim).

Untuk menanggulangi konflik antar pemeluk agama, memang perlu diadakan forum kebersamaan, selama tidak menyangkut masalah keimanan dan peribadatan. Semisal forum diskusi antar agama dengan pemahaman agama masing-masing secara mendalam, dan sikap kedewasaan beragama. Dalam hal ada kesamaan dalam kehidupan dan kegiatan sosial, sebaiknya dirumuskan bersama, sehingga benar-benar program ini akan melahirkan kerja sama antar agama yang membuahkan kedamaian dan kerukunan bersama. Misalnya ketika membantu orang yang terkena bencana alam, musibah kebakaran tanpa melihat apa pun agamanya secara bersama-sama memberikan pertolongan. Forum pertemuan, program kerja sama dan bentuk lain yang mendukung kedamaian dan kerukunan antar agama menjadi program bersama atau masing-masing agama kencanaungkannya.

Jika ada gagasan untuk menyatukan kitab suci dalam satu jilid, menyatukan tempat ibadah, doa bersama atau kegiatan ibadah,

sebaiknya tidak dilakukan, karena hal itu akan membingungkan umat, seolah menyamakan semua peribadatan dari agama yang berbeda-beda. Toleransi antar umat beragama sangat diperlukan, yaitu dengan cara tidak intervensi keimanan an peribadatan mereka. Menghormati keyakinan dan peribadatan mereka, meskipun kita tidak sepaham tentang kebenaran yang mereka lakukan. Apakah Sudara setuju dengan adanya toleransi antar umat beragama dan dalam hal apa saja?

Perbedaan etnis, bangsa, bahasa, adat-istiadat dan agama merupakan suatu realitas, dan sekaligus sebagai kekayaan bangsa Indonesia sebagai pengejawantahan dari **Binneka Tunggal Ika**. Jika ada pemeluk agama lain yang merayakan hari besarnya, selama tidak mengganggu keimanan dan sistem peribadatan kita silahkan saja. Namun, jika upacara agama lain itu menimbulkan gangguan keyakinan dan peribadatan kita, maka sebaiknya hal itu dihindari.

Dalam hal kerjasama budaya Nahdlatul Ulama lebih terbuka selama tidak menyangkut masalah peribadatan dan keimanan. Bahkan ketika mereka (agama lain) pemeluknya melakukan upacara keagamaan tidak segan-segan warga NU melalui Banser ikut menjaganya. Berbeda halnya dengan Persis yang mengambil jarak terhadap kegiatan yang berbau keagamaan dari agama lain, menyerahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang.

Dalam hal perbedaan tradisi, budaya, seni dan tatanan sosial mesti diakui, dan sejauh tidak mengganggu nilai-nilai ajaran yang kita yakini, boleh saja kita bersama pemeluk agama lain untuk melakukan kegiatan budaya. Di samping kita mengakui budaya masing-masing agama mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda.

Dalam hal kebudayaan yang berbasis kepentingan agama Persis lebih *zakliyk*, jika tidak pernah ada di Zaman Rasulullah maka hal itu dihindari. Sementara Nahdlatul Ulama menerima budaya baru meskipun di Zaman Rasulullah tidak pernah dilakukan, karena hal itu termasuk di dalam wilayah *ijtihadiah*, bukan pada *syaraiah qathiyyah*. Nahdlatul Ulama lebih mudah melakukan asimilasi

budaya dengan ruh Islam dari pada Persatuan Islam yang selalu mengaitkannya dengan tradisi Nabi, yang tentu tidak akan bisa dilepaskan dengan ke-Arab-annya. Sehingga di dalam realitas kehidupan sosial-budaya, NU banyak melakukan kegiatan budaya berbau Nusantara. Sedangkan Persis lebih terfokus pada kegiatan keagamaan secara formal.

Perbedaan jender, suku bangsa, bahasa, tradisi, kebiasaan, upacara dan kegiatan seni budaya yang dilakukan oleh berbagai agama dan masyarakat yang berbeda-beda tidak ada alasan untuk mengelaknya. Hal itu juga mendukung terhadap kebersamaan dan memperkaya budaya Nusantara. Perbedaan seni-budaya, tradisi, upacara adat dan sebagainya sebaiknya tetap dipertahankan, apalagi jika tradisi itu menguatkan tradisi keagamaan umat Islam

Masing-masing budaya mempunyai keunikan tersendiri, sehingga tidak serta-merta kebudayaan ini lebih baik dari pada yang lainnya dan sebagainya. Dalam hal multikulturalisme sebaiknya masyarakat bersama-sama dengan pemerintah memberikan dukungan pemeliharaan dan pengembangannya.

Multikulturalisme bukan masalah yang harus dipermasalahkan atau diperbincangkan bertele-tele, karena itu bersifat keduniwian dan tidak menyangkut akidah maupun ibadah, berbeda halnya dengan pluralisme agama yang menyentuh ranah keagamaan yang harus disikapi secara lebih berhati-hati, dari pada menyikapi perbedaan kebudayaan (multikulturalisme). Multikulturalisme tidak termasuk dalam prioritas fatwa MUI, sehingga tidak sesensitif pluralisme agama.

Multikulturalisme sangat erat hubungannya dengan Binneka Tunggal Ika, bahkan di alam multikulturalisme itu terkandung makna ajaran Binneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Untuk membekali siswa tentang keberagaman Nusantara maka perlu para siswa itu diberikan materi ajar Multikulturalisme secara profesional dan proporsional, bukan untuk kepentingan politik penguasa. Di samping

menghidupkan budaya yang berbasis kedaerahan, sebaiknya juga dikembangkan kebudayaan yang berbasis pada agama.

Para pemuka agama Islam ini belum pernah mendatangi upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh pemeluk agama lain. Khawatir jika disalahtafsirkan oleh umat. Jika undangan itu yang bersifat pribadi, atau pergaulan sesama warga, maka tidak ada halangan untuk mengikutinya. Misalnya undangan syukuran, undangan perkawinan. Hari raya agama atau upacara keagamaan perlu dipertahankan karena hal itu memperkaya khazanah budaya bangsa, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat ketimuran.

Perlu ada diskusi budaya yang juga dihadiri oleh para pemuka agama, bukan dalam rangka membandingkan dan menyaingkannya melainkan bertukar pikiran tentang bagaimana pemeliharaan dan pengembangannya. Mencari titik kesamaan dan mengeliminasi perbedaan dalam perbedaan praktek berbudaya, sehingga pada saatnya bisa menjadi satu warna budaya.

Jika kebudayaan itu berbasiskan agama, maka sebaiknya pemeluk agama yang bersangkutan yang mengembangkannya, tanpa menutup kemungkinan sumbangsih dari pemikiran pemeluk agama lain. Dalam budaya arsitektur banyak mengadopsi dari Hindia dan juga Arab, demikian halnya dalam berbusana muslimah misalnya.

Semua tradisi budaya agama yang berbeda itu biarkanlah masing-masing bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Mungkin suatu waktu perlu ada tampilan kebudayaan secara bersama antar budaya yang berbasis agama untuk mendukung keanekaragaman bahasa, suku bangsa, tradisi dan adat-istiadat yang berasal dari agama yang berbeda. Dalam hal ini Binneka Tuggal Ika akan semakin menampakkan dirinya. Memang ada keinginan untuk saling mempelajari, dan kemudian mengadopsi tradisi, upacara atau peristiwa budaya dari pemeluk agama lain.

4. Persamaan Pandangan dan Sikap Para Pemuka Agama Terhadap Multikulturalisme

Secara fitrah manusia dilahirkan secara umum diberikan potensi jasmani, ruhani, potensi yang sama meskipun dengan kondisi maupun takaran yang berbeda-beda. Demikian halnya dalam hal keimanan, semua manusia secara kodrati dibekali dengan keimanan atau keyakinan, yang kemudian dikembangkan oleh orang terdekat dalam hal ini adalah ayah dan ibunya. Kesamaan pertama dari semua pemeluk agama, ialah bahwa mereka itu adalah beragama (*theistik*) yang meyakini akan kebenaran iman dan sistem peribadatannya.

Keempat agama melalui jurubicara para pemukanya mereka bersepakat dan sama pandangan serta sikapnya bahwa keaneragaman agama itu adalah sebuah keniscayaan alamiyah yang tidak mungkin dihindari, terlebih dalam hal keanekaragaman dalam beragama, bertata-sosial budaya, beradat-istiadat, bertradisi, berbahasa, berkomunitas dan pengakuan perbedaan; faham yang paling purba akan perbedaan ini adalah perbedaan ras, suku, warna kulit, bangsa dan bahasa. Dalam konteks ini semua agama mengakui eksistensinya, dan para pemeluknya yang diwakili oleh para pemuka agama di kota Bandung ini mengakui adanya ko-eksistensi dan ko-rekognisi kebenaran masing-masing agama sesuai keyakinan mereka masing-masing.

Dalam konteks ini Islam memberikan batasan selama pluralisme agama itu tidak menyangkut masalah peribadatan dan keimanan, maka hakekatnya tidak dilarang, karena itu termasuk di dalam muamalah sosial yang secara luas diberikan kebebasan. Namun, jika ada ketentuan hukum, apakah itu wajib yang dilaksanakan, haram yang harus di jauhi atau ditinggalkan, ketentuan yang harus dipatuhi maka tidak ada tawar-menawar dalam hal ini, kecuali harus dijalankan sesuai apa yang digariskan Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Namun dalam hal yang tidak diatur di dalamnya, maka umat Islam diberikan kebebasan seluas-luasnya, bahkan tidak usah dicari-cari alasan atau dipersoalkan secara bertele-tela. Disini ijtihad berperan lebih besar dari pada yang secara pasti telah ditetapkan di dalam

Al-Qur'an maupun Al-Hadits (H.R. Ibnu Dafi'q di dalam An-Nawawi, 2007).

Agama Kristen yang dikenal dengan agama kasih sayang itu dan diwakili oleh salah satu pemukanya ini mengakui adanya kemajemukan agama, budaya, tradisi, adat-istiadat dan perbedaan alamiah seperti ras, warna kulit, etnis bangsa dan bahasa. Umat Kristiani mengakui akan keberagaman agama dan keyakinan, namun mereka tidak setuju jika persamaan itu diperuntukkan bagi semua agama. Umat kristiani mengakui kebenaran akidah dan peribadsatan sesuai dengan keyakinan dan tata-cara peribadatan mereka, tidak serta-merta mengakui keimanan dan peribadatan agama lain. Menurut mereka pluralisme bukan berarti menyamakan kebenaran agama, melainkan mengakui eksistensi dan kebenaran-masing-masing agama sesuai keyakinan mereka masing-masing, bukan mengakui kebenaran agama lain termasuk keyakinan dan sistem peribadatannya.

Sedangkan agama Hindu nampaknya lebih longgar dalam menangkap pluralisme agama ini. Umat Hindu tidak mempersoalkan, karena masing-masing agama mempunyai kebenaran yang harus diterima dan diakui. Bahkan umat Hindu beranggapan bahwa seluruh umat manusia itu bersaudara dalam kehidnuannya, sebelum mereka memeluk agama lain. Bahkan dalam hal keyakinan dan peribadatan umat Hindu tidak mempersoalkan mau terjadi penyatuan atau penyamaan antar keimanan dan peribadsatan agama. Hal ini tak lepas dari keyakinan agama Hindu yang mengakui adanya berbagai macam Dewa, dari yang bersifat lokal dan spesifik sampai kepada dewa yang diakui secara universal dan meluas. Bahkan mereka tidak peduli apakah lebih berpihak kepada Dewa Brahma, Dewa Wisnu atau Dewa Shiwa dengan berbagai alasan kepentingannya.

Atas pemikiran ini maka agama Hindu mudah sekali menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya, dan hal ini terbukti dengan masuknya agama Hindu di Indoensia yang tidak menimbulkan gejolak budaya. Nampaknya cara persuasif-adaptif

ini juga dilakukann oleh para juru dakwah agama Islam pada saat awal masuknya Islam di Indoensia.

Sementara itu agama Budha berprinsip kurang lebih sama dengan agama Hindu, karena memang di antara lahirnya agama Budha ini didahului dengan munculnya lebih dulu agama Hindu di kawasan bumi yang sama. Agama Budha menerima paham pluralisme agama, karena menurut mereka yang penting bukan keimanan maupun tata-cara peribadatan, namun yang menjadi fokus utama agama Budha adalah moral yang dikenal dengan dharma. Sebab Sidharta tidak mengajarkan sistem teologi, melainkan mengajarkan perilaku baik.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pada hakekatnya semua agama mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan. Di satu sisi ada yang mempertahankan dengan kokoh keaneragaman itu di bidang keimanan dan peribadatan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh agama Islam dan juga Kristen. Sedangkan agama Hindu dan Budha memberikan peluang luas untuk penyatuan atau penyamaan kebenaran agama, yang tidak hanya terikat oleh kebenaran agamanya sendiri. Dengan kata lain kebenaran dari agama lain juga diakui kebenarannya oleh agama Hindu dan Budha ini. Karena yang dipentingkan adalah moral atau dharma bukan keimanan dan peribadatannya. Meskipun agama Hindu lebih berat muatan teologinya dari pada agama Budha.

Keempat agama ini sama-sama menganjurkan kedamaian dan kerukunan antar umat beragama, yang kasusnya di Indoensia terbingkai oleh semboyan Binneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun berada dalam kesamaan bersatu nusa, bangsa dan bahasa serta ber-Negara Kesatuan Republik Inoensia.

Untuk memelihara kedamaian dan kerukunan antar umat beragama tidak mesti menyamakan semua agama, atau menyatukan semua ajaran agama melainkan tetap mengakui eksistensi dan keberannya masing-masing, yang perlu dikembangkan adalah kerja sama antara umat beragama yang tanpa intervensi ajaran

keimanan dan sistem peribadatan, serta sosial-budaya yang tidak secara eksplisit diatur di dalam ketentuan ajarannya.

Dalam hal paham multikulturalisme atau paham keaneragaman budaya, keempat agama dengan para pemukanya masing-masing tidak begitu risau dibandingkan dengan perbedaan penafsiran terhadap pluralisme agama. Hal ini disampaikan baik oleh pemuka agama Kristen maupun pemuka agama Islam, meskipun ada catatan bahwa bagi Persis budaya yang ditolerer adalah budaya yang semenjak nabi telah dikembangkan, bukan budaya baru yang diatasnamakan budaya Islam. Dan agama Islam yang memberikan kelonggaran kegiatan budaya ini datang terutama dari pemuka Ormas Nahdlatul Ulama.

5. Perbedaan Pandangan dan Sikap Pemuka Agama Terhadap Multikulturalisme

Pemuka agama Islam di lingkungan kota Bandung mempunyai pandangan dan sikap yang sama tentang pluralisme agama, yaitu tidak sepakat dengan konsep pluralisme agama yang bermakna menyamakan semua agama, semua agama sama-sama benarnya, sehingga kebenaran itu agama menjadi relatif. Keberagaman agama adalah sebuah realitas yang tidak bisa dinafikan, bahkan bukan hanya keragaman agama melainkan juga keanekaragaman sosial, budaya, ras, suku, bangsa dan bahasa sebagai sebuah keniscayaan. Namun khusus dalam masalah agama tidak harus dipersamakan, dipertukarkan dan disatupadukan. Biarkan masing-masing meyakini kebenarannya sendiri, mengimani kepercayaan, dan menamakan ibadahnya masing-masing. Tidak boleh ada campur tangan dalam masalah akidah.

Pananganyang berbeda adalah dari pemuka agama Hindu dan Budha yang membuka diri pada kemungkinan penyatuan, penyamaan dan pepaduan keyakinan maupun peribadatan. Karenayang dipentingkan oleh kedua agama ini adalah moralitas dan dharma, bukan tata-cara ibadahnya. Meskipun upacara keagamaan bagi agama Hindu jauh lebih diperhatikan dari pada

agama Budha. Hanya dalam soal moralitas agama Budha lebih concern dari pada agama Hindu.

6. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menolak Pluralisme Agama dan Multikulturalisme

Dalam setiap konsep maupun tesa baru selalu ada pro dan kontra, ada yang menerima bahkan mendukung dan ada pula yang menolak. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tentunya tidak hanya bisa dikelompokkan dalam hitam putih melainkan ada persyaratan tertentu yang menyertainya.

- a. Faktor ajaran agama yang bersangkutan baik yang tertera di dalam kitab suci maupun yang dicontohkan oleh para pembawa dan para pemuka agama yang bersangkutan sebagai panutan dalam berpandangan maupun bersikap terhadap suatu paham tertentu.
- b. Faktor Sosial-Budaya yang melingkupi para pemeluk agama yang bersangkutan, dimana mereka harus mengadopsi, mengadaptasi atau bahkan mengasimilasi sosial-budaya setempat.
- c. Faktor historis-kultural dari mana agama itu datang dan disebarluaskan oleh para juru dakwahnya. Misalnya Agama Islam dari Saudi Arabia, Hindu dan Budha dari Hindia dan Kristen dari Eropa.
- d. Faktor geografis dan geopolitis, dimana para penganut agama itu berada, sehingga memunculkan komunitas agama yang bersifat "lokal" maupun "nasional"
- e. Faktor ketokohan para pemimpin agama, dan organisasi di mana komunitas agama itu bernaung.

Paham pluralisme agama dan multikulturalisme yang menjadi issue menarik bagi kalangan pemeluk agama dan para pemuka agama, serta kaum intelektual yang mengharapkan generasi muda agama dituntut untuk lebih mencermati isu tersebut. Apakah hal itu merupakan konsep utuh untuk mendamaikan dunia ini, untuk menegakkan kebenaran ajaran agama masing-masing atau justeru

ada “tipu daya” kelompok tertentu yang menyelipkan konsep ini justeru untuk mengkaburkan dan mendangkalkan pemahaman serta pengamalan keagamaan para pemeluk agama di bumi Nusnatara ini.

Tanpa bermaksud apriori maupun apoloogi terhadap isu maupun ajaran agama masing-masing pemeluknya, maka kata kunci yang harus dipegang adalah membaca, mencermati dan mengkritisi isu pluralisme agama dan multikulturalisme baik latar belakang, filosofi, nilai dan ajaran dari setiap agama yang memberikan respons terbaik bagi kemunculan dan merebaknya pluralisme dan multikulturalisme sehingga masyarakat Indonesia tetap menjunjung tinggi tentang keanekaragaman keyakinan yang tumbuh subur di Indonesia dan dapat hidup damai secara berdampingan untuk menuju kesejahteraan lahir maupun batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim
- Agus Hakim (1969), *Perbandingan Agama*, Bandung: Diponegoro
- Aly Utsman (2008), *Menegakkan Pluralisme*, Yogyakarta: LSAF
- Al-Faruqi, Ismail R. (1986) *The Cultural Atlas Of Islam*, London: Mcmillan Publisher
- Aloys Budi Purnomo (2003), *Membangun Teologi Inklusif-Pluralistik*, Jakarta: Kompas
- Azhar Saiuddin (2012), *Penyusunan Skala Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , (2013), *Sikap Manusia*, Yogyakarta: Pusataka Fajar Offset
- Azra, Azyumardi (2003) *Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhinneka Tunggal Ika*, dalam Tsaqofah, "Menggagas Pendidikan Multikultural", vol 1 nomor 2
- Biyanto (2009), *Pluralisme Keagamaan Dalam perdebatan*, Surabaya: UMPRESS
- Brahmheld Theodor E, (1957) *Cultural Foundations of Education*, New York: Harper and Brothers,
- Din Syamsudin. (1999). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Elizabeth, K. Nottingham, (1954), *Agama dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali
- Fahruroji, (2009) *Kemampuan Siswa SMA Memahami Wacana Demokrasi dalam Buku Teks*, Disertasi, Bandung: SPS UPI Bandung
- , (2017) *Multikulturalisme dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan BASIS, Vol. 1 No. 2 September 2017 hal. 38 - 39
- , (2021) *Memahami Wacana Demokrasi pada Model Buku Teks*, ZahirPublisher: Yogyakarta
- Hanafi (1980), *Theology Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna
- Hasbullah Bakri, (1986) *Ilmu Pwerbandingan Agama*, Jakarta: Wijaya

- Hefner (2007), *Politik Multikulturalisme*, Yogyakarta: Kanisius
[https://id.wikipedia.org/wiki/ Pluralisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme)
- Hutson Smith, (1985), *Agama-Agama Manusia*, Jakarta: Yayasan
 Obor Indonesia Isaac
- Joesoef Sou'yyb (1996), *Agama-Agama Besar Di Dunia*, Al-Husna
 Zekra,
- Jalaluddin dan Ramayulis (1998), *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Kalam
 Muliya
- Krathwohl David R, (1985) *Social and Behavioral Science Research*,
 London: Josse Bass
- Krech, David et.all (1988), *Individual in Society*, London: McGraw Hill
 International Editions
- Lincoln Yonna S. and Guba Egon B, (1985) *Naturalistic Inquiry*, New
 Delhi: Sage Publicization
- LP3ES, (1984) *Agama dan Tantangan Zaman*, Jakarta: LPES
- Mulyanto Sumardi, (1982) *Penelitian Agama*, Jakarta: Sinar Harapan
- Maslikhah (2007), *Quo Vadis Pendidikan ultikultur*, Surabaya: JP
 Books
- Melani Budianata (2003) *Multikulturalisme dan Pendidikan
 Multikultural: Sebuah Gambaran Umum*, dalam Tsaqofah,
 "Menggagas Pendidikan Multikultural" Vol 1, Nomor 2 hal. 9
- Madjid, Nurcholil (1992), *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta:
 Yayasan Obor
- _____, (2001) *Kebebasan Beragama dan Pluralisme dalam Islam*,
 Passing Over: Melintasi Batas Agama, Jakarta: Gramedia Pustaka
 Utama dan Paramadina
- Ngainunnaim (2013), *Islam dan Pluralisme Agama*, Trenggalek
- Nasution S, (1988) *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung:
 Tarsito
- Newcombs dkk (1985), *Psikologi Sosial*, Bandung: CV Diponegoro,
- Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Masyarakat Madani: Agama Kelas
 Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Robert W hafner (2011), *Politik Multikulturalisme*, Bandung: Kanisius
- Sudarto (2014), *Wacana Islam Progresif*, Yogyakarta: Ircisod

- Tilaar, H.A.R. (1997) *Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Era Globalisasi: Visi, Misi dan Program Aksi Pendidikan dan Latihan Menuju 2020*. Jakarta: Grasindo
- Umari, Akram Dhiyauddin. (1999) *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gema Insani Press
- Zainal Arifin, (1984) *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, Jakarta: Pustaka al-Husna
- Zainal Abidin Bagir dkk. (2011) *Pluralisme Kewargaan; Arah Baru Politik Keagamaan di Indonesia*, Bandung: Mizan

BIOGRAFI PENULIS



Dr. H. FAHRUROJI, M.Pd memulai karier pendidikannya sebagai guru SMA pada tahun 1983 - 1985, Kemudian menjadi dosen tetap di Universitas Islam Nusantara, Bandung dari tahun 1984 - sekarang. Pendidikan Dasar sampai Menengah Atas ia selesaikan di tempat kelahirannya, Tegal. Kemudian Pendidikan Tingginya mulai dari Program Pendidikan S1 – S3 ia selesaikan di UPI Bandung. Kini ia sebagai Lektor Kepala pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Uninus Bandung. Sebelumnya ia ditugaskan pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Jabatan yang pernah dipercayakan kepadanya adalah Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (1991 – 1995), Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (1996 – 2000), Pada tahun 2012-2018 ia ditugaskan di Sekolah Pascasarjana Program Studi PAI dan kemudian menjabat sebagai Ketua Program Studi S2 PAI Uninus (2018 – 2020). Disamping tugas pokoknya di Universitas Islam Nusantara, ia pun mengabdikan dirinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah, Cicalengka, Bandung sebagai dosen tidak tetap. Jabatan yang pernah dipercayakan kepadanya adalah Sekretaris Progran Studi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Falah (2000 – 2004) Ketua Program Studi PAI STAI Al-Falah (2004 – 2012), Wakil Ketua 1 STAI Al-Falah (2012 – 2016 dan 2017 – sekarang. Ia aktif dalam berbagai penelitian yang didanai oleh Kemenristek-Dikti dan mempublikasikannya dalam jurnal Nasional maupun Internasional. Disamping itu ia juga aktif dalam berbagai seminar baik nasional maupun internasional dan makalahnya telah dimuat dalam berbagai prosiding seminar Internasional, antara lain: Study of Perception and Religious Leader Attitude to Pluralisme and Multiculturalisme in Bhineka Tunggal Ika Frame, Proseeding International of Education, (2015); Teaching Foreign Language in

Early Childhood, Proseeding ICWS (2017); The Understanding of Friday Prayer Attendees (*Mustamik*) Towards Friday Sermon Discourse, Proseeding ICES (2018); Relationship between Language and Thinking Activities as Well as Relationship between Language and Culture, Proseeding IMLA (2019); Kompleksitas Penerjemahan dalam Masyarakat Bilingualisme, Prosiding Seminar Daring Internasional, Riksa Bahasa (2020). Jurnal Internasional Terindeks Scopus, The Javanese of Tegal Dialect Going to be the Tegal Language (2020); Strategy Of Giving Waiting Time To Answer Questions Asked By Arabic Language Teachers To Madrasah Tsanawiyah Students (2022); Land And Building Legality For Mosques, Case Study In Bojongloa Village, Rancaekek District, Bandung Regency (2022) Buku: Perkawinan antaragama dan Ekspresi Ketaatan Beragama (1993); Permasalahan Angkatan dalam Sastra Indonesia (1997); Bahasa Bantu (2002); Muamalah sebagai Perwujudan Hablum Minannasi (2008); Wacana Khutbah dalam Konteks Keindonesiaan (2018); Memahami Wacana Demokrasi pada Model Buku Teks (2021); Masyarakat Madani: Pluralisme dan Multikulturalisme (2022)



DR. MARWAN SETIAWAN, M.Pd., saat ini adalah sebagai salah satu dosen tetap di Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Dosen pengampu Pendidikan Agama Islam Pluralisme dan Multikulturalisme, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Islam dan Pengembangan Karakter Bangsa, Pengembangan Bahan Ajar dan Penulisan Buku PAI, Seminar Pengembangan Proposal Tesis. Sebagai Dosen Tamu di Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut : Dosen pengampu Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), dan Dosen mata kuliah lainnya al: Filsafat Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn I, dan Pkn II), Hukum Internasional, Hukum Acara Perdata, Belajar Pembelajaran, Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik. Dosen Tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAIM) Garut, mata kuliah Filsafat Ilmu, Manajemen Pendidikan Agama Islam. Dosen Tamu di Sekolah Tinggi Hukujm (STH) Garut Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan (S-1) pada Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKN) di STKIP Garut tahun 1990, melanjutkan studi Magister Pendidikan (S-2) Teknologi Pendidikan, dan Doktor (S-3) Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara (UNINUS) tahun 2014.

Pengalaman mengajar. : Guru SMA (1986-1992): Guru bidang studi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Geografi di SMA Cokroaminoto Garut, Guru bidang studi Tata Negara di SMA Cikuray Garut, Guru bidang studi Sosiologi dan Antropologi, dan Sejarah di SMA Nusa Indah Garut, Guru bidang studi Sejarah di SMA PGRI Garut.

Buku yang sudah terbit : Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja Dalam Perspektif Pendidikan, *Juvenile Delinquency*, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral, Penerbit Ghalia Indonesia, Tahun 2015.

Artikel yang sudah terbit pada Scopus *International Journal of Health Sciences : The Effectiveness of The Cooperative Learning Model On Students' Activities And Learning Outcomes In Citizenship Education Current Discussion of Corruption Eradication efforts In SMA Negeri 15 Garut*, August, 09, 2022.

Partisipasi dalam organisasi profesi, a.l. : Koordinator Diklat Persatuan Guru NU (Pergunu) Jawa Barat, Ketua Senat Mahasiswa STKIP Garut, Ketua Ikatan Alumni (IKA) STKIP Garut yang beranggotakan 15.647 orang Alumnus. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan profesional dalam bentuk seminar tingkat Perguruan Tinggi dan tingkat Nasional (Nara sumber dan partisipan).